





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

INSPEKTORAT DAERAH

Jl Jend. Sudirman NO.79 Kota Gorontalo Telp.(0435) 831061 Fax.(0435) 831063

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah melakukan reviu atas Draft Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 24 Maret 2023



MISRANDA E.U NALOLE, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya – IV c

NIP. 19651016 199303 2 008

Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dapat kami tunaikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2017-2022, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, performance Pemerintah Provinsi Gorontalo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target kinerja yang masuk dalam program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur yang lebih merata, ekonomi yang lebih meningkat, pemerintahan yang lebih melayani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata yang mendunia dan lingkungan yang lebih lestari, secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Gorontalo.

Diharapkan, Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini, dapat menjadi media informasi eksternal publik sekaligus menjadi alat koreksi internal penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo guna keberlanjutan pembangunan daerah dimasa yang akan datang dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Gorontalo, 26 Maret 2023



Pj. GUBERNUR GORONTALO, 



Dr. Ir. HAMKA HENDRA NOER, M.Si

BAB 1

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

B. PEJELASAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

C. ASPEK STRATEGIS DAERAH DAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

1.1. LATAR BELAKANG

Harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sampai saat ini masih menjadi agenda prioritas Nasional. *Clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk menata pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa tersebut merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, birokrasi yang merupakan unsur sumberdaya manusia penyelenggara sistem administrasi pemerintahan, menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan *clean government* dan *good governance* tersebut. Posisi dan peran birokrasi menjadi sangat kuat dan dominan,

karena selain berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan politik. Dalam kehidupan ekonomi, kinerja birokrasi berpengaruh pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan politik, kinerja birokrasi akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di Provinsi Gorontalo.

1.2. PENJELASAN UMUM PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

1.2.1. Kondisi Geografis Daerah

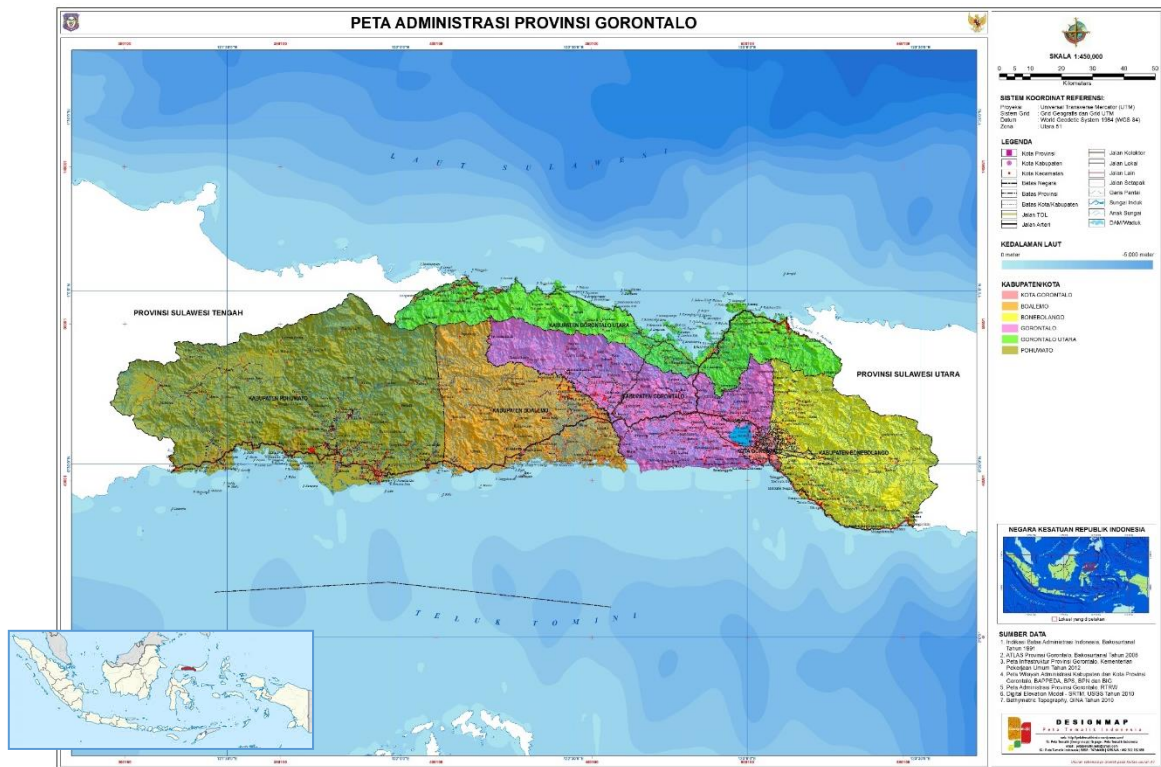
Provinsi Gorontalo berada di jazirah utara Pulau Sulawesi, dan telah resmi menjadi sebuah provinsi pasca diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Sesuai koordinat, Provinsi Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 123°43' Bujur Timur artinya wilayah Provinsi Gorontalo tepat berada di belahan utara Garis Katulistiwa. Letak geografis Provinsi Gorontalo sangat strategis karena wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong) di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan

langsung dengan Laut Sulawesi (Laut ini berhubungan langsung dengan negara-negara Asia Pasific : Filipina, Taiwan, China dan Jepang) dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Sebagai sebuah provinsi, luas wilayah Provinsi Gorontalo terbilang kecil yaitu hanya 12.435,00 km², jika dibandingkan dengan Wilayah Indonesia luas Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km², Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km², Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km², Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km², Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km² dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km². Dari keenam wilayah ini, Kabupaten Pohuwato dengan menguasai 35,83% menjadikannya sebagai Kabupaten terluas di wilayah Provinsi Gorontalo disusul kemudian oleh Kabupaten Gorontalo dengan persentase luas wilayah terhadap Provinsi Gorontalo adalah 17,24%. Sedangkan Kota Gorontalo memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,53% dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo.

Struktur daratan di wilayah Pulau Sulawesi khususnya Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut. Di bawah ini adalah peta administrasi wilayah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 1.3.1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Gorontalo



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo, 2010-2030

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pemutakhiran data kependudukan, sampai dengan tahun 2021, jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 1.180.948 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,16 persen. Dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 585.115 jiwa atau 49,55 dan penduduk laki-laki sebanyak 595.833 orang atau 50,45 persen. Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 395.635 jiwa atau 33,50 persen, diikuti oleh Kota Gorontalo dengan jumlah penduduk sebesar 199.788 jiwa atau 16,92 persen dan Kabupaten Bone Bolango sebesar 164.277 jiwa atau 13,91 persen serta Kabupaten Pohuwato sebesar 147.689 jiwa atau 12,51 persen dan Kabupaten Boalemo sebesar 147.038 jiwa atau 12,45 persen . Sementara itu, jumlah penduduk paling rendah terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu

sebesar 126.521 jiwa atau 10,71 persen. (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2023).

Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka Kota Gorontalo yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 65,96 km² memiliki penduduk yang cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo adalah wilayah terpadat penduduknya di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan dalam tabel kondisi demografi Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 1.3.2.1
Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, distribusi Persentase Penduduk, KepadatanPenduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2010 dan 2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		Laju pertumbuhan penduduk per tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km ²)	Rasio jenis kelamin
		2010	2021	2010-2021	2021	2021	2021
1	Kab. Boalemo	129.253	147.038	1,18	12,45	96	104,25
2	Kab. Gorontalo	355.988	395.635	0,96	33,55	225	101,43
3	Kab. Pohuwato	128.748	147.689	1,25	12,50	35	103,66
4	Kab. Bone Bolango	141.915	164.277	1,34	13,89	82	101,23
5	Kab. Gorontalo Utara	104.133	126.521	1,78	10,66	75	104,38
6	Kota Gorontalo	180.127	199.788	0,95	16,94	2.495	98,89
Provinsi Gorontalo		1.040.164	1.180.948	1,16	100,00	104	101,90

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Berdasarkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 101,90 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki.

1.3.3 Kondisi Ekonomi

Semenanjung Gorontalo merupakan salah satu jalur perdagangan di Indonesia sejak zaman dahulu. Sektor pertanian, perikanan dan jasa adalah sektor yang diandalkan di Provinsi ini karena memiliki kontribusi yang besar bagi

pendapatan asli daerah. Dalam rangka mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Agropolitan, maka berbagai upaya terus dilakukan. Pemerintah Provinsi melakukan berbagai macam program pembangunan, diantaranya melalui perbaikan infrastruktur sebagai pilar pemacu pembangunan, penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan dana penjamin, peningkatan SDM pertanian, memperlancar pemasaran dengan jaminan harga dasar dan lain lain, serta dengan menyusun berbagai program dan kegiatan.

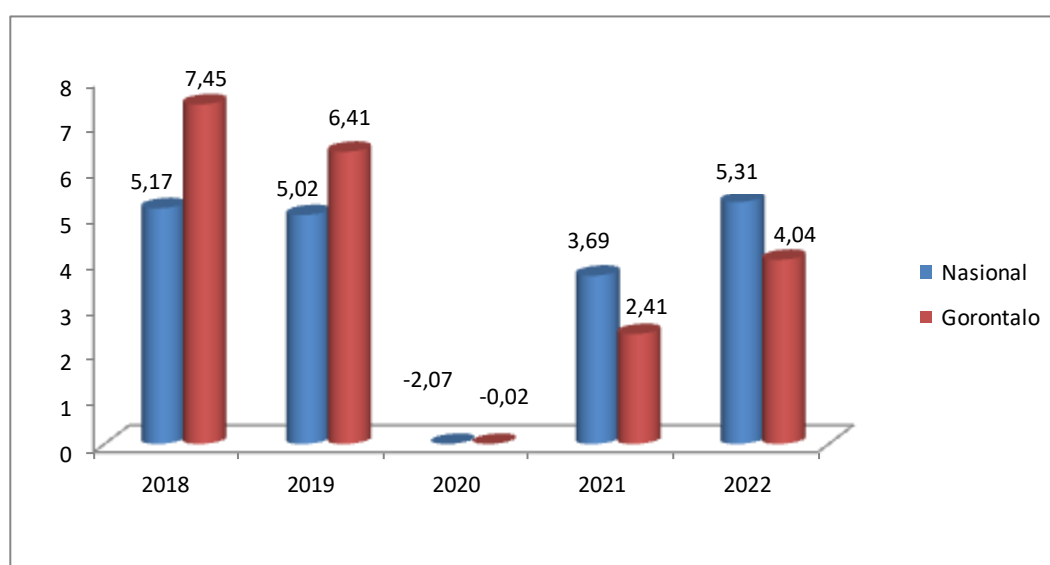
Kawasan laut di Provinsi Gorontalo, terutama di Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini, menyimpan banyak potensi alam karena merupakan satu satu teluk yang dilalui garis khatulistiwa. Perikanan dan kelautan merupakan sektor unggulan bagi Provinsi Gorontalo yang memiliki garis pantai yang cukup panjang. Garis pantai wilayah Utara dan Selatan masing masing memiliki panjang sekitar 270 kilometer dan 320 kilometer. Potensi sumber daya perikanan di Provinsi Gorontalo berada di tiga perairan, yakni Teluk Tomini (Teluk Gorontalo), Laut Sulawesi, dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Sulawesi. Provinsi Gorontalo memiliki letak geografi yang strategis untuk perekonomian nasional, kerana memiliki jalur perdagangan yang langsung berhadapan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu Provinsi Gorontalo juga merupakan salah satu daerah yang menjadi pintu masuk jalur perdagangan dari benua Amerika ke negara - negara di Asia Pasifik, seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia.

Perekonomian Gorontalo tahun 2022 diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp 47.574,43 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 30.286,45 miliar. Ekonomi Gorontalo tahun 2022 tumbuh sebesar 4,04 persen. Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2022 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 37,99 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi Rumah tangga dengan kontribusi sebesar 61,64 persen.

Pertumbuhan dan kontribusi PDRB tahun 2022, Gorontalo memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) sebesar 2,61 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,04 persen.

Gambar 1.3.3.1 berikut akan memperlihatkan kondisi ekonomi Gorontalo Tahun 2018-2022 di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Gambar 1.3.3.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo
Tahun 2018 – 2022 (persen)



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo 2023

1.3.4 Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Pada Akhir tahun 2022, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah 5.269 Orang, yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 2.309 Orang atau 43,82 persen dan ASN perempuan sebanyak 2.961 Orang atau 56,20 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.218 orang merupakan tenaga guru dan 724 tenaga teknis kesehatan. Selain guru dan tenaga teknis kesehatan, kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo di dukung pula oleh pejabat fungsional baik fungsional kesehatan maupun fungsional teknis lainnya.

Dari segi kuantitas jumlah aparatur, saat ini dianggap cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo, namun dari segi kualitas berdasarkan tingkatan dan latar belakang pendidikan formal serta dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya masih perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan lanjutan pada jurusan yang masih langka dan strategis, terbatas atau melalui diklat-diklat teknis terutama terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Selain hal tersebut, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional yang tentunya sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, yang mengharapkan bahwa SDM Indonesia harus berkualitas, berkeahlian, pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan hal ini maka diperlukan perbaikan komposisi dalam birokrasi untuk mengembangkan fokus SDM aparatur yang mengutamakan kompetensi dan keahlian. Agar simplikasi eselon tidak diartikan sebagai penghapusan jabatan, namun sebagai langkah untuk pembangunan SDM yang berkualitas dan berkeahlian. Selain itu, pemetaan jabatan administrator dan pengawas yang akan dialihkan menjadi jabatan fungsional ini bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang. Dengan langkah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Dan pada tanggal 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penetapan dan pelantikan terhadap 286 pejabat struktural yang disetarakan ke jabatan fungsional baik pada jenjang ahli muda maupun ahli madya dengan berbagai nomenklatur jabatan fungsional. Dan pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memasuki fase ke tiga atau tahap terakhir dari tahapan penyederhanaan birokrasi yaitu penyesuaian sistem kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

1.3.5 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060), yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah provinsi melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan

perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemerintah daerah provinsi juga melaksanakan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional yang meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kab/Kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kab/Kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kab/Kota dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Gorontalo di pimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh Wakil Gubernur. Dalam menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas tersebut terdiri dari : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Pada awal tahun 2022, periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan 2017-2022 berakhir, tepatnya sejak tanggal 12 Mei 2022. Dengan berakhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Seperti diketahui, Pj Gubernur adalah orang yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur karena berakhir masa jabatannya untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Tugas dan Wewenang Pj Gubernur adalah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas Pj Gubernur sebagai kepala daerah yaitu :

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, Pj. Gubernur memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Pasal 132A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pj Gubernur. Berikut ini larangan bagi Pj Gubernur adalah:

- a. Melakukan mutasi pegawai;
- b. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- e. Adapun ketentuan di atas sebagaimana termuat dalam huruf 1 sampai dengan d, dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugas, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat Gubernur/perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan asas:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

Dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai fungsi pendukung urusan pemerintahan Provinsi Gorontalo, yang didalamnya terdapat 6 (enam) Biro yaitu :
 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Biro Hukum;
 - Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi;
 - Biro Organisasi;

- Biro Pengadaan;
 - Biro Umum.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan, pada Pemerintah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
1. Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas kesehatan dengan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas pekerjaan umum, penataan ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
 4. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 5. Datuan polisi pamong praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
 6. Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. Dinas kearsipan dan perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 8. Dinas kelautan dan perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 9. Dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

10. Dinas pangan dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
 11. Dinas pariwisata dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 12. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 13. Dinas pertanian dengan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 14. Dinas perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 15. Dinas komunikasi, informatika dan statistik yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 16. Dinas penanaman modal, energi sumber daya mineral, dan transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, ESDM dan transmigrasi;
 17. Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e. Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Provinsi Gorontalo terdiri atas:
1. Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan keuangan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
 3. Badan kepegawaian yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian;
 4. Badan pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan;

5. Badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

Selain perangkat daerah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memiliki 2 (dua) perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu :

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 13 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo yang memiliki fungsi :

- Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang pembinaan politik;
- Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan serta fasilitasi dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi dibidang ketahanan sosial dan ekonomi;
- Perumusan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur dibidang fasilitasi pembinaan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan ekonomi;

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain yang memiliki fungsi :

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pada Tahun 2022, Peraturan Daerah yang didalamnya memuat nomenklatur dan susunan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diungkapkan diatas, telah diubah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Tetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dasar dan berpedoman terhadap beberapa aturan tersebut, juga memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang perlu dan penting untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dimana pembunaan penataan ini dilakukan merupakan upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern. Pengendalian penataan perangkat daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan terhadap pembentukannya, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asa pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Selain dari pada hal-hal diatas, penataan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan dalam rangka menyikapi dan mematuhi amanat yang tertuang pada pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana ketentuan tersebut tidak

menghendaki adanya 4 (empat) urusan pemerintahan berada dalam satu wadah dinas sehingga dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut.

Dari hasil penataan perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, menjadi sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Dinas Ketahanan Pangan;
15. Dinas Pariwisata;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Pertanian;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Tenaga Kerja, Energi Suber Daya Mineral dan Transmigrasi;
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
24. Badan Keuangan;

25. Badan Kepegawaian;
26. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Badan Penghubung;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Namun demikian, pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tersebut adalah sejak dikukuhkannya pejabat pimpinan Perangkat Daerah pada awal tahun 2023.

1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dan dianggap sebagai solusi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dan menjadi kebijakan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo, maka isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo selama periode pemerintahan yaitu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi isu strategis di Provinsi Gorontalo, masih menjadi permasalahan yang krusial dan membutuhkan kebijakan serta program-program yang menyentuh langsung dalam penanggulangannya. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mencapai 184,60 ribu orang atau sebesar 15,41 persen (sumber: data BPS September 2021). Kondisi ini menurun 0,18 persen poin jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020.

Garis kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2021 sebesar Rp.400.504,- per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.308.586,- atau 77,05 persen dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 91.918,- atau 22,95 persen. Tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2021, masih di pengaruhi oleh pandemi covid-19.

Dari sisi ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Gorontalo masih dihadapkan dengan tingginya angka pengangguran hal ini juga tak lepas dari pengaruh pandemi covid-19. Di tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) Provinsi Gorontalo sebesar 3,01 persen, menurun 1,27 persen poin jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2021 sebanyak 596.968 orang, dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 579.009 orang dan pengangguran sebanyak 17.959 orang.

Berbagai kebijakan untuk mencapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui :

- Peningkatan layanan dan cakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Pemberian Bantuan Operasional Siswa "Prodira" bagi siswa sekolah menengah untuk seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
- Penyediaan dan perluasan akses pangan, Pemberian bantuan pangan non tunai untuk menjamin pertumbuhan dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota;
- Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP - EK) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara;
- Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat.

2. Sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu ini dititik beratkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.

3. Infrastruktur dasar dan strategis.

Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relatif masih belum optimal, sehingga ke

depan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti lanjutan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), pembangunan Bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek.

Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, pembangunan jalan strategis provinsi, pengembangan transportasi dan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur dalam meminimalisir dampak bencana.

Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

5. Tata Kelola Pemerintahan.

Isu strategis yang terakhir adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan. Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang gambaran umum Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan penekanan kepada aspek strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022 yang diawali dengan uraian singkat mengenai rencana strategis, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan anggaran tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU).

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup


Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022;
- 2). Dokumen Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- 
- A. RENCANA STRATEGIS
 - B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022
 - C. INDIKATOR KINERJA UTAMA
 - D. RENCANA KINERJA DAERAH TAHUN 2022
 - E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022
 - F. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan perencanaan jangka menengah yang bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan jangka pendek dalam satu tahunan berupa RKPD Provinsi Gorontalo atau Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Gorontalo (RKT). RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022. RPJMD 2017 - 2022 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode ketiga dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu Gorontalo Maju dan Mandiri.

Rencana Strategis (RENSTRA) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah merupakan perencanaan jangka

menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA) organisasi perangkat daerah atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dijiwai oleh komitmen dalam mewujudkan percepatan pembangunan berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo. Komitmen ini tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1.1. VISI

Salah satu pedoman yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan adalah Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan dengan memperhatikan arahan RPJPD 2007-2025 dan RPJMN 2015-2019. Visi Pemerintah Provinsi Gorontalo 2017-2022 adalah :

Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera

Visi ini merupakan bingkai utama atau frame strategis seluruh stakeholder dalam akselerasi pembangunan di Provinsi Gorontalo 5 (lima) tahun ke depan sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan visi di atas mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu :

1. **Gorontalo Maju dan Unggul**, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya

kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

2. **Gorontalo Sejahtera**, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*) dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

2.1.2 MISI

Untuk pencapaian visi daerah selang 5 (lima) tahun ke depan, maka misi pembangunan yang diemban Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan

- PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Intak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
 5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai dalam percepatan pencapaian visi dan misi RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 - 2022

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : " Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera "		
Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara
	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”		
	Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana
Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq
	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman
Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Sumber: RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

2.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang disajikan dengan cukup terperinci sebagai pendetilan dari Visi dan Misi, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan utama pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan, yang dipopulerkan dengan Delapan Prioritas Daerah (8 PD). Hingga tahun ke empat pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan yaitu :

1. **Pendidikan yang berkualitas;** Setelah sukses dengan “Prodira” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global;
2. **Kesehatan yang prima;** Setelah sukses dengan “JAMKESTA” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo;
3. **Infrastruktur lebih merata;** Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo;
4. **Ekonomi yang lebih meningkat;** Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
5. **Pemerintah yang lebih melayani;** melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman;
6. **Agama dan Budaya;** Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat

terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak;

7. **Pariwisata yang lebih mendunia;** Perbaikan infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international;
8. **Lingkungan yang lebih lestari;** Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang dirumuskan dalam RPJMD telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah program prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan agar lebih optimal pencapaiannya serta menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo saat ini dan dimasa mendatang.

Program Prioritas Pembangunan Daerah dikelompokkan menjadi Program Unggulan dan Program Prioritas ditingkat Perangkat Daerah. Program unggulan merupakan program Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Program unggulan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Selain untuk mempercepat pencapaian sasaran utama pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, program prioritas daerah Provinsi Gorontalo juga mendukung sasaran pembangunan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana keselarasan pembangunan Nasional dengan pembangunan Daerah yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.4

Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022

No	Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024	Prioritas Daerah RPJMD 2017-2022
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.	Ekonomi kerakyatan yang meningkat Pariwisata lebih mendunia
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	-
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan yang lebih berkualitas Kesehatan lebih prima
3.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Agama dan budaya yang lebih semarak
4.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Infrastruktur lebih merata
5.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Lingkungan hidup lebih lestari
6.	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Pemerintahan lebih melayani

Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 di fokuskan pada penguatan sektor kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi, dimana penguatan sektor kesehatan akan ditempuh melalui optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemulihan kondisi sosial ekonomi akan dilaksanakan melalui penguatan Jaring

Pengaman Sosial (JPS) dan ketahanan ekonomi. Fokus pembangunan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 yang mengacu pada arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Fokus pembangunan tahun 2022 juga ditetapkan dalam upaya menyikapi kondisi pasca covid-19 yaitu untuk sektor sosial ekonomi.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2018 – 2022 sesuai periode Kepemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo. IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo yang juga termuat dalam dokumen RPJMD periode 2017-2022 ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo.

IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo

MISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH MERATA DAN ADIL.			
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara/Daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi

			<p>dalam kehidupan masyarakat. Rumus :</p> $Gt = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan : Gt = Pertumbuhan Ekonomi Periode t (triwulanan atau tahunan) PDB(t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB(t-1)= Produk Domestik Bruto periode sebelumnya</p>
			<p>Indeks Gini</p> <p>Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Rumus dari koefisien Gini :</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$ <p>Dimana, GR : Koefisien Gini (Gini Ratio) P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>
		PDRB Perkapita AHB (juta Rp)	<p>PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.</p>
		Peningkatan Pendapatan Daerah	<p>Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3</p>

			kelompok yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Penerimaan yang sah
		Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja : $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka} \times \text{usia angkatan kerja}}{100\% \times \text{jumlah penduduk angkatan kerja}}$
MISI : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	PM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana: α =0 z =gariskemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang

			berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
MISI : TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN LEBIH MELAYANI			
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN
Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu : Mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Sumber: *Pergub Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo 2018-2022*

2.4. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada program sehingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih fokus dan terinci sampai dengan penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu kesatuan dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementerian / Lembaga di Pemerintah Pusat sampai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah. Perencanaan yang lebih terinci tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditingkat Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 menjadi penjabaran tahun ke lima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 - 2022 yang juga merupakan muara dan akhir dari keberlanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun seluruh stakeholder yang ada di daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan dokumen tersendiri yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini, yang juga merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang juga merupakan instrumen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengoperasikan RPJMD serta memberikan gambaran konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran antara RKPD dengan RPJMD.

Ukuran keberhasilan/pencapaian pembangunan daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan tahun 2022 ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Rencana kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	6,3-7,0*
		Indeks Gini	0,412-0,391*
		PDRB Perkapita AHB (juta Rp)	37.560.000*
		Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp)	1,914 Triliun*
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11-3,91*
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	69,62
Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	14,91-14,33*
Peningkatan Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	BB

Sumber : RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 (* Penetapan target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Tim KEMD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo)

Adapun target kinerja daerah atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang ditetapkan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target
1	2	3
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1	Pertumbuhan Ekonomi %	6,3-7,0
2	IPM	69,62

3	PDRB per kapita AHB (juta Rp)	41,725
4	Laju inflasi provinsi (%)	3,30
5	Indeks Gini	0,412-0,391
6	Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, trilyun)	2,27
7	Persentase penduduk miskin (%)	14,91-14,33
Fokus Kesejahteraan Sosial		
1.	Pendidikan	
1.1	Angka melek huruf (%)	100
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	7,90
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK (%)	78
2.	Kesehatan	
2.1	Usia Harapan Hidup (tahun)	68
Fokus Seni Budaya		
3.	Kebudayaan	
3.1	Jumlah warisan budaya yang memperoleh pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	3 jenis
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Pelayanan Urusan Wajib		
4.	Keluarga Berencana	
4.1	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2.40
5.	Pekerjaan Umum	
5.1	Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%)	70
5.2	Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km)	278
6.	Perumahan	
6.1	Prosentase cakupan akses air minum yang layak (%)	83,02
6.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	69,41
6.3	Persentase penurunan luas Kawasan kumuh (%)	20
7.	Lingkungan Hidup	
7.1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	73,61
8.	Sosial	
8.1	Penduduk Miskin (orang)	185,391
9.	Ketenagakerjaan	
9.1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,11-3,91
10.	Pemerintahan	
10.1	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	BB
10.2	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB
10.3	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

10.4	Survey kepuasan masyarakat	80
10.5	Indeks tata kelola Pemerintahan	6,16
11.	Ketahanan Pangan	
11.1	Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan	66.89
11.2	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	846
12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
12.1	Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal)	88
13.	Komunikasi dan Informatika	
13.1	Indeks E-Government	3.85
14.	Penanggulangan Bencana	
14.1	Indeks resiko bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00)	0,37-0,65
Pelayanan Urusan Pilihan		
15.	Pertanian	
15.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,40
15.2	Persentase Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah)	14.228,39
15.3	Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	104,42
16.	Kehutanan	
16.1	Luas lahan kritis (Ha)	1,000
17.	Pariwisata	
17.1	Wisatawan Mancanegara (orang)	7,937
17.2	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	759.023
18.	Kelautan dan Perikanan	
18.1	Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN)	102,01

Sumber : RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Rencana Kerja dan pendanaan pembangunan daerah untuk tahun 2022, disajikan dalam program kegiatan beserta pagu indikatif. Terkait hal tersebut, seluruh Perangkat Daerah se-Provinsi Gorontalo dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 mengacu pada program kegiatan tersebut. Alokasi anggaran program-program strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Alokasi Anggaran Program Strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	ANGGARAN
1	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1,583,045,229
		Program Penataan Organisasi	187,409,581
		Program Kesejahteraan Rakyat	20,969,570,163
2	BIRO ORGANISASI	Program Penataan Organisasi	1,200,006,835
3	BIRO HUKUM	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	3,260,692,406
4	BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI	Program Perekonomian dan Pembangunan	253,314,297
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	604,642,318
5	BIRO UMUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	18,947,642,082
6	BIRO PENGADAAN	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	975,673,826
7	INSPEKTORAT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,233,601,258
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	697,730,389
8	SEKRETARIAT DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	31,410,386,564
9	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Program Pengelolaan Pendidikan	58,388,505,439
		Program Pengembangan Kurikulum	93,999,931
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	948,012,508
		Program Pengembangan Daya Saing Olahraga	8,369,999,857
		Program Pengembangan Kebudayaan	440,266,712
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	946,863,820
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	391,783,566
		Program Pengelolaan Kemuseuman	1,342,510,877
10	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96,752,063,593
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7,761,664,768

		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	322,347,652
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	937,020,000
		Program Pengendalian Penduduk	72,996,176
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	211,088,000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22,927,493,963
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10,636,079,999
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3,811,738,045
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6,805,626,557
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1148,244,202
		Program Pengembangan Permukiman	2,667,756,864
		Program Penataan Bangunan Gedung	5,493,264,877
		Program Penataan Bangunan Lingkungan	1,969,731,064
		Program Penyelenggaraan Jalan	37,734,878,986
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	879,789,439
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,198,607,198
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	221,490,967
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	8,655,871,674
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan	2,137,711,963
		Program Kawasan Permukiman	13,750,509,892
13	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	739,579,418
		Program Pemberdayaan Sosial	1,429,541,151
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20,068,290,742
		Program Penanganan Bencana	796,101,361
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	163,384,759
		Program Rehabilitasi Sosial	3,703,048,416

		Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2,318,224,391
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	62,458,756
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	99,999,435
		Program Perlindungan Khusus Anak	395,635,089
14	DINAS PENANAMAN MODAL ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN TRANSMIGRASI	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,343,376,483
		Program Penempatan Tenaga Kerja	99,999,629
		Program Hubungan Industrial	429,999,,434
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	149,999,677
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,998,675
		Program Promosi Penanaman Modal	179,865,010
		Program Pelayanan Penanaman Modal	388,259,801
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	149,999,622
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	568,978,620
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	493,354,893
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	315,229,765
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1,088,199,493
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	164.239.717
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	178,938,656
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Program Pendaftaran Penduduk	50,000,323
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	244,998,102
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	595.524.681
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,404,342,268
16	DINAS PANGAN	Program Penanganan Kerawanan Pangan	456,639,775
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,230,066,611
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	302,982,684

17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Program Pengelolaan Aliran Sungai	1,142,648,741
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	341,930,924
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	101,299,655
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	125,159,612
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	219,999,892
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	328,088,494
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	60,849,215
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	441,612,497
18	DINAS PERHUBUNGAN	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4,086,502,000
		Program Pengelolaan Pelayaran	250,732,464
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,929,724,922
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,456,560,843
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektorat	537,188,715
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	132,264,869
20	DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	306,821,326
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	178,186,611
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	466,851,104
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	359,776,710
		Program Pengembangan UMKM	1,219,373,936
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,190,681,311
		Program Pengembangan Ekspor	284,130,413
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2,039,652,215
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2,462,161,803
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	155,345,400

21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Program Pengelolaan Arsip	263,428,079
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	72,146,234
		Program Pembinaan Perpustakaan	204,055,647
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	11,336,092
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	762,613,562
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6,173,615,007
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,784,484,399
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	526,771,546
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3,668,367,407
23	DINAS PARIWISATA	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,980,908,689
		Program Pemasaran Pariwisata	1,510,586,665
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	435,433,011
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	528,064,631
24	DINAS PERTANIAN	Program Penyuluhan Pertanian	1,679,601,769
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	851,716,765
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	985,192,865
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	220,913,747
		Program Penataan Sarana Pertanian	3,792,715,780
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11,894,677,277
25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,509,051,931
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	409,249,200

26	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,351,917,958
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4,001,128,237
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,789,019,395
27	BADAN KEUANGAN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	227,667,517,274
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,727,019,530
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,369,382,751
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Kepegawaian Daerah	2,176,666,068
29	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,513,527,825
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1,557,613,011
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,247,822,390
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	261,378,191
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,340,010,048
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	412,183,904
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penanggulangan Bencana	3,003,380,110
32	BADAN PENGHUBUNG	Program Penataan Organisasi	380,790,000
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	736,198,532

Sumber: RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo memuat sasaran strategis daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lain yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1.	Wisatawan Mancanegara (orang)	7,937
		2.	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	759,023
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	3.	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (triliyun rupiah)	14,228,39
3.	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	4.	Skor PPH Ketersediaan	66,89
		5.	Skor PPH Konsumsi	86
		6.	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	102,01
		7.	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	104,42
		8.	Indeks Resiko Bencana	0.37 - 0.65
4.	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	9.	Luas Lahan Kritis yang ditangani	1,000 ha
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	10.	Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik	278 km
		11.	Indeks E-Government	3.85
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	12.	Pertumbuhan Ekonomi	6,3-7,0
		13.	Laju Inflasi (%)	3,30
		14.	Indeks Gini	0,412-0,391
		15.	PDRB Perkapita	37,560,000
		16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11-3,91

		17.	Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	1,914
		18.	Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan	88 Desa
7.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	19.	Indek Pembangunan Manusia	69,62
		20.	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	78,00 %
		21.	Angka Melek Huruf	100
8.	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	22.	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2.40
9.	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	23.	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	3 jenis
		24.	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0.25
10.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	25.	Persentase Angka Kemiskinan	14,91-13,33
11.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	26.	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	83,02 %
		27.	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	69,41 %
		28.	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	20 %
12.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	29.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		30.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Pada Tahun 2022, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2017-2022 telah berakhir tepatnya pada tanggal 12 Mei 2022 dan selanjutnya Pemerintah Provinsi Gorontalo di pimpin oleh Penjabat Gubernur. Olehnya, Penandatanganan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan pada bulan Januari 2022 oleh Gubernur Gorontalo dan Perjanjian Kinerja Perubahan dilakukan sejak dilantiknya Penjabat Gubernur Gorontalo. Penandatanganan Perjanjian Kinerja selanjutnya dilakukan juga secara berjenjang oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 disajikan dalam Lampiran-1.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- 
- A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022 / CAPAIAN AKHIR RPJMD 2017-2022
 - B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis, juga indikator pendukung lainnya yang mendukung pencapaian IKU. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Gorontalo, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Kinerja Tahun 2022 merupakan kinerja tahun kelima RPJMD atau tahun terakhir penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2017-2022. Capaian kinerja pada tahun 2022 masih banyak dipengaruhi oleh kondisi pemulihan pasca pandemi covid-19 yang pastinya mempengaruhi pelaksanaan seluruh sektor pembangunan sehingga capaian kinerjanya tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan atau masih perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi dari para penyelenggaraan roda pembangunan di

Provinsi Gorontalo ini. Adapun capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 yang merupakan kinerja akhir pelaksanaan RPJMD periode 2017-2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo memuat sasaran strategis yang disertai dengan indikator kinerja utama serta indikator lain yang relevan atau indikator kinerja yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana telah diungkapkan di bab sebelumnya. Pada bab ini, akan di uraikan dan dijelaskan tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo yang didahului dengan pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Sebelum menguraikan lebih lanjut capaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022, akan diuraikan terlebih dahulu rumus pengukuran kinerja yaitu dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya, berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Perhitungan realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Tingkat Realisasi Positif (jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja dan jika semakin rendah realisasi, menunjukkan semakin rendah capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif (jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja dan jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi capaian kinerja).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus perhitungan atas realisasi kinerja diatas, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kriteria	Interval Realisasi (%)	Kode
1	Sangat Baik	91 (= 100	Hijau Tua
2	Tinggi	76 (= 90	Hijau Muda
3	Sedang	66 (= 75	Kuning Tua
4	Rendah	51 (= 65	Kuning Muda
5	Sangat rendah	(= 50	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Selanjutnya pada tabel 3.1.1 di bawah ini akan disajikan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2022
Pemerintah Provinsi Gorontalo

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi	6,3 %	4,04 %	64,13
			Indeks Gini	0,412	0,423	97,33
			PDRB Perkapita (Rupiah)	37,560,000	39.886.776,66	106,19
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11 %	2,58 %	137,23
			Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	1,914	1,85	96,66
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	69,62	69,81	100,27
3	Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	14,91%	15,51%	95,98
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (70,01)	B (69,61)	99,43

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan Daerah 2023, LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023

Dari uraian tabel 3.1.1 mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Gorontalo tergambar bahwa dari 4 (empat) capaian sasaran strategis tersebut, sebagian besar kinerja dalam kategori sangat baik yang digambarkan dengan warna "hijau tua". Seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan awal dari bab 3 ini bahwa,

capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 masih dipengaruhi oleh adanya pandemi global covid-19, utamanya pada tingkat pertumbuhan ekonomi dimana pasca pandemi covid-19 ini Pemerintah Provinsi Gorontalo masih perlu bekerja keras lagi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya yaitu pada bab 2, terkait penetapan target kinerja IKU tahun 2022, bahwa terdapat perubahan target terhadap beberapa indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 tersebut ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pembahasan tim penyusun Kerangka Makro Ekonomi Daerah (KEMD) Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo. Perubahan target-target kinerja tersebut adalah terhadap indikator kinerja makro yang pencapaiannya diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh stakeholders yang terkait yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Indikator kinerja yang mengalami perubahan target kinerja tersebut adalah pada indikator pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya ditetapkan sebesar 7,27 berubah menjadi 6,3. Indeks gini atau gini rasio sebelumnya ditetapkan target kinerja sebesar 0,36 berubah menjadi 0,423. Selanjutnya target pencapaian pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar 2,99 Triliun Rupiah berubah menjadi 1,914 Triliun Rupiah. PDRB perkapita sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 28.155.865,91 berubah menjadi Rp. 37.560.000, serta target tingkat pengangguran terbuka sebelumnya ditetapkan sebesar 2,86 berubah menjadi 4,11.

Selanjutnya, terhadap berbagai target capaian kinerja, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan melakukan langkah-langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan masalah dimasa mendatang. Adapun hasil analisis pada pencapaian masing-masing sasaran strategis akan disajikan berdasarkan tiap tujuan masing-masing sebagai berikut :



Tujuan 1 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang dijabarkan dalam sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan pertama ini sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan dicapai dan diukur dengan menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pendapatan Daerah, dimana kelima indikator kinerja utama ini dianggap mampu menggambarkan pencapaian atas sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan. Selanjutnya, akan dianalisis per indikator kinerja utama tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,51 %	6,41 %	- 0,02%	2,41%	6,3 %	4,04 %	64,13	6,3%	64,13
2	Indeks Gini	0,42	0,410	0,406	0,409	0,412	0,423	97,33	0,412	97,33
3	PDRB Perkapita	31.831.738,27	34.217.140,05	34.213.450,12	37.464.438	37.560.000	39.886.776,66	106,19	37.560.000	106,19
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,03 %	4,06 %	4,01%	4,28%	4,11 %	2,58 %	137,23	4,11	137,23
5	Pendapatan Daerah (RP. Triliun)	1,79	1,89	2,27	1,81	1,914	1,85	96,66	1,914	96,66

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.2 diatas dapat dilihat bahwa dari lima indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 yang juga merupakan capaian akhir RPJMD, terdapat empat indikator yang capaiannya sangat baik dimana dua diantaranya capaian kinerja akhir RPJMD berada diatas 100 persen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per kapita. Selanjutnya akan diuraikan dan dianalisis setiap indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

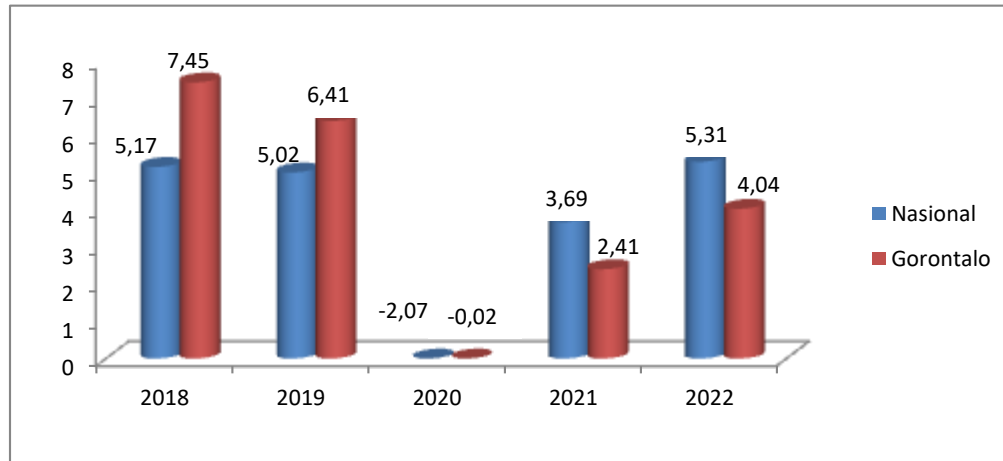
Pertumbuhan Ekonomi : Perekonomian Gorontalo tahun 2022 diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp. 47.547,43 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 30.286,45 milyar. PDRB per kapita Gorontalo tahun 2022 sebesar Rp. 39.886.776,66.

Ekonomi Gorontalo tahun 2022 tumbuh sebesar 4,04 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 2,41 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa perusahaan sebesar 9,93 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 6,95 persen.

Dari tabel 3.1.2 diatas, perbandingan realisasi kinerja dan capaian s.d akhir RPJMD tahun 2022, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 6,51 persen. Sementara itu, Capaian kinerja atas pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 juga belum sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 7,19 persen, dimana capaian kinerja makro daerah ini di tahun 2019 sebesar 6,41 persen. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar - 0,02%. Begitu pula, pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,07 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mulai kembali bergeliat pasca pandemi covid-19 yaitu di tahun 2021 mulai lagi tumbuh sebesar 2,41 persen dan ekonomi Nasional tumbuh sebesar 3,69 persen. Di tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mulai berjalan dan bertumbuh hingga mencapai 4,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar 6,3 persen dan ekonomi nasional pada tahun 2022 ini bertumbuh sebesar 5,31 persen.

Selanjutnya, pada tabel 3.1.3 berikut ini dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan Nasional sebagai berikut :

Gambar 3.1.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2018 – 2022 (persen)



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo 2023

Meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional, tetapi sudah terdapat geliat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, yang naik sebesar 1,63 poin dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan diawal bahwa perekonomian baik pusat maupun daerah tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja makro sehingga banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi capaian kinerjanya yaitu antara lain kinerja ekspor luar negeri dalam hal ini adalah potensi ekspor komoditas jagung, perbaikan iklim investasi di Provinsi Gorontalo, tingkat permintaan masyarakat, konsumsi pemerintah dan pertumbuhan lapangan usaha. Di awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah dimulai program pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan mampu berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi sampai ke daerah sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus beranjak naik.

Upaya/kebijakan yang ditempuh:

Untuk terus memulihkan pertumbuhan ekonomi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo menempuh upaya meningkatkan potensi ekspor komoditas jagung, melakukan

perbaikan terhadap iklim investasi di Provinsi Gorontalo, meningkatkan peran UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan dan subsidi BBM, Listrik juga pelaksanaan pasar murah yang secara rutin di gelar. Mendorong konsumsi pemerintah daerah melalui percepatan penetapan APBD dan membelanjakannya di dalam darah di Provinsi Gorontalo. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlokasi di Wilayah Provinsi Gorontalo sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Dalam pemulihan ekonomi Gorontalo ini, tentunya Pemerintah Provinsi Gorontalo bersinergi dengan para stakeholders lain diantaranya dengan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo.

Indeks Gini : Indikator kinerja selanjutnya yang digunakan untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo adalah Indeks Gini atau Gini Ratio. Indeks Gini atau Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna atau dengan kata lain terjadi ketimpangan yang sempurna.

Dari tabel 3.1.2 diatas, dapat dilihat bahwa indeks gini Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 0,410. Dibandingkan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin atau dengan kata lain terdapat kenaikan ketimpangan pendapatan di masyarakat Gorontalo. Dan pada tahun 2020, Gini Rasio Provinsi Gorontalo sebesar 0,406 menurun sebesar 0,004 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan tahun 2021 sebesar 0,409. Dan pada tahun 2022 ini, tinggat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Gorontalo yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,423 meningkat sebesar 0,014 poin dibandingkan tahun 2021.

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila peningkatan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang

dapat berpengaruh terhadap peningkatan tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2022 di Provinsi Gorontalo diantaranya adalah:

- a. Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk Gorontalo periode Maret-September 2022 mengalami peningkatan 8,94 persen.
- b. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan yang paling tinggi yaitu mencapai 9,48 persen poin dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 9,18 persen poin dan kelompok 40 persen terbawah hanya sebesar 6,06 persen.
- c. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 11,63 persen. Daerah perdesaan juga mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 4,40 persen, peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di perdesaan tidak sebesar di wilayah perkotaan.

Dibandingkan dengan tingkat Gini Ratio Nasional tahun 2022 dimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar 0,381, maka gini ratio di Provinsi Gorontalo tahun 2022 masih relatif tinggi.

PDRB Perkapita : Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasilnya dan mengusahakan pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor primer kearah sekunder dan tersier. Dalam usaha pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tepat sasaran dilakukan perencanaan pembangunan yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian suatu wilayah. Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan nasional atau regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam satu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

Dari tabel 3.1.1 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar Rp. 34.217.140,05,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 27.903.975,97,- atau capaian sebesar 122,63 persen. Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama yakni : Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 38,93 persen serta Kategori Konstruksi dengan kontribusi sebesar 10,67 persen. Sementara itu, PDRB per kapita tahun 2020 sebesar Rp. 34.213.450,12,- angka ini turun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019. Struktur PDRB Gorontalo menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi Rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo sebesar 61,98 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,02 persen, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,18 persen serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,76 persen. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 37,464,438, dimana aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen PK-RT (pengeluaran konsumsi rumah tangga) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo yaitu 61,80 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 28,21 persen, ekspor barang

dan jasa sebesar 26,06 persen serta komponen P-KP (pengeluaran konsumsi pemerintah) sebesar 19,77 persen.

Pada tahun 2022, PDRB per Kapita Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 39.886.776,66. Capaian ini naik dibandingkan capaian PDRB per Kapita tahun 2021 yang sebesar Rp. 37,464,438. Struktur PDRB Gorontalo tahun 2022 masih didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 37,99 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka : Tingkat pengangguran (terbuka) dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen dengan rumus jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100 persen.

Kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 berada pada tingkat 4,28 persen. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo berada pada angka 4,06 persen. Maka capaian di tahun 2020 mengalami kenaikan angka pengangguran terbuka sebesar 0,22 persen atau pengangguran bertambah sebanyak 3.028 orang. Dan pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo kembali turun menjadi 3,01 persen atau capaian sebesar 124,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,01 persen. Angka pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo di tahun 2021 ini turun sebesar 1,27 persen dibandingkan tahun 2020.

Situasi ketenagakerjaan tahun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Dimana jumlah penduduk yang menjadi pengangguran akibat pandemic covid-19 sebanyak 3.795 orang. Angka ini mencapai 21,13 persen dari total pengangguran pada Agustus 2021. Dampak pandemic covid-19 paling dirasakan oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, yaitu sekitar 83 persen dari total terdampak.

Pada tahun 2022, dimana covid-19 sudah melandai dan terus mengalami penurunan, maka angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo sudah mulai menurun yang juga bermakna bahwa intervensi terhadap pengangguran yang selama dua tahun terakhir terus meningkat, maka di tahun 2022 pengangguran di Provinsi Gorontalo

menurun dan berada pada 2,58 persen. Penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 terus menurun selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebanyak 13,22 persen penduduk usia kerja terdampak covid-19, kemudian menjadi 7,52 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 0,89 persen atau sebanyak 8.114 orang. Pada tabel 3.1.4 dibawah ini akan menggambarkan/menginformasikan tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo
Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Angkatan Kerja	578.880	585.896	593.97	596.968	630.534
	• Bekerja	555.533	562.087	568.56	579.009	614.250
	• Penganggur	23.347	23.809	25.41	17.959	16.284
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,03	4,06	4,28	3,01	2,58
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,34	66,83	66,46	65,94	68,91

Sumber: BPS Prov. Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.4 dapat diketahui perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2018 sebanyak 578.880 orang. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sebanyak 555.533 orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 23.347 orang menganggur. Disbanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 31.217 orang sedangkan pengangguran berkurang 103 orang. sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK tahun 2018 tercatat sebesar 67,34 persen, meningkat 2,56 poin disbanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan pasokan tenaga kerja.

Untuk kondisi ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo tahun 2019, jumlah angkatan kerja sebanyak 585.896 orang naik 7.016 orang dibandingkan tahun 2018. Sebanyak

562.087 orang penduduk bekerja, naik sebesar 6.554 orang dibandingkan tahun 2018 dan sebanyak 23.809 orang menganggur bertambah 462 orang dibandingkan tahun 2018. Dari kondisi tersebut, terdapat pengangguran terbuka sebesar 4,06 persen, naik sebesar 0,03 poin dibandingkan kondisi tahun 2018 dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,83 persen menurun sebesar 0,51 poin dibandingkan kondisi tahun 2018. Pada tahun 2020, dimana pandemic covid-19 mulai melanda, pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo mencapai 4,28 persen. Dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dimana tingkat pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2020 sebesar 7,07 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 138,22 juta orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang dan 9,77 juta orang penganggur.

Tahun 2021, kondisi ketenagakerjaan mulai bergeliat ditengah masih merebaknya pandemi covid-19. Angkatan kerja di tahun 2021 tepatnya di Agustus sebesar 596.968 orang dengan rincian 579.009 orang penduduk bekerja dan 17.959 orang pengangguran, dimana 21,13 persen diantaranya merupakan pengangguran karena dampak covid-19. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 menurun sebesar 1,27 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Dan pada tahun 2022 ini tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo kembali menurun menjadi 2,58 persen, angka ini turun sebesar 0,43 dibandingkan dengan kondisi pengangguran tahun 2021.

Intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo khusus disektor ketenagakerjaan, seperti pelatihan melalui Balai latihan Kerja (BLK), Pemagangan Berbasis pengguna tidak mampu menekan angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo, membuat kebijakan tentang kemudahan dalam memperoleh informasi ketanaga kerjaan, membangun aplikasi yang memudahkan para pencari kerja.

Pendapatan Daerah : Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dari tabel 3.1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 1,89 Triliun Rupaiah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,02 Triliun Rupiah. Capaian yang diperoleh di tahun 2019 ini, belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja atas pendapatan daerah di tahun sebelumnya, sebesar 1,80 Triliun Rupiah, maka capaian kinerja di tahun 2019 ini meningkat sebesar 0,09 Triliun Rupiah atau 1,05 persen.

Pada tahun 2020, pendapatan daerah mencapai 1,81 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,27 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020 terdapat refocusing terhadap target pendapatan daerah menjadi Rp. 1.71 Trilyun Rupiah, dan pada saat Perubahan APBD target pendapatan daerah menjadi Rp. 1.76 Trilyun Rupiah. Dan pada tahun 2021, target atas pendapatan daerah juga mengalami perubahan menjadi 2,27 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Gorontalo menempatkan pendapatan daerah menjadi Indikator Kinerja Utama karena pendapatan daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga merupakan kinerja keuangan daerah.

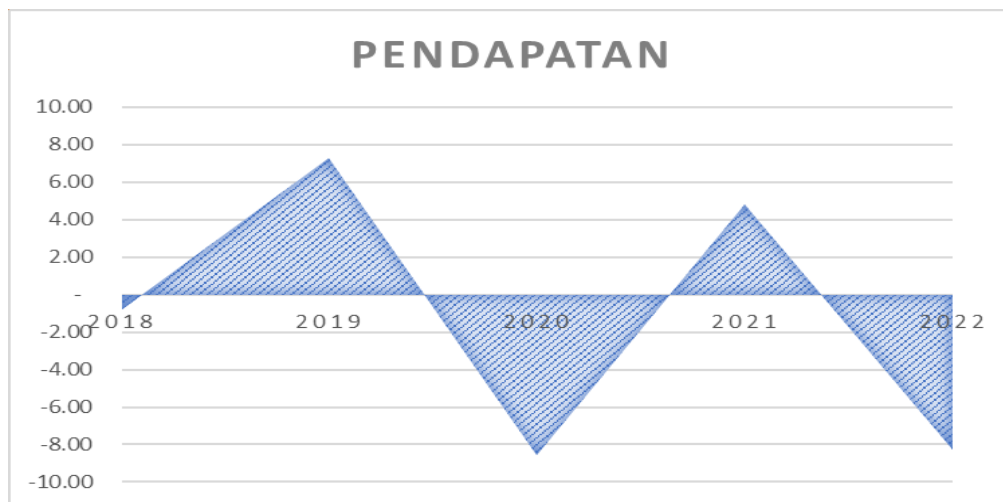
Dalam Pendapatan Daerah terdapat tiga unsur pendukung yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Ketiga unsur dimaksud sangat mempengaruhi tercapai tidaknya target pendapatan Daerah. Pada tahun 2021, dari ketiga unsur tersebut hanya terdapat dua unsur pendapatan Daerah yang mencapai target pendapatan sehingga realisasi capaian terhadap pendapatan Daerah yang telah ditargetkan belum tercapai 100 persen. Unsur PAD mencapai target sebesar 86,78 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai realisasi sebesar 93,57 persen dan untuk pendapatan transfer mencapai target sebesar 98,70 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 157,64 persen. Penyumbang realisasi terbesar di komponen PAD yakni pendapatan pajak daerah yakni sebesar 116,29 persen.

Target kinerja pendapatan daerah yang tertuang dalam RPJMD mengalami koreksi menjadi 1,85 triliun rupiah sebagai dampak turunnya Pendapatan Transfer dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. Tahun anggaran 2021 Pendapatan Transfer dari DAK Non Fisik-BOS Reguler untuk SD dan SMP ditransfer langsung ke kabupaten kota, sehingga DAK Non Fisik-BOS Reguler turun menjadi Rp86.895.590.000 tahun 2022

dari Rp250.743.230.000 di tahun 2021 atau turun sebesar Rp163.847.640.000 atau 65.34%. Pendapatan BLUD ditahun 2021 sebesar Rp82.031.930.832 dan di tahun 2022 Rp30.000.000.000 atau menurun sebesar 62.67%. Disisi lain target untuk Pendapatan Daerah meningkat menjadi Rp442.75 milyar di tahun 2022 dari Rp400.78 pada tahun 2021.

Sementara itu, pertumbuhan target dan realisasi pendapatan daerah selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.1.5
Prosentase Pertumbuhan Target Pendapatan Daerah
Tahun 2018-2022

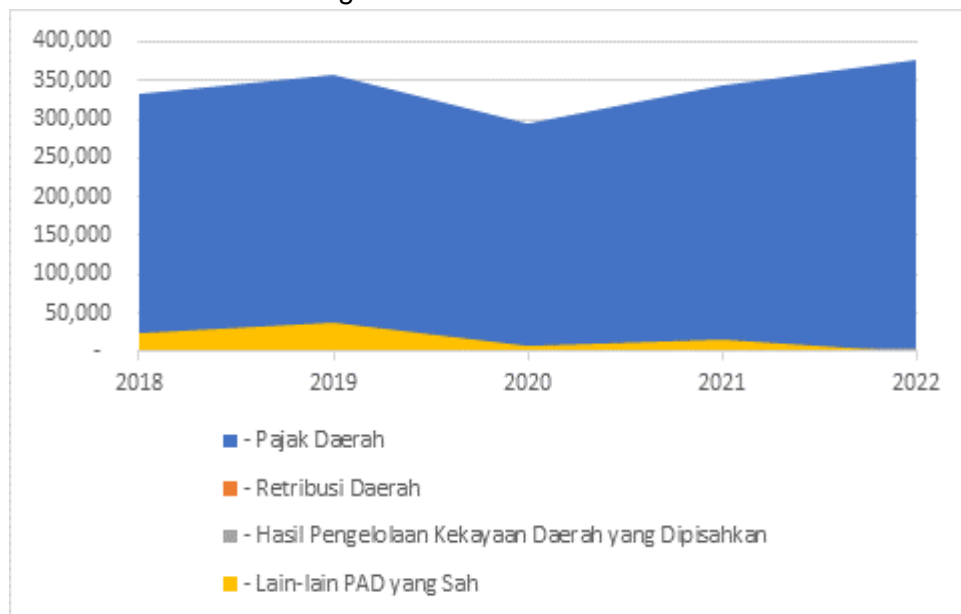


Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Rendahnya pertumbuhan pendapatan dipengaruhi oleh capaian rata – rata pertumbuhan target pendapatan pajak daerah yang tumbuh 3.57% dibanding periode RPJMD sebelumnya dengan pertumbuhan target pajak daerah sebesar 13.92%. Capaian rata – rata pertumbuhan realisasi pajak daerah Rp 372,4 milyar atau dengan rata – rata pertumbuhan realisasi pajak daerah 7.03%. Tingkat pertumbuhan realisasi pendapatan pajak daerah terendah pada Tahun 2020 sebesar -9.09% dibanding tingkat pertumbuhan realisasi Tahun 2019 sebesar 10.55% namun mengalami peningkatan pertumbuhan realisasi pajak daerah tahun 2021 (angka sementara) sebesar 13.49% atau naik sebesar 22.6%. Realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 turun sebagai dampak pandemi covid-19.

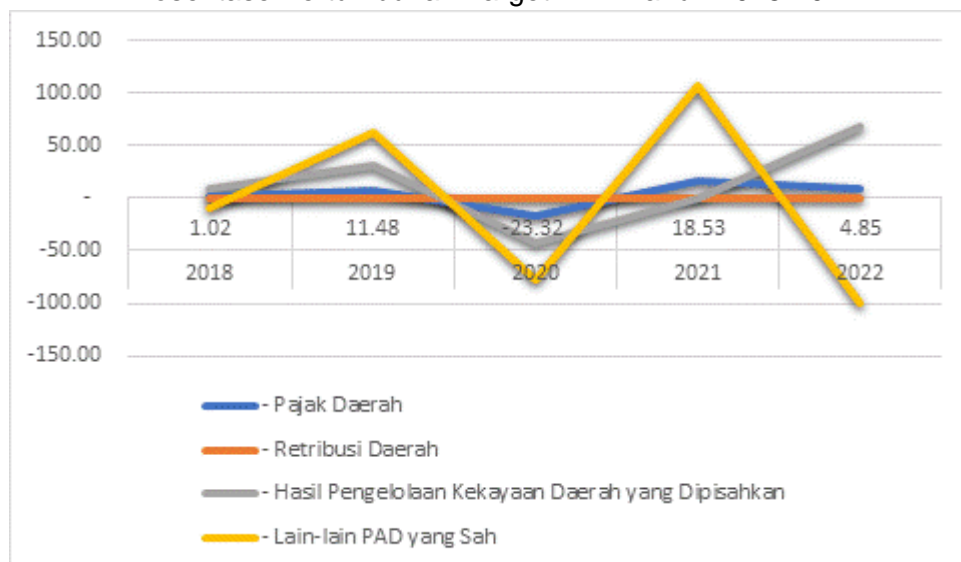
Untuk lebih jelas melihat pertumbuhan baik target, realisasi maupun prosentase dapat dilihat grafik dibawah ini:

Grafik 3.1.6
Target PAD Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Grafik 3.1.7
Prosentase Pertumbuhan Target PAD Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Keuangan Daerah tahun 2022

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong peningkatan pendapatan Daerah antara lain adalah:

- Melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah. Dengan program ini, diharapkan pendapatan daerah tidak hanya bertumpu pada pajak daerah, melainkan dari sumber-sumber pendapatan lain.
- Kebijakan yang ditempuh lainnya adalah kebijakan dalam bentuk peraturan Gubernur tentang penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kepemilikan ke dua.
- Membuat kebijakan untuk penggunaan e-samsat yang terbukti dapat memberikan sumbangan peningkatan pendapatan dan menjadi sumber pendapatan yang relative tinggi.
- Untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor telah dilakukan optimaslisasi melalui pendekatan door to door. Pendekatan door to door merupakan pendekatan persuasif sekaligus sebagai bentuk mengunggah kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan.
- Untuk pendekatan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah membuka Samsat Pembantu Boliyohuto yang melayani Kecamatan Asparaga, Kecamatan Bilato, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Mootilango dan Kecamatan Tolangohula.
- Super PKB merupakan aplikasi pemberitahuan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Hal ini sebagai bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor agar tidak melewati waktu.

Selanjutnya akan digambarkan perbandingan realisasi kinerja IKU untuk sasaran kinerja "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan" Provinsi Gorontalo dengan capaian Nasional, sebagaimana pada tabel 3.1.8 berikut ini :

Tabel 3.1.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	1	Pertumbuhan Ekonomi	4,04%	5,31%	-
		2	Indeks Gini	0,423	0,381	-
		3	PDRB Perkapita	39,89	71,0	-
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,58%	5,31%	+

Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan ini dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis Pemerintah

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA AKSES DAN
KUALITAS PENDIDIKAN**

Provinsi Gorontalo. Sasaran strategis ini akan dijabarkan atau dicapai dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,01	68,49	68,68	69,00	69,62	69,81	100,27	69,62	100,27

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.9 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 69,81 atau capaian sebesar 100,27 dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 69,62. Capaian tahun 2022 ini juga merupakan capaian akhir tahun RPJMD. Dari tabel diatas juga dapat dilihat kemajuan IPM Provinsi Gorontalo yaitu pada tahun 2018 sebesar 67,01. Pada tahun 2019 realisasi kinerja pada indikator ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target kinerja makro yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama, mencapai realisasi sebesar 68,49 dari target kinerja sebesar 67,93 atau realisasi sebesar 100,82 persen. Capaian tahun 2020 sebesar 68,68 dari target kinerja sebesar

68,71 atau sebesar 99,96 persen. Dan pada tahun 2021 sebesar 69,00 atau capaian sebesar 100,80 dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 68,45.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo. Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indeks pembangunan manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2022 meningkat 0,81 poin atau 1,17 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 2011-2022, IPM Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen per tahun.

- Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,51 tahun, lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
- Pada dimensi pengetahuan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,12 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 13,11 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,12 tahun, dari 7,90 tahun menjadi 8,02 tahun pada tahun 2022.
- Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita mencapai 10,687 ribu rupiah per kapita per tahun atau meningkat 5,22 persen disbanding tahun sebelumnya.

Capaian pembangunan manusia Provinsi Gorontalo yang sebesar 69,81 masuk dalam kategori IPM “sedang”. Sementara itu, pertumbuhan IPM Gorontalo dari tahun ke tahun berfluktuasi yaitu pada tahun 2019 tumbuh sebesar 1,15 persen dan pada tahun 2020 IPM

Gorontalo tumbuh sebesar 0,28 persen, sementara pada tahun 2021 IPM Gorontalo tumbuh sebesar 0,47 persen. Pertumbuhan IPM Gorontalo di tahun 2020 merupakan pertumbuhan paling rendah dalam satu dekade terakhir. Selama 2011-2020, IPM Gorontalo mencatat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,88 persen. Dan pada tahun 2022 ini pertumbuhan IPM Provinsi Gorontalo sebesar 1,17 persen.

Dibawah ini akan digambarkan IPM Provinsi Gorontalo beserta komponennya selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.1.10
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo
beserta komponennya

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,45	67,45	68,07	68,19	68,51
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,03	13,06	13,08	13,11	13,12
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,46	8,11	7,82	7,90	8,02
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	9.839	10,075	10,020	10,157	10,157
IPM		66,29	68,49	68,68	69,00	69,81
Pertumbuhan IPM	%	1,04	1,15	0,28	0,47	1,17

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode, sedangkan status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode yang di namai dengan level Rendah ($IPM < 60$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$) dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Provinsi Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,78 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH Gorontalo adalah

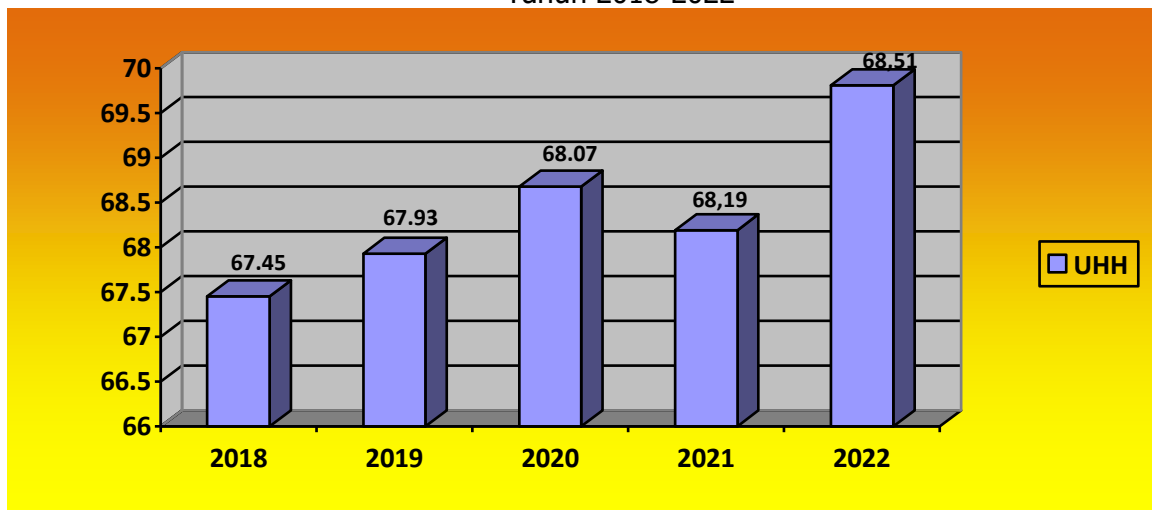
66,41 tahun, pada tahun 2021 mencapai 68,19 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 68,51 tahun.

Usia Harapan Hidup, selain sebagai salah satu komponen dalam penetapan indeks pembangunan manusia, usia harapan hidup juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program bidang kesehatan yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk terus mengawal dan terus mendukung pencapaian kinerja peningkatan UHH ini, dilakukan upaya-upaya melalui pelaksanaan program-program kesehatan dan peningkatan gizi masyarakat yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Program penguatan intervensi stunting;
- Program kesehatan masyarakat;
- Program pelayanan kesehatan dan JKN;
- Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan UHH Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Gambar 3.1.11
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dimensi Pengetahuan

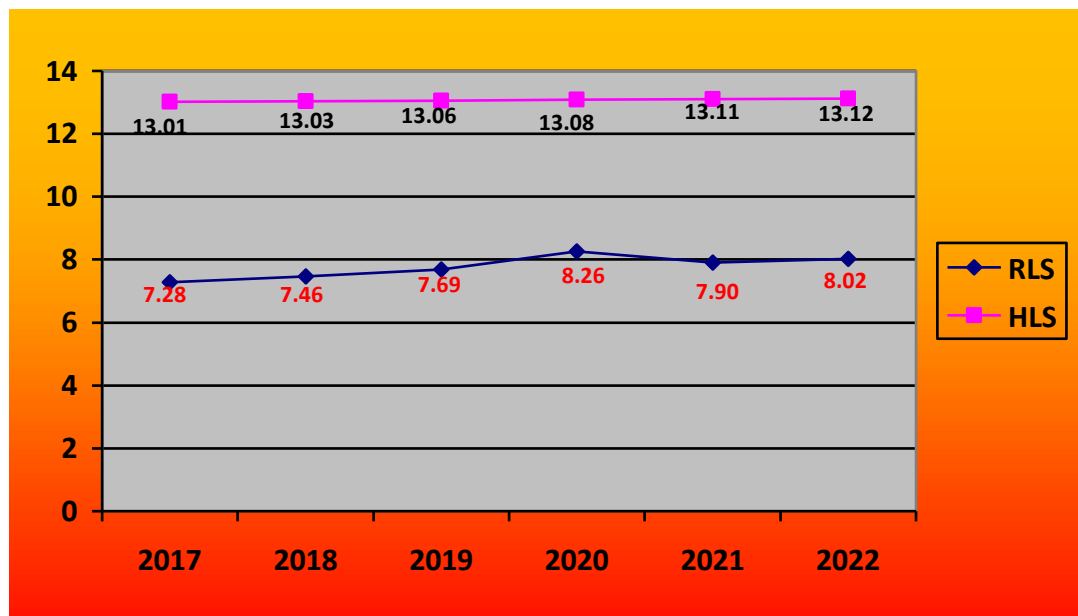
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Program pendidikan untuk rakyat merupakan salah satu program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi sekolah sehingga dapat meningkatkan harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo. Begitu pula program pemerintah lainnya yaitu Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Beberapa kegiatan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian kinerja ini antara lain adalah :

- Menuntaskan Gorontalo bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal;
- Melakukan pembinaan terhadap guru dan tenaga kependidikan;
- Memberikan pendidikan gratis, meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

Selama periode 2010 hingga 2021, harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo telah meningkat sebesar 1,52 persen per tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 1,31 persen per tahun. Dibandingkan dengan periode 2010 hingga 2019, harapan lama sekolah Gorontalo secara rata-rata tumbuh sebesar 1,81 persen per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo telah mencapai 13,06 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1. Dan pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 0,15 persen dengan harapan lama sekolah mencapai 13,08. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di tahun 2020 di Provinsi Gorontalo tumbuh sebesar 1,69 persen dengan angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,26. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Provinsi Gorontalo yang lebih baik. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah 13,11 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,90 tahun. Dan pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah sebesar 8,02 tahun dengan harapan lama sekolah 13,12 tahun.

Dibawah ini akan digambarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Gambar 3.1.12
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Dinas DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dimensi Standar Hidup Layak

Purchasing Power Parity / Paritas Daya Beli merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

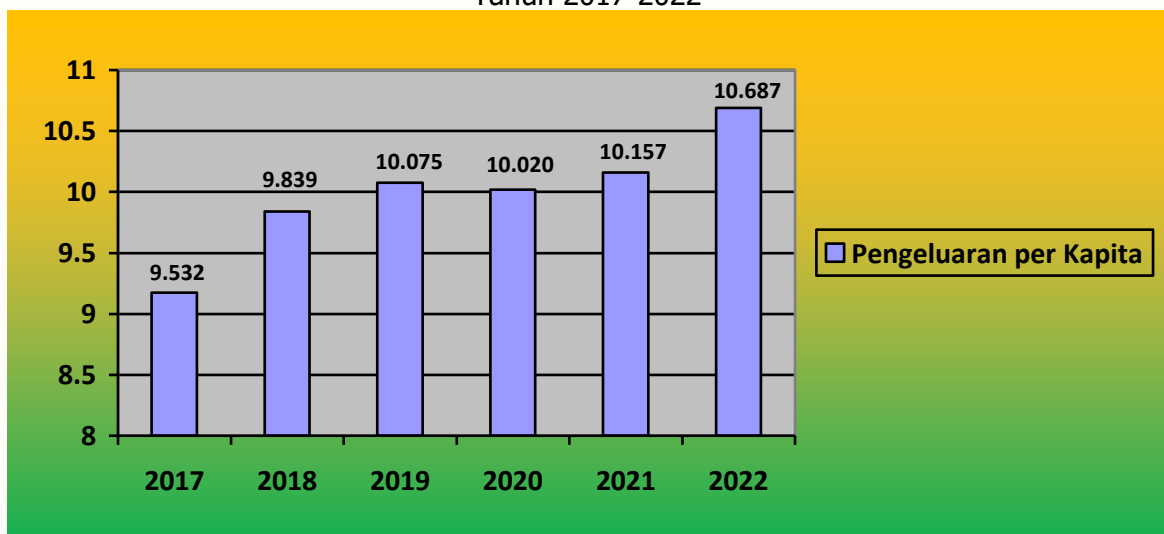
Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp. 10,69 juta. Angka ini meningkat 5,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi covid-19 melanda, pengeluaran riil per kapita masyarakat Gorontalo mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami

penurunan. Pengeluaran per kapita masyarakat Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 saat adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita masyarakat Gorontalo mencapai Rp. 10,16 juta per tahun. Angka ini meningkat 1,37 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selama Sembilan tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat sebesar 2,31 persen per tahun. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan di Provinsi Gorontalo sebesar 10,020 ribu rupiah. Pengeluaran per kapita tahun 2020 turun sebesar Rp. 55.000 atau -0,55 persen. Penurunan nilai pengeluaran per kapita masyarakat tersebut diakibatkan adanya pandemi Covid-19. Hal itu menjadi salah satu pemicu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang hanya sebesar 68,68 atau hanya tumbuh 0,28 persen, dimana pertumbuhan tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah dalam satu dekade terakhir. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga berdampak pada pengeluaran per kapita pun turun.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan pengeluaran per kapita per Tahun di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Gambar 3.1.13
Pengeluaran per Kapita per Tahun di Provinsi Gorontalo
Tahun 2017-2022



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Selanjutnya, pada tabel 3.1.14 di bawah ini akan digambarkan perbandingan antara IPM Provinsi Gorontalo dan capaian IPM Nasional sebagai berikut :

Tabel 3.1.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	69,81	72,91	-

Sumber Data : BPS Nasional dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Tujuan 3 : Penurunan Angka Kemiskinan

Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya adalah Peningkatan Penurunan Angka Kemiskinan. Tujuan ini dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis Pemerintah

**SASARAN STRATEGIS :
MENURUNNYA TINGKAT
KEMISKINAN**

Provinsi Gorontalo. Sasaran strategis ini akan dijabarkan atau dicapai dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Angka Kemiskinan. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
1	Persentase Angka Kemiskinan	15,83%	15,31%	15,59%	15,41%	14,91%	15,51%	95,98	14,91%	95,98

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.15 diatas dapat dilihat bahwa, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo tahun 2022 yang juga merupakan kondisi akhir perencanaan jangka menengah daerah periode 2017-2022 berada pada 15,51 persen atau capaian sebesar 95,98 persen. Dibandingkan dengan keadaan Kemiskinan di tahun 2021 yang sebesar 15,41 persen, kondisi di tahun 2022 meningkat sebesar 0,10 poin. Bila dilihat dari keadaan angka Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada periode lima tahun terakhir sebagaimana tabel diatas, Pemerintah Provinsi Gorontalo masih perlu kerja keras lagi dan lebih meningkatkan komitmen bersama dalam mengatasi masalah kemiskinan ini. Memprioritaskan program dan kegiatan yang benar-benar memiliki dampak kepada masyarakat.

Perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator kinerja dalam rangka mengidentifikasi atau mengetahui sejauh mana program-program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat mampu mengentaskan/menanggulangi kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 187,35 ribu orang naik sebesar 2,75 ribu orang di bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021.

Selanjutnya akan digambarkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam tabel 3.1.16 sebagai berikut:

Tabel 3.1.16
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Rincian	Indikator	
	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	4,49	24,40
Perdesaan	24,52	162,95
Jumlah	15,51	187,35

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

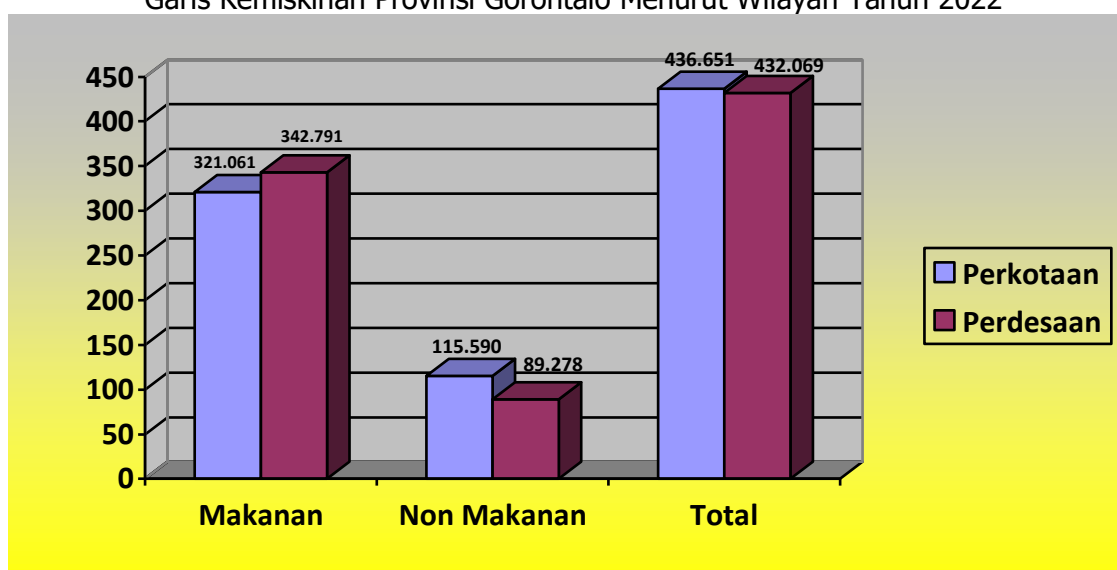
Dari tabel 3.1.16 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 terbanyak berada di perdesaan yaitu sebanyak 162,95 ribu jiwa atau sebesar 24,52 persen. Sedangkan di daerah perkotaan, penduduk miskin hanya sebesar 4,49 persen atau sebanyak 24,40 ribu jiwa. Dari gambaran diatas juga dapat dilihat besaran persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2022 sebesar 15,51 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 187,35 ribu jiwa. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 0,9 ribu orang atau menurun sebesar 0,10 persen poin.

Dalam menentukan kategori kemiskinan atau miskin, tak lepas dari unsur garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan sangat menentukan besar kecil jumlah penduduk

miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinsn Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Dibawah ini akan digambarkan garis kemiskinan di wilayah provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar 3.1.17
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo Menurut Wilayah Tahun 2022



Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.17 diatas dapat dilihat bahwa garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2022 bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah sebesar Rp. 436.651,- per kapita per bulan. Dan garis Kemiskinan di daerah perdesaan tercatat sebesar Rp. 432.069,- per kapita per bulan. Dapat diketahui pula GKM untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp. 115.590,- dan perdesaan sebesar Rp. 89.278,- maka terlihat bahwa GKBM di daerah perkotaan relative lebih tinggi. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis Kemiskinan baik didaerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hamper sama. Beras masih member sumbangan terbesar yakni sebesar 25,67 persen di perkotaan dan 27,55 persen di perdesaan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode Maret-September tahun 2022 antara lain:

- a. Terjadi kenaikan harga BBM;
- b. Angka inflasi umum Kota Gorontalo tercatat sebesar 3,82 persen yaitu masing-masing terhadap kelompok makanan dan minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen, kelompok transportasi sebesar 12,34 persen dan kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 4,52 persen;
- c. Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan dari semula sebesar 103,32, menjadi 104,44;
- d. Nilai tukar petani tanaman pangan mengalami penurunan dari 100,70 menjadi 97,98;
- e. Biaya transportasi umum *online* dan angkutan umum mengalami kenaikan.

Terhadap faktor-faktor pemicu naiknya angka Kemiskinan dan mengkadapi permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini, pemerintah telah dilakukan berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Program yang dianggap paling tepat yang mampu menurunkan kemiskinan adalah bantuan pangan, semisal Rastha dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik nasional maupun daerah. Program ini dianggap paling tepat mengingat lebih dari 75 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk pangan. Demikian halnya dengan bantuan non-pangan seperti bantuan Rumah layak huni, subsidi Listrik bagi masyarakat miskin, Pendidikan serta Kesehatan, yang berkontribusi 12-16 persen terhadap garis kemiskinan. Serta upaya-upaya lainnya masih terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo agar program/kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak lebih optimal. Yang tak kalah penting adalah kampanye “Tidak/Berhenti Merokok” terus didorong dan digalakkan, sehingga pengeluaran rokok bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat/produktif.

Selain itu, menurunkan kemiskinan ditempuh dengan berbagai kebijakan dan upaya-upaya yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan pada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai langkah awal adalah pendataan terhadap penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM, pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pemberian layanan kesehatan gratis, upaya meningkatkan perlindungan sosial serta

pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan akan dicapai dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan, pemberian bantuan peralatan penangkap ikan dan pembudidaya ikan serta Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok nelayan baik pembudidaya maupun nelayan tangkap, juga bantuan ternak terhadap kelompok-kelompok peternak.

Selain itu, upaya-upaya lain adalah menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok karena program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin / keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Selain itu, program – program seperti Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), RASKIN (Beras Miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan Asuransi miskin juga dilaksanakan dan ditingkatkan. Selain program-program nasional penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo pun telah melaksanakan program-program unggulan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Program penanganan daerah rawan pangan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dalam pencapaian kinerja kios akses pangan sampai dengan tahun 2022 sejumlah 44 lembaga keuangan desa (93 kios akses pangan).
2. Program penanganan daerah rawan pangan dengan memberikan bantuan pangan berupa paket-paket bahan pokok di daerah rawan pangan.
3. Program Kawasan Permukiman, yaitu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Pemberian Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR);
4. Program perlindungan dan jaminan sosial (bantuan sosial kesejahteraan keluarga);
5. Program pemberdayaan sosial (bimbingan dan motivasi sosial serta peningkatan kapasitas penerima bantuan sosial);

6. Program rehabilitasi sosial (penyaluran bantuan kepada kelompok marginal dan rentan seperti penyandang disabilitas, tuna sosial dan lanjut usia);
7. Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Program Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan;
9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). Bantuan Bahan Produksi bagi UMK setelah memperoleh Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) berupa bahan produksi.
11. Program Pengembangan UMKM.
 - a. Pembinaan UKM Naik Kelas kepada 50 UKM dari kabupaten kota se Provinsi Gorontalo.
 - b. Kegiatan Bisnis Kelas bagi UKM oleh 75 UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
 - c. Promosi Produk UKM oleh 50 UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
 - d. Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas berupa Bahan produksi.
 - e. Bantuan produk kerajinan dan olahan pangan untuk galley UMKM.
12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yaitu Penumbuhan IKM melalui pembinaan.
13. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya;

14. Program pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan. Beberapa yang dilakukan intervensi yang disalurkan kepada pelaku usaha perikanan berupa bantuan sarana perikanan tangkap pada tahun 2021 sebanyak 43 unit perahu 3 GT bermesin tempel 15 PK (setiap unit perahu untuk 2 orang penerima). Sehingga total pelaku usaha perikanan yang menerima intervensi bantuan perahu 3 GT bermesin tempel 15 PK sebanyak 86 orang yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
15. Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin, yaitu memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
16. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian terhadap minat/bakat para tenaga kerja;
17. Program pengelolaan aspek kegeologian yaitu bantuan sumur bor untuk masyarakat sulit air bersih;
18. Program pengelolaan ketenagalistrikan yaitu bantuan listrik gratis terhadap masyarakat miskin.
19. Program pengawasan sarana pertanian yaitu bantuan benih padi dan jagung, bantuan ternak sapi, ayam, kambing untuk kelompok masyarakat kurang ampu.
20. Program penataan prasarana pertanian yaitu bantuan penyediaan alat-alat mesin pertanian gratis untuk masyarakat petani yang tidak mampu.
21. Asuransi Usaha Tani Padi yang bertujuan untuk mengalihkan resiko akibat kegagalan panen yang dialami petani dan penggarap melalui skema pertanggungan asuransi. Program/kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya untuk daerah yang masih memerlukan kerja keras dalam penanggulangan kemiskinan seperti di Provinsi Gorontalo. Sejak diterapkannya kebijakan ini, para petani pemilik lahan maupun penggarap tidak akan mengalami kerugian yang berkelanjutan ketika terjadi resiko akibat gagal panen yang selanjutnya berdampak pada ketidakmampuan masyarakat petani memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ketentuan dalam program ini adalah:

1. Petani tergabung dalam Kelompok Tani.
2. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan sawah paling luas 2 Ha.
3. Petani penggarap (tidak memiliki lahan usahatani) dan menggarap lahan sawah paling luas 2 Ha.
4. Diutamakan petani yang mendapat bantuan Pemerintah dan yang ikut dan terdaftar dalam program asuransi.
5. Dengan jangka waktu pertanggungungan adalah Satu Musim Tanam d dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Sementara resiko yang dijamin adalah akibat bencana banjir, kekeringan dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Meskipun telah banyak program-program penanganan kemiskinan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas, tetapi Pemerintah Provinsi Gorontalo masih perlu berupaya lebih maksimal lagi, meningkatkan daya ungkit utamanya terhadap program dan kegiatan serta kebijakan-kebijakan lainnya yang berdampak, yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional yang pada tahun 2022 sebesar 9,57 persen, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih relatif cukup tinggi. Dibawah ini akan digambarkan persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo dengan penduduk miskin Indonesia sebagai berikut :

Tabel 3.1.18
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	15,51 %	9,57 %	-

Sumber Data : BPS Nasional dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo selanjutnya yang mendukung pencapaian visi misi pemerintah daerah adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN BERSIH**

Tujuan ini dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sasaran strategis ini akan dijabarkan atau dicapai dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.19
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	BB (70,01)	B (69,61)	99,43	BB	99,43

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2023

Pada tabel 3.1.19 diatas dapat dilihat bahwa, capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 hasil evaluasinya sebesar 63,36 dengan kategori "B". Capaian tahun 2021 Indeks reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo adalah 66,33 dengan kategori "B". Indeks yang diperoleh tahun 2021 terhadap perolehan tahun 2020 tersebut naik sebesar 2,97 poin. Meskipun kategori yang diperoleh masih dibawah target RPJMD, tetapi indeks RB Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2022 ini, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali naik sebesar 3,28 poin dari perolehan indeks tahun sebelumnya, atau capaian sebesar 99,43 persen.

Dibawah ini akan diuraikan perolehan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi atas komponen pengungkit dan komponen hasil Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.20
Nilai Komponen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
A.	Komponen Pengungkit		
	1. Pemenuhan	20,00	13,94
	2. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,73
	3. Reform	30,00	15,79
Total Komponen Pengungkit		60,00	34,95
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,73
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,49
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,63
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,30
Total Komponen Hasil		40,00	34,15
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	69,61

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022

Dari gambaran pada tabel 3.1.20 diatas dapat dilihat bahwa hasil yang di peroleh dari komponen pengungkit atas reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo di tahun 2022 mencapai 34,95 dari bobot sebesar 60,00. Dan untuk komponen hasil dengan nilai 34,15 dari bobot 40,00 sehingga indeks RB sebesar 69,61 dari bobot sebesar 100,00. Itu berarti bahwa masih perlu banyak perbaikan yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun selanjutnya. Selain komponen hasil dan komponen pengungkit yang menjadi obyek evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi, survei internal dan eksternal juga merupakan komponen penting yang sangat menentukan dalam penilaian pelaksanaan

reformasi birokrasi yang kemudian berpengaruh pada tinggi rendahnya pencapaian indeks reformasi birokrasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat menyadari dan memandang betapa pentingnya implementasi reformasi birokrasi ini. Dengan implementasi reformasi birokrasi yang baik dan terarah, diharapkan dapat meningkatkan zona-zona integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, meletakkan reformasi birokrasi sebagai tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berpijak dari tujuan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Arah pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo dipandu dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi yang termuat dalam *road map* reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo 2018-2022. Sampai dengan akhir tahun 2021 hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan beberapa agenda kerja reformasi birokrasi yang terutama fokus pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dijadikan landasan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo yang lebih baik dan berkualitas. Tindak lanjut tersebut akan di gambarkan dalam perkembangan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan langkah-langkah strategis guna percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sosialisasi dan membudayakan pelaksanaan reformasi birokrasi di semua lini birokrasi baik tingkat daerah provinsi, Kab/Kota, perangkat daerah bahkan secara luas menginformasikan kepada masyarakat melalui dialog-dialog dan diskusi di media sosial maupun di media-media elektronik.

Perkembangan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menunjukkan beberapa kemajuan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berbenah dan tak henti-hentinya melakukan perbaikan terhadap pencapaian 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang antara lain adalah :

a. Manajemen Perubahan :

- Telah dibentuk Tim Reformasi Daerah dan di seluruh OPD yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan menggerakkan reformasi birokrasi baik di daerah maupun

di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga menjadikan isu reformasi birokrasi melembaga di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- Telah menyusun Road Map reformasi birokrasi periode terakhir sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo.
- Penetapan dan membangun agen perubahan pada setiap perangkat daerah yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik, sebagai penggerak perubahan, yang mendorong dan menggerakkan Pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan, sebagai pemberi solusi, yang memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan perangkat daerah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan serta sebagai mediator, yang membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar perangkat daerah dalam proses perubahan, sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungannya dengan para pengambil keputusan dan yang terakhir adalah sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
- Membangun budaya kerja untuk menegakkan integritas seluruh pegawai. Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang pertama melakukan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penguatan budaya kerja dan *employer branding* sebagai bagian dari strategi akselerasi transformasi SDM aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi.
- Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang mengisi pameran penerapan budaya kerja BerAKHLAK dalam “ASN Culture Fest 2021”. Setelah enam bulan berjalan, progres penerapan

nilai-nilai dasar (*core values*) BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN Bangsa Melayani Bangsa di instansi pemerintah diperlihatkan dalam ASN Culture Fest 2021. ASN Culture Fest yang digelar penghujung tahun 2021 dan juga dilaksanakan tahun 2022 adalah ajang untuk membagi pengalaman dari beberapa instansi pemerintah di dalam konteks bagaimana mereka melakukan internalisasi *core values* BerAKHLAK dan *employer branding* ASN Bangsa Melayani Bangsa.

- Interinternalisasi budaya kerja ditahun 2022 dilaksanakan kembali dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Apresiasi dan penghargaan terhadap Agen Perubahan dan Pemimpin Perubahan melalui kegiatan “BerAKHLAK Award” Tingkat provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bapak Menteri PAN RB serta dihadiri pula oleh Bapak Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan bersama Tim.

Gambar 3.1.21
Internalisasi dan Apresiasi pelaksanaan Budaya Kerja
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022



b. Penguatan sistem pengawasan :

- Membangun zona integritas.
- Dilakukan pengendalian gratifikasi.
- Pelaksanaan sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah.
- Pengawasan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.
- Penanganan pengaduan Masyarakat.
- Penanganan *whistle blowing system* di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower system*) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Penanganan benturan kepentingan ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor : 72 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan.

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang terkait dengan penguatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan tindak lanjut rekomendasi tersebut yaitu:

- Telah dilakukan sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah, berupa penyusunan pohon kinerja dan mereviu kembali cascading kinerja di pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Perbaikan rumusan tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja OPD sesuai penjenjangan kinerja yang diatur dalam PermenPANRB No. 89 Tahun 2021.
- Menyusun logical framework berdasarkan kondisi dan isu yang dihadapi. Penyusunan pohon kinerja yang telah mengurai isu strategis ke dalam isu-isu antara (outcome antara), dilengkapi indikator kinerja, dan hubungan logika sebab akibat (causality).
- Melaksanakan Workshop Perencanaan, Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah, desk penajaman Renstra Perangkat

Daerah serta melakukan Renstra OPD yang terkait kualitas perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja.

- Penilaian kinerja individu telah dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerapkan penilaian kinerja individu melalui penggunaan aplikasi siransija (sistem pengukuran prestasi kerja) sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur gorontalo nomor 08 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 50 tahun 2016 tentang sistem pengukuran prestasi kerja aparatur sipil negara berbasis revolusi mental di lingkungan pemerintah provinsi gorontalo.
- Telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dimana pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur Gorontalo.

Gambar 3.1.22
Depth-Interviu Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2022



- Mengembangkan sistim informasi Si-Dalev (Sistim Informasi Pengendalian dan Evaluasi) <https://bappeda.gorontalooprov.go.id/sid/>. Mengupayakan integrasi Si-Dalev dengan Aplikasi SIPD, e-monev (sistim informasi evaluasi realisasi fisik dan anggaran), dan Siransija (sistim informasi pengukuran kinerja individu pegawai).

Gambar 3.1.23
Penguatan kapasitas SDM Perencana dan Penyusunan Pohon Kinerja
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo



- Dalam penguatan akuntabilitas juga, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pendalaman teknis terkait muatan-muatan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja juga dalam rangka menyikapi isu-isu strategis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pada penguatan akuntabilitas kinerja bersama narasumber tim Kementerian PANRB.

Gambar 3.1.24
Pendalaman Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2022



d. Penguatan kelembagaan :

- Pada tahun 2021 hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi memperoleh penghargaan atas penataan kelembagaan berupa Kematangan Organisasi yang memperoleh predikat "Sangat Tinggi".
- Telah dilakukan penataan kembali tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan urusan pemerintah daerah, sehingga dapat dipetakan susunan organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal pokok yang dipertimbangkan adalah menghindari kemungkinan adanya tumpang tindih tugas antara perangkat daerah, memiliki rentang kendali yang proporsional bersifat jejaring (*Networking*), serta memperhatikan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas perumpun antar perangkat daerah. Selain itu, menata kembali terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan lebih dari tiga urusan pemerintahan. Penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut ditandai dengan:
 - Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
- Pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah melaksanakan tahap akhir penyederhanaan birokrasi yaitu tahap mekanisme kerja dengan menyusun sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

e. Penguatan Tatalaksana :

- Menyesuaikan kembali Peta Proses Bisnis pasca penyederhanaan birokrasi.
- Telah dilakukan pengembangan penataan standar operasional prosedur.
- Pelaksanaan keterbukaan informasi public.
- Penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik.
- Melakukan penguatan sistem kearsipan kepada seluruh OPD.
- Mulai menata kembali pola tata laksana yang ada (*business process redesign*).

f. Penguatan sistem manajemen SDM aparatur sipil Negara.

- Telah ditetapkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan.
- Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sudah menerapkan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, melakukan *assessment* pegawai dan uji kompetensi pegawai serta telah dibangun sistem informasi kepegawaian.

g. Penguatan peraturan perundang-undangan:

- Telah dilakukan pengkajian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.
- Telah dilakukan penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Melalui proses penataan peraturan perundang-undangan, maka ditetapkan 3 (tiga) hal pokok, yakni ;
 1. peraturan perundang-undangan yang akan dibatalkan (*Deregulasi*), karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
 2. peraturan perundang-undangan yang harus ditetapkan kembali (*reregulasi*) sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
 3. peraturan perundang-undangan baru yang harus dibentuk sebagai tindaklanjut dari amanat undang-undang yang lebih tinggi atau dalam rangka merespon tantangan dan dinamika lingkungan eksternal strategis yang berpengaruh signifikan terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

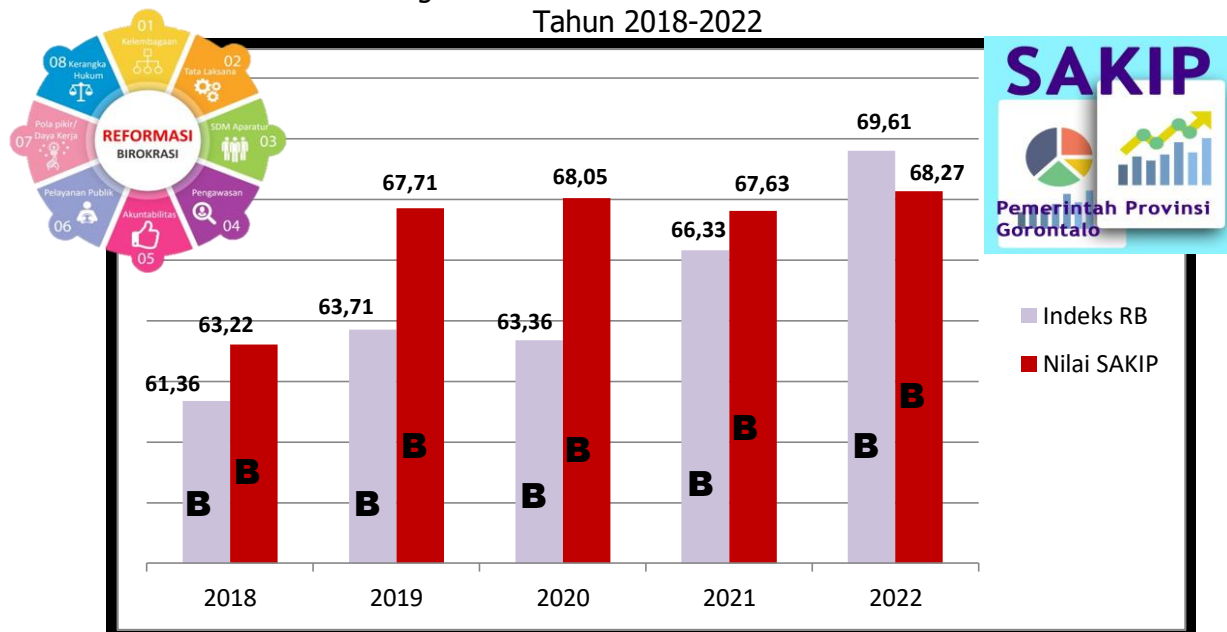
- Meningkatkan penerapan sistem dokumentasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik:
 - Telah dibentuk unit layanan administrasi pada unit-unit pelayanan kepada masyarakat yang dibarengi dengan pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima serta pengelolaan pengaduan pelayanan public.
 - Telah dilakukan penilaian terhadap unit-unit pelayanan public.
 - Meningkatkan inovasi pelayanan publik dengan membuat instruksi gubernur gorontalo tentang *one agency one innovation* yang bertujuan untuk mendorong setiap perangkat daerah dapat menciptakan inovasi yang baru maupun inovasi yang direplikasi atau dimodifikasi serta melakukan kerjasama dengan dengan daerah lain (Provinsi Jawa Timur).
 - Meningkatkan pelayanan publik dengan menindaklanjuti tingkat kepuasan masyarakat atau keluhan yang dihadapi masyarakat atas pelayanan publik Pemerintah Provinsi Gorontalo dan melaksanakan forum konsultasi publik.

Gambar 3.1.25
Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tingkat Provinsi Gorontalo
Tahun 2022



Kesimpulannya bahwa, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan pembenahan-pembenahan dan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mulai membangun *e-government* mulai dari sistem perencanaan daerah sampai dengan penganggaran dan pelaporan dan evaluasi. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui pencapaian reformasi birokrasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi lebih baik. Dibawah ini adalah perkembangan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 3.1.26
Trend Peningkatan Indeks RB dan SAKIP Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2022



Dari trend peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022, walaupun belum bisa merubah predikat atas indeks reformasi birokrasi Provinsi Gorontalo, namun implementasinya terus membaik dan mengalami kenaikan indeks.

Upaya yang akan dilakukan ke depan:

Dari berbagai strategi dan tindaklanjut yang telah dilakukan di tahun 2022, langkah kedepan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi yang sekaligus merupakan upaya tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah:

1. Mengoptimalkan peran agen perubahan dengan mengoptimalkan rencana aksi para agen perubahan yang telah disusun.
2. Dalam rangka menghadapi perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2023 menjadi praktik baik dimana implementasi Reformasi Birokrasi 2023 berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu investasi, pengentasan kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN (Tingkat Komponen dalam negeri pada belanja pemerintah). Dengan adanya penajaman Reformasi Birokrasi (RB) melalui lima aspek tematik tersebut diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi *concern* pemerintah. Olehnya akan dilakukan pemetaan terhadap kinerja yang berdampak yang ada seluruh Perangkat Daerah.
3. Untuk mendukung hal tersebut, upaya yang dilakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan peran agen perubahan di seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu menggerakkan dan mampu menjadi tauladan dalam berinovasi untuk meningkatkan kinerja.
4. Membangun sistim informasi dan aplikasi yang terintegrasi disemua lini.
5. Membangun dan mengoptimalkan kinerja kolaborasi antar *leading sector* / pengampu pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Meningkatkan kualitas monitoring Kabupaten/Kota, dimana monitoring yang akan dilakukan untuk dapat mengetahui data yang terkait dengan reformasi birokrasi tematik sehingga nantinya dapat diketahui apakah anggaran yang dialokasikan terhadap program/kegiatan benar-benar sesuai peruntukannya. Selanjutnya, mendapat gambaran/kepastian bahwa program-program Pemerintah benar di rasakan oleh masyarakat (memberi dampak).
7. Mengoptimalkan pengusulan dan pembangunan Zona Integritas.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan perbandingan indeks reformasi birokrasi dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 3.1.27
Kategori dan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
Di Wilayah Gorontalo Tahun 2021-2022

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Provinsi Gorontalo	66,33	B	69,61	B
2	Kota Gorontalo	63,03	B	65,21	B
3	Kab. Gorontalo	62,12	B	63,21	B
4	Kab. Boalemo	54,84	CC	56,22	CC
5	Kab. Pohuwato	60,67	B	62,03	B
6	Kab. Bone Bolango	58,04	CC	60,29	B
7	Kab. Gorontalo Utara	50,93	CC	50,71	CC

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022

Dari tabel 3.1.27 diatas dapat dilihat bahwa, indeks reformasi birokrasi di Wilayah Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Meskipun demikian, masih perlu terus melakukan perbaikan-perbaikan kearah yang lebih baik. Komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola yang baik di Wilayah Provinsi Gorontalo juga masih perlu terus ditingkatkan. Pada tahun 2022, terdapat kenaikan kategori untuk pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bone Bolango, yaitu dari kategori CC menjadi B dengan kenaikan indeks sebesar 2,25 poin.

B. CAPAIAN KINERJA PENDUKUNG IKU TAHUN 2022

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menetapkan indikator kinerja pendukung IKU. Indikator kinerja pendukung IKU ini juga telah diperjanjikan oleh Gubernur (masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang melayani.


Tabel 3.1.28
Realisasi dan Capaian Kinerja Pendukung IKU
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1	Wisatawan Mancanegara (orang)	7.937	57	0,73
			2	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	759.023	704.821	92,86
2	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	3	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (rupiah)	14.228,39	18.073,68	127,02
		Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	4	Skor PPH Ketersediaan	66,89	76,66	114,76
			5	Skor PPH Konsumsi	86	74,33	84,43
			6	Nilai Tukar Nelayan/Pembudi daya (NTNP)	102,01	99,80	97,83
			7	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	104,42	107,92	103,35

3	Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	8	Indeks Resiko Bencana	0,37-0,65	0,53	81,53
			9	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	1.000 ha	1.272 ha	127,00
4	Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	10	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	278 km	280,05 km	100,74
			11	Indeks E-Government	3,85	2,48	64,42
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	12	Laju Inflasi	3,30	5,15	28,33
			13	Jumlah Desa Tertinggal yang di entaskan (Jumlah Desa Tertinggal)	88 Desa	24 Desa	172,73
6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	14	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	78,00%	81,49%	104,47
			15	Angka Melek Huruf	100%	99,85%	99,85
		Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	16	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,40	2,30	104,17
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	17	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	3 jenis	4 jenis	133,33
			18	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0,25	0,25	100
7	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	19	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	83,02%	14,05%	16,92
			20	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	69,41%	0%	0,00
			21	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	20%	20%	100
8	Peningkatan Tata Kelola Pemerrintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	22	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100

Sumber Data : Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertanggungjawab terhadap program pendukung IKU Daerah tahun 2023

Selanjutnya, akan dipaparkan tentang capaian kinerja terhadap indikator kinerja pendukung IKU yang dimulai dari tujuan, sasaran strategis dan capaian indikator kinerja sebagai berikut :



Tujuan 1 : Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional

Tujuan Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional yang dijabarkan dalam sasaran strategis Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara akan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerjanya setiap

indikator kinerja untuk tujuan pertama ini sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA WISATAWAN
NUSANTARA DAN MANCANEGERA**

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan nusantara.

Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.29
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wisatawan Mancanegara	8.532 orang	11.173 orang	2.112 orang	65 orang	7.937 orang	57 orang	0,73	7.937 orang	0,73
2	Wisatawan Nusantara	957.802 kunjungan	1.304.256 kunjungan	510.421 orang	484.580 orang	759.023 kunjungan	704.821 orang	92,86	759.023 kunjungan	92,86

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.29 diatas, dapat dilihat bahwa sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan drastis utamanya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara, kondisi ini masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Dampak yang paling dirasakan dengan adanya pandemi covid-19 ini adalah sektor pariwisata, dimana sektor pariwisatalah yang paling merasakan dampaknya. Dalam penyelenggaraan urusan bidang pariwisata, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi kinerja Provinsi Gorontalo antara lain yaitu jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara di tahun 2020 masih relatif tinggi yaitu sebanyak 2.112 orang. Pada tahun 2021 turun hingga hanya mencapai 65 orang dan di tahun 2022 ini hanya terdapat 57 orang.

Untuk wisatawan Nusantara kunjungan wisatawan di tahun 2021 sebesar 484.580 orang wisatawan turun sebesar 5,33 persen dibandingkan dengan kunjungan wisatawan di tahun 2020 yang mencapai 510.421 kunjungan. Di tahun 2022, kunjungan wisatawan nusantara mulai berangsur meningkat bila dibandingkan dengan kondisi pada dua tahun sebelumnya. Di tahun 2022 jumlah wisatawan nusantara sebesar 704.821 kunjungan, dengan rata-rata lama tinggal 1,92 hari.

Pada tahun 2022, dimana pandemi covid-19 mulai melandai dan berangsur sirna, tetapi masih menyisakan beberapa permasalahan pariwisata di Provinsi Gorontalo. Adapun faktor yang mempengaruhi masih kurangnya kunjungan wisatawan mancanegara pasca pandemi covid-19 adalah:

- ❖ Kesiapan destinasi wisata di Provinsi Gorontalo yang belum cukup;
- ❖ Fasilitas penunjang obyek wisata yang belum memadai;
- ❖ Kurangnya event-event pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan.

Sektor pariwisata menjadi satu dari delapan program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya dan kebijakanpun telah ditempuh untuk menumbuhkan kembali pariwisata, diantaranya adalah mengusulkan sejumlah destinasi wisata sebagai destinasi geopark serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar di beberapa lokasi wisata. Dan yang tak kalah pentingnya adalah promosi pariwisata secara masif sehingga sector pariwisata ini segera pulih dan bergeliat kembali.

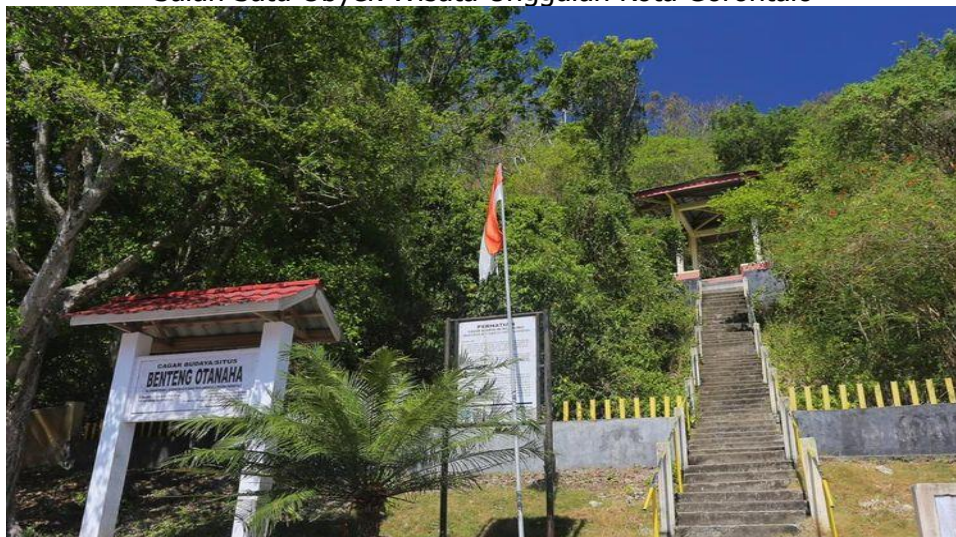
Selain itu, untuk menjawab berbagai tantangan yang ada dan dalam menyikapi isu-isu strategis bidang pariwisata, maka dengan menetapkan dan melaksanakan empat program, dengan rencana aksi yang meliputi:

- Meningkatkan kesiapan obyek wisata menyikapi pandemic covid- 19;
- Memaksimalkan kerjasama antar stakeholder pariwisata;
- Meningkatkan strategi promosi melalui media digital;
- Menyiapkan sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai; serta
- Memaksimalkan pengembangan ekonomi kreatif.

Di Provinsi Gorontalo terdapat banyak destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Obyek wisata yang sangat populer di Provinsi Gorontalo yang merupakan unggulan masing-masing daerah Kabupaten/Kota antara lain adalah sebagai berikut:

- Obyek wisata unggulan Kota Gorontalo.

Gambar 3.1.30
Salah Satu Obyek Wisata Unggulan Kota Gorontalo



Obyek Wisata Benteng Otanaha

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Gorontalo :

Gambar 3.1.31
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Gorontalo



Obyek Wisata Alam Bubohe



Obyek Wisata Pentadio Resort

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Bone Bolango :

Gambar 3.1.32
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Bone Bolango



Obyek Wisata Taman Laut Olele



Obyek Wisata Hiu Paus

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Boalemo :

Gambar 3.1.33
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Boalemo



Obyek Wisata Pulo Cinta



Obyek Wisata Desa Bajo

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Pohuwato :

Gambar 3.1.34
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Pohuwato



Wisata Pantai Pohon Cinta



Obyek Wisata Torosiaje

- Obyek wisata unggulan Kabupaten Gorontalo Utara :

Gambar 3.1.35
Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Gorontalo Utara



Wisata Pantai Saronde



Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pariwisata Gorontalo mungkin masih sangat kecil baik dari segi ragam destinasi wisata maupun jumlah kunjungan wisatanya. Oleh karenanya, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Gorontalo saat ini saling bersinergi dan sangat gencar dalam mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo dengan tentunya didukung pula oleh perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana obyek wisata serta SDM kepariwisataan, yang diharapkan nantinya berdampak pada lama tinggal wisatawan di Gorontalo dan tak kalah penting adalah guna mendukung tujuan pemerintah yaitu Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai Destinasi Nasional dan Internasional dengan slogan "Pariwisata Gorontalo mendunia".

Selanjutnya dibawah ini akan digambarkan dalam tabel perbandingan realisasi Provinsi Gorontalo dengan capaian Nasional tahun 2022.

Tabel 3.1.36
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara	65 kunjungan	5,47 juta kunjungan	-
		Wisatawan Nusantara	484.580 kunjungan	-	-

Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Pada tabel 3.1.36 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 5,47 juta kunjungan di tahun 2022. Kondisi tersebut naik 252,28 persen dibandingkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tahun 2021 yang berjumlah 1,56 juta kunjungan. Sementara rata-rata lama tinggal atau menginap di Indonesia sebesar 1,62 hari.



Tujuan 2 : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat yang akan dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan akan diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN TERHADAP PDRB

Yang pertama, Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.37
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (rupiah)	14.588,74 milyar	16.021,90 Milyar	16.190,93 milyar	10.665,33 milyar	14.228,39 milyar	18.073,68 milyar	127,02	14.228,39 Milyar	127,02

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.37 dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 127,02 persen yang juga merupakan capaian akhir RPJMD. Dalam struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha pada tahun 2022 masih didominasi oleh tiga kategori lapangan

usaha utama yang salah satunya adalah sector pertanian. Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, dimana di tahun 2021 realisasi capaian kinerja ini sebesar 77,21 persen dan tahun 2020 yang mencapai 120,72 persen, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2021 turun sebesar 0.90 persen. Pada tabel 3.2.9 juga dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2018 dan 2019 relatif tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2021 ini. Pada tahun 2018, dimana target yang ditetapkan terhadap kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada PDRB di Provinsi Gorontalo sebesar 12.641,74 milyar dengan realisasi sebesar 14.588,74 milyar atau sebesar 115,40 persen. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian/perkebunan pada PDRB tahun 2019 sebesar 16.021,90 milyar dari target yang ditetapkan sebesar 13.020,99 milyar atau capaian sebesar 123,05 persen.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh tiga kategori yang diantaranya adalah sektor pertanian dan perkebunan. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2022, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 37,99 persen. Meskipun demikian, berbagai faktor penghambat pencapaian target kinerja sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB, pastilah ada kendala dan hambatan utamanya di tengah pandemic covid-19 saat ini.

Pada tabel 3.1.38 dibawah ini akan digambarkan perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Nasional tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1.38
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (rupiah)	18.073,68 milyar	2.428,9 triliun	-

Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Pencapaian tujuan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat didukung pula oleh pencapaian sasaran strategis ini.

SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN
KONSUMSI PANGAN YANG BERSUMBER
DARI PERTANIAN DAN KELAUTAN
PERIKANAN YANG BERDAMPAK PADA
KESEJAHTERAAN PETANI/NELAYAN

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Skor PPH Ketersediaan, Skor PPH Konsumsi, Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP) dan indikator kinerja Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT). Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.39
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya (NTNP)	107,2	101,37	93,35	96,92	102,01	99,80	97,83	102,01	97,83
2	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	101,59	101,88	104,13	105,68	104,42	107,92	103,35	104,42	103,35
3	Skor PPH Ketersediaan	65,65	69,23	84,74	76,66	66,89	76,66	114,76	66,89	114,76
4	Skor PPH Konsumsi	88,8	89,3	90,70	75,5	86	74,33	84,43	86	84,43

Sumber Data : BPS , Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan Tahun 2023

Dari tabel 3.1.39 diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis ini dapat dicapai dengan sangat baik yang ditandai dengan warna "Hijau Tua". Hal ini dapat dilihat dari capaian keempat indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, terdapat tiga indikator kinerja yang memperoleh penilaian rata-rata capaian diatas 95 persen.

Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)

Nilai Tukar Nelayan (NTN dan NTP) merupakan salah satu indikator kinerja utama sektor Kelautan dan Perikanan yang dinilai mampu menggambarkan

perkembangan penerimaan dan pengeluaran masyarakat perikanan secara bersamaan dalam suatu nilai indeks, atau dikenal juga dengan nilai angka perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan / pembudidaya dengan indeks harga yang dibayar nelayan / pembudidaya yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi nelayan atau pembudidaya. Sedangkan indeks yang dibayar nelayan adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga nelayan atau pembudidaya, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi perikanan.

Pada tahun 2022 NTN (Nilai Tukar Nelayan) naik sebesar 1,72 persen. Hal ini terjadi karena indeks harga diterima petani (It) naik sebesar 2,84 persen, dan indeks harga dibayar oleh petani (Ib) naik sebesar 1,10 persen. Kenaikan It disebabkan oleh naiknya It pada kelompok penangkapan di perairan laut sebesar 2,88 persen. Kenaikan nilai Ib disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok konsumsi Rumah tangga sebesar 1,73 persen dan indeks kelompok biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) naik sebesar 0,21 persen.

Bila dibandingkan dengan keadaan Tahun 2021 dimana ditargetkan sebesar 101,7. Nilai indeks NTN tahun 2021 sebesar 96,92 indeks. Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di tahun 2022 naik sebesar 0,69 persen. Hal ini terjadi karena It mengalami kenaikan sebesar 1,69 persen, dan Ib sebesar 0,99 persen. Kenaikan It disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditi budidaya air tawar sebesar 0,32 persen, komoditas budidaya air payau sebesar 2,29 persen. Sedangkan kenaikan Ib disebabkan oleh naiknya kelompok indeks konsumsi Rumah tangga sebesar 1,59 persen dan indeks kelompok BPPBM turun sebesar 0,10 persen.

Ketidaktercapaian indeks dari target yang telah ditetapkan, baik di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ini turut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan harga dan produksi ikan yang menurun. Rendahnya Nilai NTN tersebut dipengaruhi pula oleh dua faktor yaitu variabel penurunan produksi

perikanan yaitu produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sampai 95 persen.

Nilai NTN juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah dalam (1). Penguatan Sistem Logistik Ikan dan jaminan harga ikan yang baik atau kompotitif di pasaran ; (2) bantuan sarana produksi perikanan ; (3) Penyediaan sarana pengisian BBM bersubsidi ; (4) Penguatan teknologi informasi tangkapan perikanan; dan (5) penguatan SDM Perikanan dan Kelautan. Sehingga nilai indeks yang diterima oleh nelayan lebih tinggi dari indeks yang dikeluarkan oleh nelayan yaitu nilai indeksnya di atas nilai 100.

Pada tabel 3.1.39 juga dapat dilihat perkembangan realisasi atas kinerja ini, dimana pada tahun 2019, dimana ditargetkan sebesar 101,2 realisasi tercapai sebesar 101,37. Tiinginya Nilai NTN di tahun 2019 tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel peningkatan produksi perikanan yaitu terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 121,76 persen yaitu dengan realisasi produksi sebesar 148.953 ton dari target yang ditetapkan sebesar 122.333 ton pada tahun 2019. Dan produksi perikanan budidaya sebesar 321 persen atau dengan realisasi sebesar 91.233 ton dari target 28.422 ton.

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo pada Desember tahun 2022 sebesar 99,19. Sedangkan nilai tukar petani sub sektor peternakan sebesar 107,92. Realisasi kinerja di tahun 2022 ini sebesar 103,35 persen dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 104,42. Nilai tukar petani sub sektor peternakan di Bulan Desember tahun 2022 turun sebesar -1,84 persen dibandingkan keadaan Bulan Nopember 2022 dengan nilai tukar petani sub sektor peternakan sebesar 109,94. Hal ini terjadi karena It turun sebesar -0,49 persen dan Ib naik sebesar 1,38 persen. Komoditas yang menyebabkan penurunan It terbesar pada sub sector peternakan adalah sapi potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Kenaikan pada nilai Ib disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok konsumsi

Rumah tangga sebesar 1,76 persen dan indeks kelompok BPPBM sebesar 0,77 persen.

Untuk Meningkatkan nilai tukar petani sub sektor peternakan, ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Bagaimana meningkatkan pendapatan petani;
2. Bagaimana meningkatkan produksi pertanian sub sektor peternakan.

Untuk mencapai target dan meningkatkan nilai tukar petani pada sub sektor peternakan, dicapai dengan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain adalah penyediaan pakan ternak, penyediaan bibit ternak, program penjaminan kesehatan hewan serta pengembangan penyuluhan ketenagaan pertanian sub sektor peternakan. Dan untuk lebih meningkatkan nilai tukar petani sub sektor peternakan ini kedepannya telah mulai dilakukan upaya-upaya yaitu perbaikan mutu genetik, teknologi pengolahan pangan, intensifikasi budidaya dan pengendalian penyakit menular strategis.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan nilai NTP per subsector selama lima tahun terakhir di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.40
Nilai Tukar Petani per Subsektor
Tahun 2018-2022

SUB SEKTOR	NILAI NTP TAHUN 2018	NILAI NTP TAHUN 2019	NILAI NTP TAHUN 2020	NILAI NTP TAHUN 2021	NILAI NTP TAHUN 2022
Tanaman Pangan	108,87	104,23	99,17	103,78	94,26
Hortikultura	111,32	109,80	106,20	133,98	109,41
Tanaman Perkebunan Rakyat	94,62	96,26	109,72	121,00	104,37
Peternakan	101,59	101,88	104,13	111,28	107,92
Perikanan	100,84	93,80	93,35	100,26	99,80
Perikanan Tangkap	107,20	104,65	105,90	96,92	100,29
Perikanan Budidaya	82,33	79,51	105,43	94,93	95,00

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi

Indikator kinerja selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian dan kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi. PPH atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi, tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli.

Skor PPH Ketersediaan merupakan indikator ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

Skor PPH Ketersediaan di Provinsi Gorontalo periode tahun 2018 - 2022 capaian yang diperoleh selalu melampaui target yang ditetapkan. Hingga posisi Desember tahun 2022 dari hasil analisis data neraca pangan dapat diketahui bahwa dari 11 komoditi pangan (Beras, Jagung, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Bessar, Cabe Rawit, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam, Gula Pasir, Minyak Goreng) semuanya dalam kondisi surplus.

Namun yang perlu diingat adalah bahwa beberapa komoditi buah dan sayur masih bergantung dari suplai luar daerah karena belum tersedia di Gorontalo. Pola konsumsi pangan kebanyakan masyarakat Indonesia masih terdapat ketimpangan

hal ini dikarenakan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih relative rendah. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.

Dari tabel 3.1.39 diatas dapat dilihat pula bahwa capaian terhadap indikator kinerja skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di tahun 2021 mencapai 76,66 dari target yang ditetapkan sebesar 66,6 atau capaian sebesar 115,10. Dibandingkan skor PPH ketersediaan tahun 2020 yang mencapai angka 84,74 atau capaian sebesar 107,46 persen, skor yang dicapai di tahun 2021 ini turun sebesar 18,14 poin. Skor PPH Ketersediaan di tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa komoditi yang ketersediaannya bervariasi. Dimana terdapat peningkatan ketersediaan pangan utama seperti Beras dan Jagung yang tercukupi/surplus, namun terdapat beberapa komoditi yang mengalami defisit yaitu kategori umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah. Untuk itu dibutuhkan dukungan semua stakeholders terkait agar komoditi yang masih defisit bisa mengalami peningkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Gorontalo.

Meskipun demikian, hal ini menunjukkan tingkat ketersediaan pangan yang relatif stabil, juga tingkat keragaman konsumsi dan mutu pangan penduduk Provinsi Gorontalo sudah mulai beragam bergizi seimbang dan aman walaupun konsumsi masyarakat terhadap umbi-umbian dan buah/biji berminyak masih rendah. Dari sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, PPH ketersediaan didukung oleh perluasan areal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan bibit unggul tanaman dan ternak, penambahan alat dan mesin pertanian, penerapan teknologi pertanian, optimalisasi pengairan dan peremajaan tanaman perkebunan.

Begitupun dengan skor PPH Konsumsi, keberhasilan dalam menaikkan skor PPH konsumsi antara lain karena didukung oleh beberapa kegiatan yaitu dengan menerapkan kawasan rumah pangan lestari, promosi/kampanye pangan lokal,

lomba cipta menu dan model pengembangan pangan pokok lokal melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan program penanganan kerawanan pangan serta program pengawasan keamanan pangan.

Skor PPH konsumsi Provinsi Gorontalo periode tahun 2018-2022 capaiannya mengalami kenaikan pada awal periode dan turun pada tahun keempat dan kelima.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, jumlah anggota keluarga dan tingkat pendidikan. Disamping itu juga masih tingginya konsumsi beras dan rendahnya daya beli masyarakat imbas dari pandemi Covid 19, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya Skor PPH konsumsi. Kampanye dan promosi tentang konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) tetap terus digalakkan agar Skor PPH yang ideal tercapai yaitu skor 100 persen.

Selanjutnya, dibawah ini akan digambarkan perbandingan kinerja Provinsi Gorontalo dan realisasi Nasional sebagai berikut :

Gambar 3.1.41
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian dan kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	99,80	105,28	-
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	107,92	101,68	+
		Skor PPH Ketersediaan	76,66	-	-
		Skor PPH Konsumsi	74.33	94,70	-

Sumber Data : BPS, BPS Provinsi Gorontalo dan Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Tujuan 3 : Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang akan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dan akan

SASARAN STRATEGIS :
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
HUTAN, LAHAN, LAUT DAN PESISIR YANG
LESTARI DAN BERKELANJUTAN SERTA MITIGASI
BENCANA

diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Indeks Resiko Bencana dan Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.42
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Resiko Bencana	0,40	0,48	0,48	0,43	0,65	0,53	81,53	0,65	81,53
2	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (Luas Lahan Kritis)	1.968 Ha	2.860 Ha	273 Ha	1.207 ha	1.000 ha	1.272 ha	127,00	700,930	100,37

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.42 diatas, dapat dilihat bahwa capaian atas sasaran strategis terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 masih belum tercapai. Kondisi ini masih relatif sama dengan kinerja tahun 2021 yang juga masih belum mencapai target dan terus memerlukan dukungan penganggaran serta kebijakan-kebijakan untuk penanggulangannya. Dari kedua indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran ini di tahun 2022 memperoleh capaian sebesar 81,53 persen untuk capaian indeks resiko bencana dan 127,00 persen untuk capaian luas lahan kritis yang direhabilitasi.

Luas lahan kritis

Pada kondisi kinerja awal periode RPJMD, yaitu tahun 2018 Luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo tercatat seluas 705.930 hektar. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan target penanganan berupa rehabilitasi lahan kritis seluas 5.000 hektar yang di bagi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu per tahun. Sehingga setiap tahun ditetapkan rehabilitasi lahan kritis seluas 1000 hektar. Terhadap target yang telah ditetapkan tersebut yaitu 1000 hektar per tahun atau 5.000 hektar selama 5 tahun. Adapun capaian yang diperoleh di akhir RPJMD terhadap penanganan lahan kritis tersebut sebesar 7.580 hektar atau sebesar 151,60 persen. Dengan kata lain, dari target akhir RPJMD yang telah ditetapkan masih terdapat luas lahan kritis sebesar 700.930 hektar, dan karena target yang ditetapkan selama 5 tahun hanya menangani 5.000 hektar dari seluruh luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo, dan dengan adanya capaian yang melebihi target selama kinerja 5 tahun, maka lahan kritis di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2022 menjadi hanya 698.350 hektar atau telah berkurang sebesar 2.580 hektar dari target 700.930 hektar.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian akhir RPJMD atas pencapaian kinerja luas lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 100,37 persen. Dan terhadap masih luasnya lahan kritis di Provinsi Gorontalo tersebut, akan

dilakukan intervensi pada periode selanjutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Lahan kritis merupakan lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Singkatnya, lahan kritis merupakan lahan yang produktivitasnya tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal ini biasanya disebabkan oleh degradasi tanah, yaitu proses kemunduran produktivitas tanah, yang disebabkan oleh kegiatan manusia, yang mengakibatkan penurunan produktivitasnya pada saat ini dan di masa yang akan datang dalam mendukung kehidupan makhluk hidup. Selain degradasi tanah, ada beberapa hal yang juga menyebabkan banyak lahan berubah menjadi lahan kritis antara lain adalah:

- ✚ Erosi;
- ✚ Faktor alam;
- ✚ Penebangan hutan sembarang;
- ✚ Aktivitas manusia yang membahayakan alam sekitar.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi lahan kritis:

- Melakukan penanaman secara serentak dengan berbagai jenis tanaman yang berbeda menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi lahan kritis.
- Teknik menanam aneka ragam tanam dalam satu lahan disebut dengan teknik tumpang sari. Tujuannya untuk membantu dan menjaga kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah.
- Penghijauan merupakan sebuah proses yang penting untuk selalu dikampanyekan oleh masyarakat luas. Tujuannya untuk mengatasi masalah lahan kritis, karena dengan melakukan penghijauan, lahan yang kritis bisa kembali memiliki fungsi.
- Membuat terasering dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga bisa mengurangi kecepatan, dan lain sebagainya.
- DAS atau daerah aliran sungai merupakan salah satu cara yang diterapkan agar tanah memiliki area resapan air yang lebih baik lagi.

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut diatas yaitu melalui pengembangan keanekaragaman hayati, memperluas wilayah untuk penghijauan, membuat terasering dan mengembalikan fungsi daerah aliran sungai (DAS), didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Indeks Resiko Bencana

Berikutnya adalah indikator kinerja untuk mengukur tingkat mitigasi bencana di Provinsi Gorontalo, ditetapkanlah Indeks Resiko Bencana sebagaimana pada tabel 3.2.14, tetapi pada penetapan targetnya, angka tersebut lebih tepat adalah untuk Indeks Ancaman Bencana atau kerentanan yang dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta jenis ancaman.

Dari tabel 3.1.42 dijelaskan bahwa, pada tahun 2018, Indeks Ancaman Bencana Provinsi Gorontalo sebesar 0,40 dari target sebesar 0,54, atau capaian sebesar 125,93 persen. Indeks Ancaman Bencana dapat diketahui dengan menghitung rata-rata berbagai ancaman bencana yang ada di Kabupaten/Kota. Sebagaimana data tersebut, indeks ancaman bencana Provinsi Gorontalo masuk pada kategori “sedang”, dimana terdapat tiga kategori ancaman bencana yaitu indeks $<0,3$ adalah kategori ancaman bencana rendah, indeks $0,3 - 0,6$ adalah kategori ancaman bencana sedang dan indeks $0,6 - 1$ adalah kategori ancaman bencana tinggi. Sementara itu, di tahun 2020 terdapat indeks ancaman bencana sebesar 0,48.

Dalam Capaian Target Kinerja tahun 2020 indeks resiko bencana Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebesar 110 persen, sedangkan dalam target yang ada bahwa target dalam hal ini menurunkan indeks resiko bencana setiap tahun sebesar 30 persen dari indeks resiko bencana Pusat, sehingga capaian kinerja atas indeks resiko bencana di tahun 2020 hanya sebesar 88,37 persen. Peningkatan terhadap indeks resiko bencana Provinsi Gorontalo ini disebabkan

banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi serta adanya rasionalisasi anggaran sehingga banyak anggaran yang terfokus ke kegiatan penanganan Covid-19.

Nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi Gorontalo menurut hasil capaian di tahun 2022 berada 0.53 sesuai indeks terakhir dihitung oleh tim penilai BNPB sehingga melihat kondisi RPJMD terakhir di tahun 2022 indeks masih termasuk dalam range 0.3-0.65 yang ditargetkan.

Provinsi Gorontalo yang pada zaman colonial Belanda dikenal dengan sebutan semenanjung Gorontalo(Gorontalo Peninsula). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu, kondisi tektonik wilayah Gorontalo juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota Gorontalo. Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Selama periode 5 tahun terakhir, Provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan. Secara Nasional, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Resiko Sedang dengan nilai indeks 126,64.

Indeks Resiko Bencana dihitung berdasarkan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities) dan kapasitas (capacities). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir dan lainnya. Komponen kerentanan adalah : kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsure ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi dan pencegahan.

Indeks Resiko Bencana diketahui dengan menggunakan formula :

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

atau Resiko adalah Bahaya dikalikan Kerentanan dibagi dengan Kapasitas.

Untuk menghadapi berbagai bencana baik bencana alam, bencana non-alam hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana, meliputi Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Pemulihan kondisi dari dampak bencana. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Penanggulangan bencana di daerah khususnya di Provinsi Gorontalo, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan seluruh stakeholders. Wilayah Provinsi Gorontalo adalah wilayah yang rawan bencana banjir dan tanah longsor. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana atau yang dikenal dengan mitigasi bencana di Provinsi Gorontalo, telah dilakukan beberapa program/kegiatan antara lain adalah sosialisasi desa tangguh bencana yaitu bagaimana upaya masyarakat untuk lebih mandiri dan tanggap terhadap bencana dan sekolah madrasah aman bencana yang menjadikan sekolah-sekolah menjadi aman bencana. Untuk menurunkan Indeks Ancaman Bencana di Provinsi Gorontalo didukung oleh beberapa program dan kegiatan baik yang sudah dilakukan maupun yang masih dalam proses pembangunan :

- 1). Dibangunnya kanal-kanal untuk mengatasi bencana longsor;
- 2). Telah dilakukan normalisasi sungai-sungai di wilayah Gorontalo dan juga revitalisasi danau Limboto guna mengatasi masalah banjir;
- 3). Dibangunnya tanggul-tanggul pengaman sungai dan pantai;
- 4). Dibangunnya cek dam untuk penampungan air;
- 5). Dilakukannya program-program penghijauan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- 6). Dan mungkin yang paling penting yang harus ditempuh untuk mengurangi resiko dampak bencana adalah sosialisasi secara intensif kepada masyarakat utamanya masyarakat yang berada di daerah atau lokasi rawan bencana. Menggugah kembali kesadaran masyarakat akan sadar bencana yaitu kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, sehingga memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi di daerah yang rawan bencana dengan sebaik-baiknya dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana.

Yang terbaru dalam mengatasi bencana banjir di Gorontalo adalah rencana pembangunan bendungan Bulango Ulu yang berlokasi di Kabupaten Bone Bolango,

dimana sejak tahun 2019 telah ditetapkan lokasi pembangunannya dan sampai dengan tahun 2020 sudah masuk tahap pembebasan lahan. Dan pada tahun 2021 telah dimulai pembangunan bendungan tersebut dan sudah mencapai 22 persen. Dengan adanya bendungan ini di harapkan akan dapat mengatasi masalah banjir di Gorontalo khususnya banjir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bone Bolango, dimana ketiga daerah ini memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir. Dibawah ini dalam tabel 3.1.43 akan di gambarkan realisasi kinerja Provinsi Gorontalo dengan capaian kinerja Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1.43
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	126,64	134,16	+
		Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	1.272 Ha	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Data IRB Indonesia BNPB 2023



Tujuan 4 : Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi yang akan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dan akan diukur dengan 2 (dua)

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA KUALITAS DAN
KUANTITAS INFRASTRUKTUR
DAERAH**

indikator kinerja. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerjanya setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah pengukuran terhadap proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik, dan Indeks E-Government. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.44
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	222,74 km	237,49 km	254,06 km	373,42 km	278 km	280,05 km	100,74	278 km	100,74
2	Indeks E-Government	1,48	3,41	3,18	2,51	3,85	2,48	64,42	3,85	64,42

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

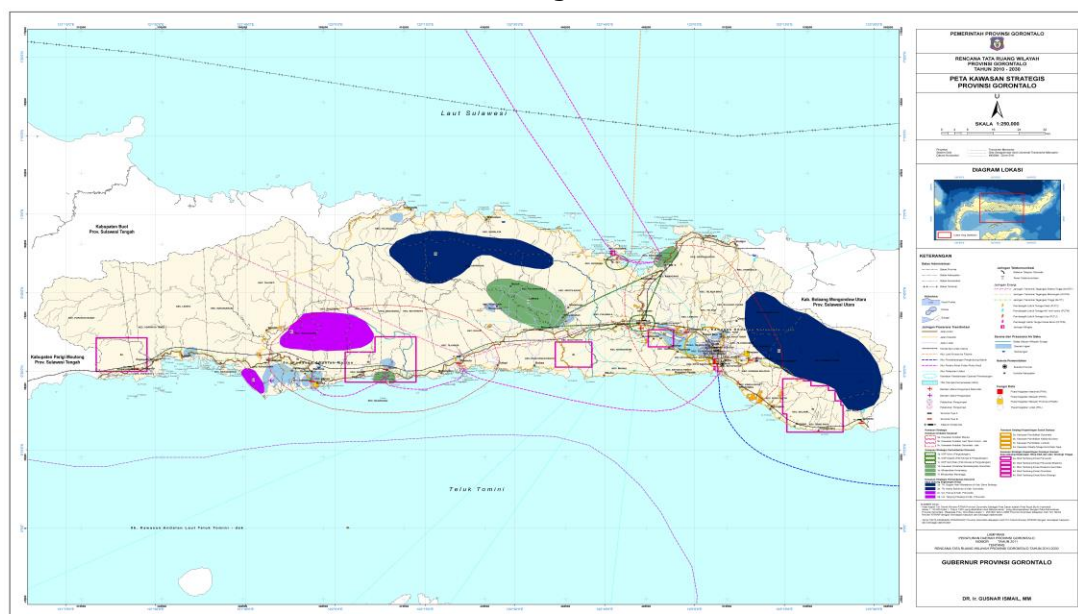
Dari tabel 3.1.44 diatas dapat diketahui bahwa tujuan Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi dengan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah yang dicapai melalui dua indikator kinerja tersebut dapat dicapai dengan baik, meskipun capaiannya tidak

mencapai 100 persen atau target hanya dapat dicapai sebesar 64,42 persen untuk indeks e-government dan untuk infrastruktur jalan mencapai 100,74 persen atau 280,05 km jaringan jalan dalam kondisi baik di tahun 2022 dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 278 kilo meter.

Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik

Dewasa ini, pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat strategis bagi peningkatan daya saing dan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Olehnya, penyediaan infrastuktur merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pemerintah periode 2017-2022 dan merupakan program berkelanjutan dimana pada periode sebelumnya hanya peningkatan infrastruktur, maka pada periode ini diharapkan infrastruktur yang dibangun lebih merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan lebih utama adalah sebagai sarana konektivitas perekonomian masyarakat Provinsi Gorontalo. Dibawah ini, akan digambarkan peta kawasan strategis Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Gambar 3.1.45
Peta Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar khususnya pada ruas jalan provinsi yang dalam kondisi mantap dan baik maupun ruas strategis provinsi sebagai akibat terbukanya akses transportasi ke pusat-pusat kegiatan / perekonomian dan ketempat-tempat wisata. Hal ini telah diwujudkan dan dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi, Pembangunan Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Menuju Pariwisata, Potensi Pertanian dan Daerah Transmigrasi Pemeliharaan/Peningkatan berkala jalan Provinsi serta Pemeliharaan Rutin jalan provinsi yang didukung oleh pelaksanaan program penyelenggaraan jalan. Kinerja pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Provinsi Gorontalo berjalan dengan baik dari tahun ke tahun dan hingga di akhir tahun RPJMD capaian sebesar 100,74 persen.

Selanjutnya akan digambarkan jaringan jalan Provinsi Gorontalo sebagaimana pada gambar 3.1.46 dibawah ini :

Gambar 3.1.46
Peta Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo

Pada tabel 3.1.44 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya terhadap indikator kinerja proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2021 sepanjang 374,42 km, pada tahun 2020 capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dimana pada tahun 2020 ditargetkan 257,52 km, realisasi sebesar 254,06 km. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya Refocusing pada Anggaran Pembangunan Jalan akibat Pandemi Covid-19. Capaian kinerja tahun 2019 terhadap indikator kinerja ini mencapai 237,49 km atau jalan dalam kondisi mantap sebesar 47,67 persen. Pada tahun 2018, proporsi panjang jaringan jalan sepanjang 222,74 km atau jalan kondisi mantap 47,68 persen.

Indeks E-Government

Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas Ekonomi dengan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah juga diukur dengan indikator kinerja Indeks *E-Government*. Dari tabel 3.1.44 diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja atas Indeks *E-Government* Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 3,18, dari target yang ditetapkan sebesar 3,82 atau capaian sebesar 83,25 persen. Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang mencapai indeks sebesar 3,41 dari target sebesar 3,80 atau capaian sebesar 89,74 persen, capaian di tahun 2020 ini turun sebesar 0,23 poin. Dan dibandingkan juga dengan capaian kinerja di tahun 2018, capaian di tahun 2020 ini cukup tinggi dimana pada tahun 2018, Indeks *E-Government* mencapai indeks sebesar 1,48. Penurunan indeks *E-Government* atau saat ini lebih dikenal dengan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) tahun 2020 ini disebabkan oleh adanya perubahan kategori pada predikat indeks SPBE yang sebelumnya adalah angka maksimal dan kategori tertinggi dari indeks SPBE adalah 4,0 (Sangat Baik), maka berubah menjadi 5,0 (Memuaskan).

Terjadi juga perubahan Instansi penyelenggara evaluasi Indeks *e-Government* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian PANRB. Karena terjadi pula perubahan instansi penyelenggara maka indikator penilaian juga berubah. Sehingga capaian kinerja tidak terpenuhi 100 persen.

Diperlukan pula perbaikan dan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang menjadi obyek evaluasi.

Pencapaian Indeks *E-Government* tertinggi di capai oleh Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 yaitu indeks sebesar 3,18 dan masuk pada kriteria "BAIK". Indeks ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks SPBE/indeks *E-Government*). Indeks didapatkan berdasarkan Evaluasi Mandiri yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator Internal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dimaksud. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang capaiannya dalam bentuk Indeks *E-Government* atau *e-Government Development Index* (EGDI) ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Inti dari SBPE adalah transformasi digital secara menyeluruh dari berbagai aspek dalam pemerintahan.

Di tahun 2021, indeks SPBE Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,51 atau dengan kategori "cukup". Dan di tahun 2022 ini indeks SPBE Provinsi Gorontalo kembali turun menjadi 2,48 masih dengan kategori "cukup". Rendahnya indeks SPBE provinsi Gorontalo disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE, belum mendefinisikan dan memiliki dokumentasi atas proses tata kelola ataupun belum memiliki kebijakan internal yang mengatur standar proses tata kelola secara terpadu bagi semua unit. Pelaksanaan Tata Kelola pun tidak menentu dan belum didukung oleh struktur organisasi yang memadai.
- Pada Domain Layanan SPBE, belum menyediakan sistem aplikasi yang memberikan layanan SPBE dalam hal menyediakan fasilitas transaksi yaitu memberikan layanan setelah terjadi transaksi pembayaran atau pertukaran informasi.
- Belum optimalnya layanan SPBE antara lain belum terintegrasinya berbagai aplikasi sehingga belum mempermudah pengguna layanan.

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagaimana tabel 3.1.47 dibawah ini :

Tabel 3.1.47
Predikat Indeks SPBE/E-*Government*

No.	Nilai Indeks	Predikat	Ket.
1	4,2 – 5,0	Memuaskan	
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	
3	2,6 - <3,5	Baik	
4	1,8 - <2,6	Cukup	Nilai Indeks Provinsi Gorontalo
5	< 1,8	Kurang	

Sumber : PermenPAN RB No 5 Tahun 2018

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Langkah kedepan yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo dalam upaya perbaikan tata kelola SPBE yaitu:

- ✚ Mengoptimalkan pembangunan *Grand design* SPBE yang menggambarkan rencana aksi SPBE di provinsi Gorontalo;
- ✚ membangun sistem aplikasi yang terintegrasi baik aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder;
- ✚ Menetapkan Kebijakan Internal SPBE, yang memuat dan mengatur standar proses tata kelola secara terpadu bagi semua unit.

Selanjutnya, akan digambarkan perbandingan pencapaian kinerja pengelolaan SPBE Provinsi terhadap Kab/Kota di wilayah Gorontalo berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1.48
Perbandingan Realisasi Kinerja pengelolaan SPBE dengan Kab/Kota

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	2	3	4
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2,48	Cukup
2	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	2,03	Kurang
3	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	2,30	Cukup
4	Pemerintah Kota Gorontalo	2,59	Cukup

Sumber Data : Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PAN RB Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan kinerja nasional terhadap Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) capaian Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 masih diatas capaian Nasional, dimana indeks SPBE Nasional di tahun 2022 sebesar 2,34 (Cukup). Kementerian PANRB sebagai koordinator SPBE mengapresiasi kerja sama instansi pemerintah dan juga Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam penerapan SPBE sehingga terjadi peningkatan EGDII. Kementerian PAN RB terus mendorong kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kualitas penerapan SPBE dalam upaya mencapai indeks SPBE Nasional yang terus bergerak naik.

Dibawah ini dalam tabel 3.1.49 akan di gambarkan realisasi kinerja Provinsi Gorontalo dengan capaian kinerja Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1.49
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	373,42 km	-	-
		Indeks E-Government	2,48	2,34	+

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Hasil Evaluasi SPBE Kementerian PAN RB Tahun 2023



Tujuan 5 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang akan dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dan telah diukur sebelumnya dengan 5 (lima) Indikator Kinerja

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN
BERKEADILAN**

Utama (IKU) dan selanjutnya akan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja pendukung IKU. Evaluasi dan analisis capaian kinerjanya dari indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Laju Inflasi. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.50
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laju Inflasi	2,15 %	3,25 %	0,81 %	2,59%	3,30%	5,15%	28,33	3.30%	28,33
2	Jumlah Desa Tertinggal yang di Entaskan (Desa Tertinggal)	348 Desa	154 Desa	90 Desa	61 Desa	88 Desa	24 Desa	172,73	88 Desa	172,73

Sumber Data : BPS provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.50 diatas dapat dilihat bahwa, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja pendukung IKU. Sebelumnya telah diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang

Inklusif dan Berkeadilan. Sebagaimana tabel diatas, laju inflasi Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebesar 2,15 persen, dengan capaian kinerja sebesar 140,28 persen. Dan tahun 2019 sebesar 3,25 persen. Inflasi tahun 2020 sebesar 0,81 persen dan pada tahun 2021 sebesar 0,92 persen. Sementara di tahun 2022 inflasi berada pada angka 5,15 persen. Sedangkan capaian kinerja untuk Desa Tertinggal yang di entaskan juga capaiannya sangat baik hingga sebesar 172,73 persen. Tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini merupakan tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Olehnya, pada tujuan ini telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran dan didukung dengan dua indikator lain yang relevan dan mendukung pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator penting dan tolok ukur perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas makro. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa didalam wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Inflasi Gorontalo tahun 2022 yang sebesar 5,15 persen ini adalah inflasi tertinggi yang dialami Provinsi Gorontalo sejak 5 tahun terakhir. Secara Nasional di tahun 2022, inflasi dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM. Khusus di Provinsi Gorontalo, secara terinci inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga konsumen dari 107,12 pada Desember 2021 menjadi 122,64 pada Desember 2022. Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,24 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,23 persen, kelompok perumahan, air dan listrik dan bahan bakar Rumah tangga sebesar 3,84 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin Rumah tangga sebesar 0,54 persen. Kelompok pendidikan sebesar 2,36 persen, kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 5,07 persen. Dan

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,91 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,55 persen. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Gorontalo Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.51
Komoditas Utama Penyumbang Inflasi di Gorontalo
Desember 2022

No.	Nama Komoditas	Andil (%)
(1)	(2)	(3)
1	Bensin	0,9533
2	Bawang Merah	0,4737
3	Rokok Kretek Filter	0,4088
4	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,3502
5	Tomat	0,3278
6	Angkutan Udara	0,305
7	Ikan Layang/Ikan Benggol	0,176
8	Ikan Tuna	0,015
9	Rokok Putih	0,1487
10	Ikan Cakalang	0,1325

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang di konsumsi oleh Rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi di ukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke public setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kurun waktu 5 tahun, inflasi tahunan Gorontalo sangat berfluktuasi jika dibandingkan dengan laju inflasi tahunan daerah lain di Indonesia maupun

terhadap inflasi nasional. Di tahun 2022 ini, tingkat inflasi Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke 13 tingkat inflasi di Kawasan Timur Indonesia dan urutan 8 Nasional. Di tahun 2018, Kota Gorontalo mengalami inflasi sebesar 2,15 persen, sedangkan inflasi Nasional sebesar 2,50 persen, di tahun 2019, inflasi Kota Gorontalo sebesar 3,25 persen masih diatas inflasi Nasional yang sebesar 2,72 persen, pada tahun 2020, inflasi sebesar 0,81 sedangkan Nasional sebesar 1,68 persen. Dan pada tahun 2021, laju inflasi Gorontalo sebesar 2,59 persen sedangkan Nasional sebesar 1,30 persen dan tahun inflasi Nasional mencapai 5,51 persen.

Adapun perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat inflasi Gorontalo dengan daerah lain di Kawasan Timur Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.1.52 sebagai berikut :

Tabel 3.1.52
Perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat inflasi
di Kawan Timur Indonesia Tahun 2022

No.	Kota	IHK	Inflasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BAU-BAU	114,76	8,35
2	KENDARI	116,20	7,11
3	PARE-PARE	115,98	6,66
4	LUWUK	117,47	6,62
5	AMBON	116,81	6,39
6	MANOKWARI	118,07	6,06
7	KOTAMOBAGU	116,11	6,03
8	TIMIKA	115,89	5,93
9	PALU	115,78	5,81
10	MAKASSAR	114,19	5,81
11	JAYAPURA	112,02	5,81
12	WATAMPONE	112,57	5,52
13	GORONTALO	112,64	5,15

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Langkah-langkah dalam rangka pengendalian Inflasi di Gorontalo

Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya terus bersinergi dan berkolaborasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo diantaranya sebagai berikut :

1. Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial pada APBD TA. 2022 sebanyak Rp 5.376.430.000 (2,21%);
2. Gerakan Masyarakat Menanam Cabai (35.000 bibit cabai dari Dinas Pangan)
3. Telah dilaksanakan Gerakan Menanam Cabai di Kelompok Wanita Tani (KWT), Instansi/Lembaga, Pondok Pesanten, dan sekolah-sekolah. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten/Kota (APBD 15 kali, APBD-P 15 kali). Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag sudah dilaksanakan sebanyak 28 kali di kabupaten/kota. Komoditas yang dijual diantaranya; Beras, Telur, Minyak Goreng, Gula Pasir, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Ikan Tuna;
4. BLP3G Bantuan Langsung Pangan (Bansos) di Kabupaten/Kota untuk 45.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
5. Pelaksanaan Bazar Pangan Murah (BPM) di Kabupaten/Kota (APBD 32 kali, APBD-P 10 kali, dan APBN 2 kali). BPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Gorontalo bertujuan untuk memperpendek rantai distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen sehingga harganya terjangkau dan wajar.
6. Kerja Sama Antar Daerah (KAD). KAD yang telah dilaksanakan yaitu;
 - Gorontalo-Sulut-Malut : KAD terkait Pengendalian Inflasi Daerah.
 - Gorontalo-Sulut-Maluku-Malut-Pabar-Papua : KAD terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - Gorontalo Utara-Kalimantan Utara : KAD Pengiriman Sapi Potong dan Komoditas Pertanian Lainnya.

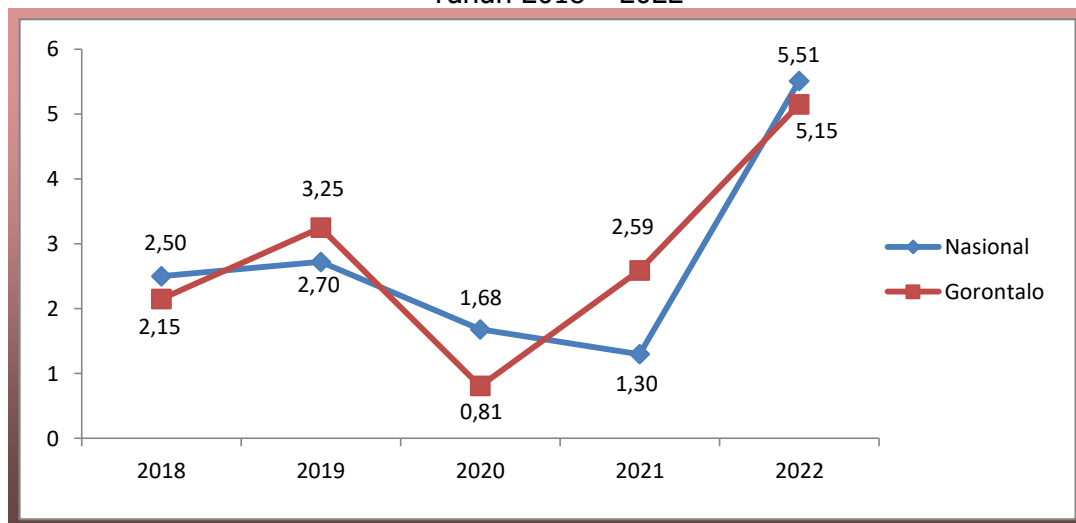
- Gorontalo-Sulawesi Selatan : KAD B to B antara UD. Cindy (Kota Gorontalo) dan UD. Rebi (Kota Makassar) terkait Perdagangan Dalam Penyediaan Komoditas Bawang Merah.
 - Gorontalo-Sulawesi Tengah : KAD terkait pengendalian inflasi daerah khususnya Komoditas Cabai Rawit.
7. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Menjelang HBKN Nataru 2023 yang dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Gorontalo dengan menghasilkan 3 rekomendasi, yaitu:
 - a. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak khususnya beras, cabai rawit, dan tomat melalui pemanfaatan *early warning system* atau pemantauan langsung TPID seiring dengan risiko meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 sesuai dengan pola historis/musiman.
 - b. Mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan operasi pasar murah atau gelar pangan murah yang lebih intensif jelang HBKN Nataru 2023.
 - c. Menjaga ekspektasi masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan (belanja bijak) melalui penyampaian *moral suasion* (komunikasi efektif) kepada masyarakat oleh TPID.
 8. Pelaksanaan Sidak ketersediaan dan harga kebutuhan pokok menjelang HBKN Nataru 2023 ke distributor, Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Gudang Bulog yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Gorontalo.
 9. Pemantauan harga bahan kebutuhan pokok di pasar modern dan pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag dan Dinas Pangan.
 10. Pemantauan stok bahan kebutuhan pokok di tingkat distributor/pedagang besar oleh Dinas Kumperindag.
 11. Pelaksanaan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Tepat Sasaran (24.168 kendaraan atau 40,55%).
 12. Gerakan Penghematan Energi.

Upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan laju inflasi yaitu berupa Kerja Sama Antar Daerah (KAD):

- ✚ Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk komoditas bawang merah.
- ✚ Telah dilakukan penjajakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi KAD Gorontalo-Sulawesi Selatan secara G to G (government to government) dan telah dilaksanakan MoU secara B to B (business to business) antara UD Cindy (Kota Gorontalo) dan UD Rebi (Kota Makassar).

Perkembangan inflasi Gorontalo dibandingkan dengan Nasional selama 5 tahun terakhir tergambar pada grafik 3.1.53 sebagai berikut :

Grafik 3.1.53
Perkembangan Inflasi Tahunan Nasional dan Gorontalo (persen)
Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS dan BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Grafik 3.1.53 tersebut diatas menunjukkan bahwa, pola inflasi Kota Gorontalo fluktuatif bila dibandingkan dengan inflasi nasional dan cenderung dibawah inflasi Nasional. Hal ini terlihat dari laju inflasi tahunan, selama periode tahun 2018 – 2022, dimana terdapat dua periode waktu yang menunjukkan nilai

inflasi Kota Gorontalo lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2021.

Desa Tertinggal yang dientaskan

Pada kondisi kinerja awal periode RPJMD, yaitu tahun 2018 jumlah desa tertinggal di Provinsi Gorontalo tercatat 348 Desa. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan target penurunan berupa pengentasan desa tertinggal menjadi 88 desa di akhir tahun 2022 atau akhir RPJMD, atau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun harus mengentaskan 260 desa tertinggal. Terhadap target yang telah ditetapkan tersebut, di tahun 2018 yang merupakan tahun awal, desa tertinggal tercatat sebesar 348 desa. Dan tahun 2019 desa tertinggal turun menjadi 154 desa. Pada tahun 2020, desa tertinggal tersisa 90 desa. Dan ditahun 2021 desa tertinggal kembali turun menjadi hanya 61 desa. Selanjutnya, di tahun 2022 desa tertinggal tersisa 24 desa.

Dari target akhir RPJMD yang telah ditetapkan masih terdapat desa tertinggal yang harus dientaskan sebesar 88 desa, dengan adanya capaian yang melebihi target selama kinerja 5 tahun, maka desa tertinggal yang harus dientaskan hanya menyisakan 24 desa atau telah berkurang sebesar 64 desa tertinggal di tahun 2022 dari target akhir sebesar 88 desa.




Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian akhir RPJMD atas pengentasan desa tertinggal sebesar 172,73 persen. Dan terhadap masih adanya desa tertinggal di Provinsi Gorontalo tersebut, akan dilakukan intervensi atau pendampingan terhadap Kabupaten/Kota pada periode selanjutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam Pencapaian Pengentasan Jumlah Status "Desa Tertinggal" sesuai Indeks Desa Membangun (IDM), maka perlu ditingkatkan koordinasi dengan seluruh Dinas PMD Kabupaten dan Tenaga Pendamping Profesional khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan memperhatikan regulasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan SDGs Desa serta lebih khusus pada data IDM bidang yang perlu diintervensi. Disamping Dana Desa tentunya perlu dukungan pendanaan baik dari

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam intervensi pembangunan di desa-desa tertinggal tersebut.

Terhadap capaian kinerja indikator kinerja Desa Tertinggal yang di Entaskan, dimana pengukuran capaian kinerja pada indikator ini diukur dengan mengacu pada data IDM (Indeks Desa Membangun). Tabel 3.1.54 dibawah ini akan menggambarkan tentang status desa di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1.54
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Provinsi Gorontalo
Tahun 2022

N O	STATUS DESA						Σ TOTAL
1	MANDIRI	13	2	17	0	12	44
2	MAJU	72	23	86	25	47	253
3	BERKEMBANG	98	52	54	71	61	336
4	TERTINGGAL	8	5	3	5	3	24
5	SANGAT TERTINGGAL	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Klasifikasi Status Desa dapat diketahui dimana terdapat 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni sebagai berikut:

- a. *Desa Mandiri* atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. *Desa Maju* atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

- c. *Desa Berkembang* atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. *Desa Tertinggal* atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. *Desa Sangat Tertinggal* atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Meskipun capaian kinerja ini sangat baik, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini antara lain adalah masih kurangnya komitmen dan para Kepala Desa dalam menginput IDM sesuai target waktu yang ditetapkan.

Upaya ke depan yang dilakukan:

Upaya yang dilakukan dalam mengentaskan desa tertinggal di Provinsi Gorontalo, telah ditempuh dengan intervensi melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Penguatan Kelembagaan BUMDES Kawasan Perdesaan;
4. Peningkatan Kapasitas Kader Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Pendampingan Pengembangan Program Perdesaan.
6. Meningkatkan koordinasi di setiap level mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Tingkat Desa dalam pengisian format data IDM.

Selanjutnya, dibawah ini akan disajikan perbandingan realisasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan Provinsi Gorontalo dan realisasi Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1.55
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Laju Inflasi	5,15	5,51	+
		Desa tertinggal yang di Entaskan	24 desa	9.584 desa	+

Sumber Data : BPS, Kemendes PDTT dan Dinas PMD Adminduk Capil Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Tujuan 6 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang akan dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategis dan akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja, dimana dua

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATKAN AKSES DAN
KUALITAS PENDIDIKAN**

indikator kinerja untuk mencapai tujuan ini merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang telah dituangkan pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya akan disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja untuk tujuan ini sebagai berikut:

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK dan Angka Melek Huruf. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.56
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	78,71%	78,75%	77,30%	77,75%	78,00%	81,49	104,47	78,00%	104,47
2	Angka Melek Huruf	99,44%	99,86%	99,89%	99,87%	100%	99,85	99,85	100 %	99,85

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023

Dari tabel 3.1.56 dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai capaian kinerja sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian dari ke 2 (dua) indikator

kinerja yang ditetapkan memiliki capaian rata-rata diatas 95 persen. Dibawah ini akan digambarkan beberapa capaian kinerja bidang pendidikan Provinsi Gorontalo selama tahun 2019-2021, sebagai berikut:

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

Untuk mengetahui nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK dapat digunakan rumus jumlah penduduk umur 16-18 tahun yang sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dikali 100.

Dewasa ini, peningkatan sumber daya manusia lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk penguasaan pendidikan terutama masyarakat usia sekolah (7-24 tahun). Guna peningkatan mutu/kualitas pendidikan menengah di Provinsi Gorontalo ini, telah dilakukan Perluasan akses pendidikan menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, baik melalui program perluasan akses pendidikan menengah maupun melalui program bantuan operasional sekolah serta program-program pendidikan menengah dan pendidikan khusus lainnya. Selain sarana fisik yang memadai, Kualitas pendidikan juga tak lepas dari ketersediaan tenaga pengajar yang cukup. Rasio murid-guru menjadi salah satu komponen penting dalam menciptakan kualitas kegiatan pengajaran. Standar rasio murid-guru yang baik adalah 20. Provinsi Gorontalo memiliki rasio murid-guru yang baik pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dituntut pula kualitas guru dan tenaga kependidikan yang didorong pula dengan program pembinaan guru dan tenaga kependidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Dan tak kalah penting juga adalah meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan tenaga kependidikan yang non PNS.

Pada tahun 2018, APM SMA/MA/SMK Provinsi Gorontalo sebesar 78,71. Pada tahun 2019, capaian kinerja ini sebesar 102,43 persen. Dimana target di tahun 2019 sebesar 76,88 persen, realisasi sebesar 78,75 persen dan pada tahun 2020, capaian kinerja mencapai 100,06 persen. Pada tahun 2021, target kinerja ditetapkan sebesar 77,63 persen dengan realisasi 77,75 persen atau capaian

sebesar 100,15 persen. Capaian kinerja ini dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 77,30 persen, naik sebesar 0,12 persen. Dan pada tahun 2022, APM SMA/MA/SMK Provinsi Gorontalo dari target yang ditetapkan sebesar 78,00 persen, capaian sebesar 104,47 persen atau realisasi sebesar 81,49 persen. Capaian kinerja di tahun 2022 ini merupakan capaian akhir RPJMD.

Faktor pendukung tercapainya kinerja ini dipengaruhi oleh dukungan peningkatan mutu akses dan tata kelola satuan pendidikan serta inetegrasi dengan seluruh stakeholders serta adanya dukungan berupa program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pihak swasta melalui DAU, DAK, berupa BOS, Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Meubelair, Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian dana PIP (Program Indonesia Pintar), dan PPDB online yang sudah menggunakan sistem zonasi untuk menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan serta pembangunan Fasilitas Penunjang lainnya baik ditingkat SMA, SMK dan Pendidikan Khusus.

Angka Melek Huruf

Selanjutnya, untuk mengetahui dan menggambarkan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan adalah Angka Melek Huruf. Pada tabel 3.1.56 diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 99,85 persen. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 99,87 persen dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 99,98 persen, capaian di tahun 2022 ini turun sebesar 0,02 persen. Tahun 2019 Angka Melek Huruf Provinsi Gorontalo sebesar 99,86 persen, pada tahun 2018 angka melek huruf di Provinsi Gorontalo sebesar 99,44 persen atau naik sebesar 0,42 persen dari tahun 2019. Juga pada tahun 2020 naik mencapai 99,89 persen atau 99,95 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Angka Melek Huruf Provinsi Gorontalo tahun 2022 ini belum mencapai target yaitu 100 persen. Sampai dengan akhir periode RPJMD masih terdapat 0,15 persen target yang belum tercapai.

Angka melek huruf berkaitan langsung dengan pendidikan dasar yaitu mengukur tingkat kemampuan membaca dan menulis. Sejak tahun 2016, kewenangan terhadap pendidikan dasar ini adalah kewenangan pemerintah

Kabupaten/Kota. Tetapi Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah yang memiliki kewenangan atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten /Kota termasuk bidang pendidikan dasar ini, tidak lantas melepas tanggungjawab terhadap keberlangsungan pendidikan dasar di wilayah Provinsi Gorontalo. Olehnya, pemerintah Provinsi Gorontalo senantiasa melakukan upaya-upaya terkait peningkatan melek huruf di Provinsi Gorontalo.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam peningkatan melek huruf antara lain adalah :

1. Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Bappeda untuk pemberian bantuan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Dinas terkait dalam hal ini Bappeda dan Dinas pendidikan Kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan Balai Pengembangan Paud dan pendidikan masyarakat;
3. Dalam hal ini akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kab/kota serta institusi terkait di antaranya Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, pada tabel dibawah ini akan digambarkan perbandingan realisasi kinerja Provinsi Gorontalo dan capaian kinerja Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1.57
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	81,49	61,97	+
		Angka Melek Huruf	99,85	99,35	+

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023

Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung pula oleh pencapaian terhadap sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Angka Kelahiran Total (*fertility rate*). Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 3.1.58
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,5	2,5	2,5	2,36	2,40	2,30	104,17	2,4	104,17

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.58 dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja bidang kesehatan di Provinsi Gorontalo terhadap angka kelahiran total setiap tahunnya mengalami penurunan. Angka kelahiran total (*fertility rate*) di tahun 2021 mencapai 2,36 dari target sebesar 2,45 atau capaian sebesar 103,67 persen. Dibandingkan dengan tahun 2020, dimana angka kelahiran total berada di 2,5, maka capaian di tahun 2021 ini meningkat sebesar 0,14 poin. Dengan turunnya angka kelahiran total ini, berarti kinerja bidang kesehatan juga semakin baik. Selama periode 2000-2022, penurunan angka kematian bayi di Provinsi Gorontalo hampir mencapai 50 persen. Angka kematian bayi menurun signifikan dari 57 per 1000 kelahiran hidup menjadi 29,47 per 1000 kelahiran hidup.

Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) adalah suatu indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah

dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

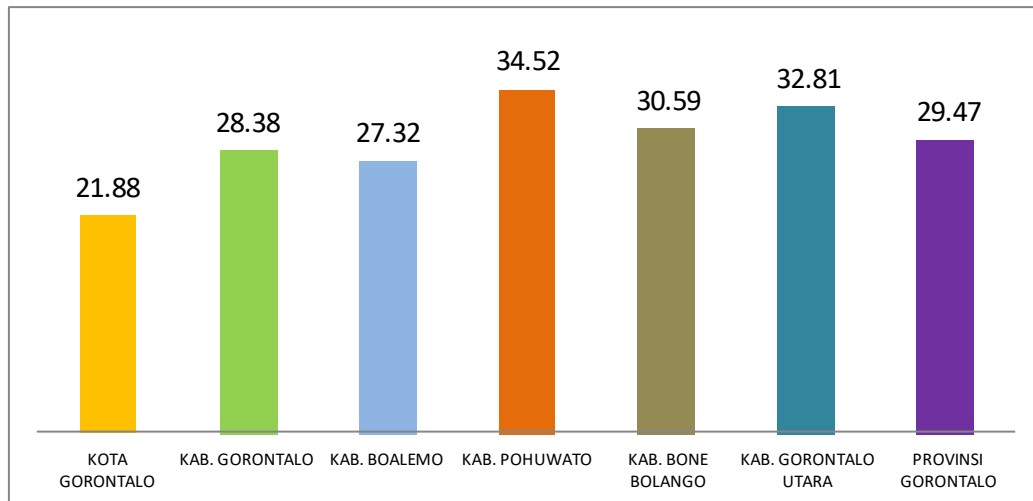
Fertility Total Rate (FTR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita. Banyak faktor yang mempengaruhi FTR yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah tingkat kesehatan yang dapat diwakili dengan angka harapan hidup dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 yang berstatus kawin. Keduanya berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau kelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program-program pelayanan kesehatan masyarakat, program pengendalian penduduk dan program kesehatan masyarakat yang selalu mendukung kinerja bidang kesehatan sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian ibu dan bayi serta dapat mengatur jumlah kelahiran. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus kematian ibu di Provinsi Gorontalo mencapai 220 kematian. Pada tahun 2017 kematian ibu sebesar 43 kematian, di tahun 2018 terdapat 29 kematian ibu, tahun 2019 terjadi 40 kematian, tahun 2020 kasus kematian sebesar 56 dan di tahun 2021 sebesar 52 kematian. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, di tahun 2020 adalah jumlah kematian ibu tertinggi.

Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) dan angka Kematian Balita (AKBa) Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota akan digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Adapun angka kematian Bayi di Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagai berikut:

Grafik 3.1.59
Angka Kematian Bayi di Wilayah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022



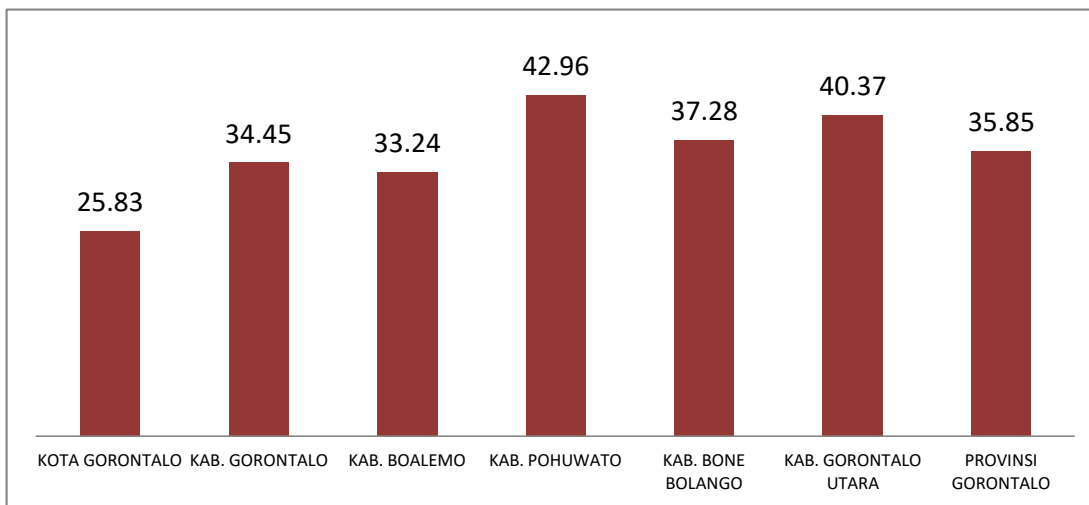
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi Provinsi Gorontalo sebesar 29,47. Sementara Kabupaten Pohuwato mempunyai angka kematian bayi tertinggi yaitu 34,52 dan Kota Gorontalo mempunyai angka kematian bayi terendah yakni 21,88. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

Sementara itu, Angka kematian balita di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 35,85 per 1000 balita, dimana Kabupaten Pohuwato mempunyai angka kematian balita tertinggi yang mencapai 42,96 dan Kota Gorontalo mempunyai angka kematian balita terendah yaitu sebesar 25,83. Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka kematian balita akan digambarkan pada grafik di bawah ini Adapun penyebab kematian bayi dapat di lihat pada gambar di bawah ini sebagai berikut:

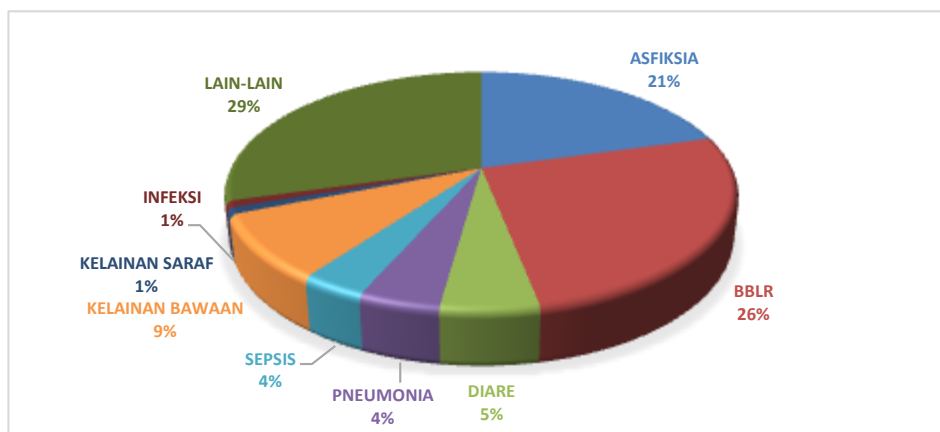
Grafik 3.1.60
Angka Kematian Balita di Wilayah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Adapun beberapa faktor penyebab kematian bayi di Provinsi Gorontalo selama tahun 2021 hingga tahun 2022 sebagai berikut:

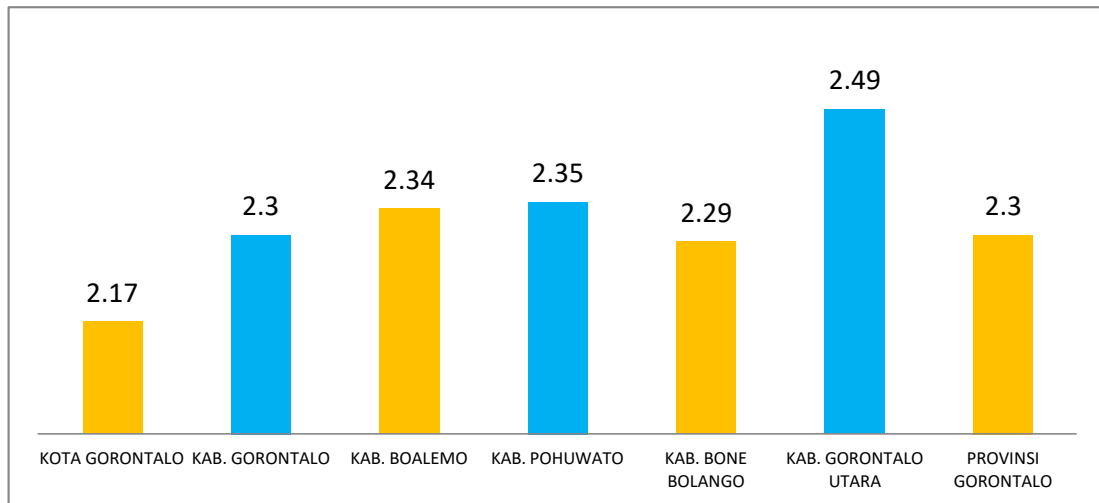
Gambar 3.1.61
Penyebab Kematian Bayi di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-22



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2022

Sementara itu, Angka Kelahiran Total (*Fertility Rate*) di Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2022 dapat di lihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.1.62
Angka Kelahiran Total di Wilayah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Dari grafik 3.1.62 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Kabupaten/Kota dengan Angka Kelahiran Total atau Total *Vertility Rate* (TFR) di atas angka provinsi lebih banyak dibandingkan yang berada di bawah angka provinsi. TFR di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berada di bawah 3. TFR tertinggi adalah di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sebesar 2,49, sementaraa TFR terendah berada di Kota Gorontalo yaitu sebesar 2,17.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya TFR atau Total *Vertility Rate* adalah jumlah dari angka kelahiran menurut kelompok umur, dan merupakan ringkasan ukuran dari tingkat fertilitas. Angka ini menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya. Dari data pada grafik 3.2.33 diatas dapat diketahui untuk TFR Provinsi Gorontalo sebesar 2,30 yang berarti hanya ada sekitar 2 anak saja yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya, begitupun dengan Kabupaten/Kota.

Meskipun angka TFR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya terus menurunkan TFR di provinsi Gorontalo sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan KB yang disebabkan karena tidak adanya pemetaan oleh pelaksana program KB lini lapangan terkait ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- b. Kurangnya tenaga lini lapangan yang tidak sesuai dengan rasio yang ditetapkan;
- c. Kekurangan provider di Kabupaten/Kota untuk pelayanan KB MKJP (IUD, Implan, MOW dan MOP);
- d. Dinamika pengelola program di Kabupaten/Kota yang terus berganti.

Langkah dan Upaya ke depan yang akan di tempuh.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan kenaikan TFR sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pembinaan KB dan pengendalian penduduk melalui koordinasi dengan institusi yang bertanggungjawab terhadap pengendalian penduduk di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo terkait peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga);
- b. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) reproduksi dan KB sesuai dengan kearifan budaya local;
- c. Melakukan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, akan adalah perbandingan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi Nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.1.63
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	1	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,30	2,45	+

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Pencapaian tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo didukung pula oleh pencapaian terhadap sasaran strategis Terwujudnya

**SASARAN STRATEGIS :
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN
BUDAYA DAN IMAN DAN TAQWA
(IMTAQ)**

Pembangunan Budaya dan Imtaq. Indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran ini adalah Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional dan Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk. Capaian kinerja

dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.64
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	8 jenis	7 jenis	1 jenis	7 jenis	3 jenis	4 jenis	133,33	15 jenis	180,00
2	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0,22	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	100	0,25	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.64 dapat diketahui bahwa sasaran strategis terwujudnya pembangunan budaya dan iman dan taqwa (Imtaq) di Provinsi Gorontalo tahun 2022 mendapatkan kriteria penilaian sangat tinggi dengan kode warna hijau tua, atau capaian 100 persen. Capaian kinerja akhir RPJMD terhadap Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional sebesar 180,00 persen dimana dari target akhir RPJMD sebesar 15 jenis, capaian sampai dengan akhir RPJMD (selama 5 tahun) sebesar 27 jenis warisan budaya. Target akhir RPJMD merupakan target kinerja akumulasi selama periode RPJMD. Sementara itu, terhadap capaian kinerja tahun 2022 sebesar 133,33 persen dari target kinerja

yang ditetapkan sebesar 3 jenis warisan budaya dengan realisasi sebesar 4 jenis warisan budaya yang mendapatkan pengakuan Nasional. Selanjutnya, rasio tempat ibadah per satuan penduduk capaiannya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,25 atau capaian sebesar 100 persen.

Penetapan indikator kinerja ini dalam rangka mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Budaya dan Keagamaan yang lebih semarak. Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak, lebih membudaya di seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pelestarian warisan budaya daerah adalah dengan penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang menampilkan budaya daerah pada ajang Nasional maupun Internasional. Juga guna mempertahankan hak milik atas warisan budaya Gorontalo tersebut. Sebagai gambaran singkat, akan diuraikan tentang warisan budaya gorontalo sebagai berikut :

“Sebagai salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo memiliki aneka ragam kesenian daerah baik tari, lagu, rumah adat, dan pakaian adat. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen penuh terhadap pelestarian seni dan budaya peninggalan leluhur Daerah Gorontalo. Provinsi Gorontalo yang dijuluki Serambi Madinah dengan menjunjung adat Gorontalo tentu sangat mengedepankan budaya lokal dalam setiap penyelenggaraan pembangunan di daerah. Olehnya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian seni dan budaya banyak mendapat perhatian pemerintah. Gorontalo memiliki warisan budaya dalam bentuk tarian antaranya adalah tari dana-dana yang merupakan tari pergaulan remaja Gorontalo. Budaya Gorontalo yang masih lestari antara lain adalah tahapan pada pernikahan adat yang dimulai dari Mopoloduwo rahasia, Tolobalango, Depito Dutu, Mopotilandahu, Tari Saronde, Akad Nikah. Budaya Gorontalo lainnya adalah tujuh bulanan atau dalam bahasa Gorontalo Tondhalo, Aqiqah, Khitanan dan Beat, Sapaan Atau Toli, Tumbilotohe, Meriam Bambu (dalam bahasa Gorontalo Bunggo) dan Walima. Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang memiliki adat istiadat dan warisan budaya yang sangat beragam. Dan untuk melestarikan warisan budaya tersebut, sehingga nantinya diakui ditingkat Nasional bahkan Internasional, maka dilakukan Pemberdayaan Pelaku Budaya Dalam Melestarikan Kebudayaan serta Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Akan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya melalui program Program Pembinaan Kebudayaan”.

Sejak tahun 2018 dimana merupakan awal dari pelaksanaan RPJMD 2017-2018, dimana pada tahun 2018, tercatat ada 8 (delapan) jenis Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Provinsi Gorontalo yang memperoleh pengakuan Nasional yaitu :

1. Budaya Dikili yaitu budaya masyarakat Gorontalo yang berupa doa dan zikir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W yaitu pada malam tanggal 12 Rabbi'ul awal;
2. Bandayo poboide yaitu Rumah adat Gorontalo;
3. Budaya Tolobalango yaitu prosesi peminangan oleh keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita;
4. Budaya Momeati yaitu prosesi pembeatan adalah suatu upacara adat untuk remaja putri yang telah memasuki masa remaja;
5. Budaya Momuhuto yaitu siraman bagi anak gadis yang memasuki masa akhil balik;
6. Budaya Me'raji yaitu prosesi peringatan Isra' Mi'raj yang biasanya dilakukan malam tanggal 27 Rajab;
7. Budaya Molalunga yaitu prosesi pemakaman;
8. Budaya Pulanga yaitu pemberian gelar adat dari dewan adat Gorontalo bersama lembaga adat 5 kerajaan yang ada di Gorontalo kepada putra-putri terbaik bangsa.

Pada tahun 2019, pemerintah pusat kembali mengakui 7 WBTB yang berasal dari daerah Gorontalo. 7 WBTB tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upiya Karanji yaitu Peci Anyam Rotan Khas Gorontalo berwarna natural atau coklat yang merupakan 100 persen produk Khas Gorontalo yang terbuat dari akar pohon mintu. Sedangkan bahan bakunya hanya terdapat di pedalaman hutan Gorontalo.



2. Molonthalo yaitu upacara adat selamat yang menandai tujuh bulan usia kehamilan. Upacara adat molonthalo dilaksanakan bukan saja hanya sebagai sebuah tradisi yang telah baku dan harus dilestarikan, lebih dari itu diyakini sebagai sebuah upacara yang sakral atas dasar wujud pencarian keberkahan akan hadirnya anggota keluarga baru.



3. Mohuntingi yaitu upacara gunting rambut sebagai salah satu jenis budaya daerah Gorontalo yang pelaksanaan upacara pada hari ketujuh kelahiran bayi, disunnahkan untuk memotong rambut si bayi.



4. Tidi Lo O'ayabu yaitu Tarian Tradisional Gorontalo senantiasa berpijak pada pola-pola tradisi Gorontalo. Tari Tidi merupakan tarian klasik Gorontalo yang berkembang pada abad ke 17 dan 18 di kalangan istana, yaitu raja-raja dan kaum bangsawan, yang memiliki kristalisasi artistik yang tinggi dan telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang sehingga memiliki nilai Tradisional. Tidi berarti tari, Kata tidi menguatkan bahwa tarian ini merupakan jenis tarian klasik.



5. Ilabulo yaitu makanan tradisinal khas Gorontalo yang merupakan sajian tepung sagu yang berisi campuran telur ayam, ati ampela, daging ayam dan sapi, lalu dibumbui rempah dan dibungkus daun pisang. Setelah dibungkus lalu direbus dan bisa juga dibakar sesuai selera para penikmat kuliner.



6. Tili'aya yaitu merupakan salah makanan khas Gorontalo yang menjadi santapan khas malam pertama sahur masyarakat Gorontalo tempo dulu. Kue yang terbuat dari capuran gula merah, telur, dan santan ini hanya dijadikan menu makan sahur saja. Kue tili'aya sengaja dibuat oleh orang Gorontalo terdahulu berfungsi sebagai penahan dahaga ketika awal puasa di mana banyak orang yang kesulitan menahan rasa haus dan lapar yang amat sangat. Pada acara adat biasanya tili'aya disajikan sebagai lauk atau pelengkap nasi dan makanan berat lainnya. Tiliaya biasanya disajikan pada saat pelaksanaan Tahlilan, Tiliaya diletakkan di dekat nasi kuning dan jadi rebutan usai tahlilan. Waktu lain untuk menyantapnya adalah pada saat upacara adat atau pada saat Ramadhan.



7. Tapa tonggo adalah salah satu permainan tradisional masyarakat Gorontalo.

Tapa berarti tendang dan Tonggo berarti jongkok. Permainan ini dikenal pada masa pemerintahan kerajaan Suwawa abad ke 14. Tapa Tonggo sebagai salah satu olahraga tradisional masyarakat, hal ini sesuai dengan penggalan pengamatan pemenuhan persyaratan sebagai salah satu olahraga tradisional yang perlu dimasyarakatkan.



Pada tahun 2020, jumlah warisan budaya yang memperoleh pengakuan Nasional sebanyak 1 jenis dari target yang ditetapkan sebanyak 3 jenis warisan budaya. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan 10 warisan budaya gorontalo untuk memperoleh pengakuan Nasional/Internasional.

Dari 10 jenis yang diusulkan di tahun 2020, hanya 1 jenis warisan budaya yang ditetapkan, hal ini disebabkan adanya pandemic covid-19 sehingga tim evaluasi atas keberadaan warisan budaya tidak bisa berkunjung ke daerah gorontalo. 1 (satu) jenis warisan budaya yang ditetapkan di tahun



2020 tersebut adalah Turunani. Istilah Turunani berasal dari kata *tarana nama ya tara* yang berarti syair yang dilagukan dan berdendang. Syair – syair Turunani merupakan syair – syair yang di susun oleh para sufi sebagai ahli tasawuf berbahasa arab dan menggunakan alat musik rabana yang di gunakan sebagai pengiring. Syair turunani meriwayatkan garis keturunan atau silsilah Nabi Muhammad saw. Dalam pelaksanaannya sebagai bagian dari kesenian yang

bernuansa Islami maka Turunani menggunakan alat musik seperti rebana. Fungsi turunani yaitu selain untuk hiburan dan memeriahkan pesta, juga dikaitkan dengan harapan mendapat berkah dari Allah Yang Maha Esa. Amanat utama ialah mengelukan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya.

Turunani di Gorontalo sering dijumpai atau selalu dihadirkan pada beberapa upacara adat, baik dalam upacara adat penobatan, aqiqah, khitanan, maupun upacara adat pernikahan, yang dilangsungkan pada pagi hari, siang, sore, dan malam hari, tergantung dari konteks upacara adat yang dilaksanakan. Terkait dengan bentuk penyajian turunani dalam kebudayaan Masyarakat Gorontalo memiliki perbedaan antara satu upacara dengan upacara adat lainnya khususnya dalam upacara adat Pernikahan. Turunani selain melantukan syair berbahasa arab, di dalamnya juga memiliki syair – syair berbahasa Gorontalo.

Selanjutnya di tahun 2021, warisan budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan budaya Nasional yaitu : 1). Tidi lo tihu'o, 2). tidi lo maluo, 3). tidi daa, 4). tahuda, 5). leningo, 6). dana-dana, dan 7). buruda. Dari ke tujuh warisan budaya tersebut diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

➤ Tari tidi lo tihu'o.



Tari tidi merupakan tarian khas Gorontalo dimana kata tidi sendiri berarti tari. Dari mulai busana, formasi tarian dan properti yang digunakan semuanya mengandung nilai moral sehingga tarian ini tidak boleh diubah ubah.

➤ Dana dana.



Dana dana adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Gorontalo. Tarian ini termasuk jenis tarian pergaulan masyarakat yang biasanya ditampilkan oleh penari pria maupun penari wanita. Selain itu, tarian ini juga merupakan perpaduan budaya Islam dan budaya masyarakat setempat. Ini terlihat dari gerakan penari dan pengiringnya. Tari Dana Dana merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Gorontalo dan sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti penyambutan, perayaan hari besar, dan lain-lain.

Pada tahun 2022, WBTP Provinsi Gorontalo yang ditetapkan sebanyak 4 jenis warisan budaya yaitu:

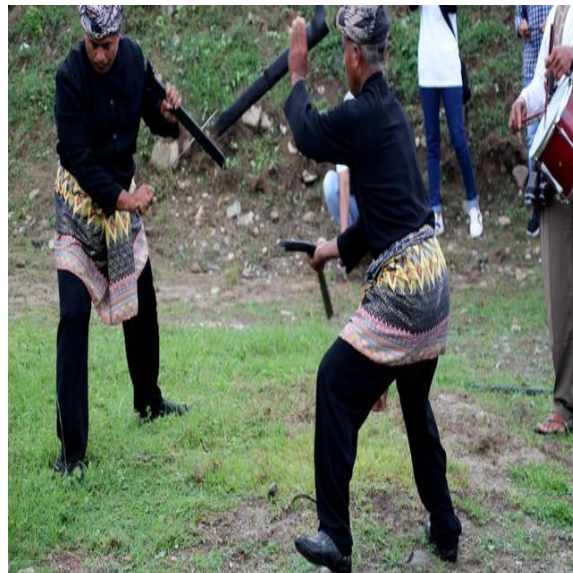
1. Amongo atau tikar khas Gorontalo. Pada Masyarakat Gorontalo tikar sangat berperan penting. Salah satunya untuk tata cara atau prosesi adat Molonthalo, 7 bulanan bagi ibu yang mengandung. Anyaman yang digunakan dalam adat ini tanpa warna. Tikar ini dibuat dari anyaman daun pandan duri atau pandan samak yang tumbuh liar, tanaman ini disebut juga sebagai pandan pudak (*Pandanus tectorius*).

Gambar 3.1.65
Upaya pelestarian budaya Amongo (tikar Khas Gorontalo)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

2. Longgo adalah seni bela diri tradisional khas Gorontalo. Jika Betawi punya silat Beksi, Gorontalo punya Longgo dan Langga. Seni bela diri unik ini konon menyebar dan berkembang sejak abad ke-16, bersamaan dengan masuknya agama Islam ke wilayah. Langga sebutan untuk bela diri tanpa senjata, sedangkan Longgo adalah bela diri dengan menggunakan senjata tajam. Seni bela diri Longgo sangat unik lantaran gerakannya berkaitan erat dengan aktivitas sehari-hari. Longgo merupakan seni bela diri tradisional Gorontalo, yang diperkaya dengan budaya gerak, yang berkaitan dengan upacara adat serta beberapa aktivitas sehari-hari, seperti memanjat pohon kelapa, berkebun, menyeberang sungai, dan lain sebagainya. Seni bela diri ini pertama kali dibawa



oleh seorang ulama besar sekaligus pejuang pada masa penjajahan Belanda di tanah Gorontalo.

3. *Wunungo* adalah tradisi Gorontalo yaitu kegiatan membaca Alqur'an dalam Bahasa Gorontalo. *Wunungo* dalam Bahasa Gorontalo adalah pembacaan syair-syair yang mengandung petuah dan nasihat. Diperkirakan, tradisi kuno ini sudah ada sejak abad ke-18. Pada masa tersebut, masyarakat Gorontalo sudah banyak yang menganut agama Islam dan menghafal Alquran.
4. *Mongubingo* adalah tradisi sunat perempuan. Yaitu merupakan upacara yang mengawali siklus kehidupan perempuan suku Gorontalo dari awal hingga akhir yang sifatnya mengatur tatanan nilai kehidupan manusia.

Gambar 3.1.66
Tradisi *Wunungo* dan *Mongubingo* di Gorontalo



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

Dengan ditetapkannya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebesar 27 jenis selama kurun waktu 5 (lima) tahun, maka digarapkan tidak ada lagi pihak lain yang akan mengklaim warisan budaya Gorontalo tersebut. Untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat proses dan tahapan yang dilalui cukup panjang. Mulai dari proses kajian ilmiah, narasi pendukung, video dan dokumentasi serta

sidang paparan oleh masing-masing daerah dengan menyertakan maestro serta tokoh budaya lainnya untuk memperkuat usulan WBTB sebagai warisan budaya yang ada di Gorontalo. Penetapan pengakuan atas WBTB diberikan melalui sidang penetapan WBTB. Potensi kebudayaan harus terus dilestarikan pada era milenial seperti saat ini, agar tidak punah, harus terus dijaga.

Budaya daerah adalah budaya yang menggambarkan keadaan dan sifat di setiap daerah. Mengabaikannya bukan termasuk cara melestarikan budaya daerah di sekitar kita. Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya. Maksud dari melestarikan budaya yang dilakuakn oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah agar nilai-nilai luhur budaya, yang ada di dalam tradisi Gorontalo ini dapat tetap dipertahankan, meskipun telah melalui proses perubahan bentuk budaya.

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Selanjutnya, untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas iman dan taqwa, maka ditetapkan indikator rasio tempat ibadah persatuan penduduk. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk adalah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk. Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pencapaian terhadap indikator ini khusus untuk pemeluk agama mayoritas yang ada di Provinsi Gorontalo yaitu Islam. Sehingga rasio yang dihasilkan ini adalah rasio terhadap jumlah pemeluk islam dengan jumlah mesjid yang telah ada. Untuk mengetahui rasio tempat ibadah per satuan penduduk, digunakan rumus :

$$\text{Rasio Mesjid} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Islam}}{\text{Jumlah Masjid}} \times \text{Satuan Penduduk Yang Ingin dicari}$$

Pada tahun 2022, Jumlah Penduduk pemeluk agama Islam di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 1.169.597 jiwa dan Jumlah Masjid adalah 3.009 mesjid. Dengan data dan rumus tersebut, dapat dihitung rasionya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Masjid} = \frac{1.169.597}{3.009} \times 1$$

$$\text{Rasio Masjid} = 389 \times 1$$

$$\text{Rasio Masjid} = 1 : 389 \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa 1 Masjid digunakan oleh 389 penduduk muslim/yang beragama islam atau rasio sebesar 0,25, (*sumber data : BPS Provinsi Gorontalo dan Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo tahun 2023/diolah*).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung peningkatan terhadap capaian kinerja ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah tempat ibadah dengan pemberian bantuan dana hibah;
2. Meningkatkan jumlah bantuan dana hibah pembangunan tempat ibadah;
3. Mempercepat proses pencarian bantuan dana hibah pembangunan tempat ibadah;
4. Proses seleksi calon tempat ibadah penerima bantuan dana hibah agar tepat sasaran.

Pada tabel 3.1.67 dibawah ini akan digambarkan tentang jumlah pemeluk agama dan jumlah tempat ibadah di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.1.67
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

NO	AGAMA	JUMLAH PEMELUK	SARANA IBADAH	JUMLAH SARANA	RASIO
1	ISLAM	1.169.597	MASJID	3.009	0,25
2	PROTESTAN	16.477	GEREJA PROTESTAN	146	0,89
3	KATOLIK	1.936	GEREJA KATOLIK	26	1,35
4	HINDU	3.874	PURA	31	0,80
5	BUDHA	952	VIHARA	3	0,32

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

Selanjutnya, Pada tabel 3.1.68 dibawah ini akan digambarkan tentang jumlah pemeluk agama Islam dan jumlah mesjid di Provinsi Gorontalo pada kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1.68
Jumlah Pemeluk Agama Islam dan Jumlah Mesjid di Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pemeluk Islam	Orang	1.136.626	1.141.752	1.170.793	1.169.597	1.169.597
2.	Jumlah Mesjid	Buah	2.272	2.580	2.476	2.669	3.009
3.	Rasio Mesjid per Penduduk	Satuan	1:504	1:443	1:473	1:438	1:389
4.	Rasio		0,20	0,23	0,21	0,23	0,25

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dan Biro Pemerintahan dan Kesra Tahun 2023

Dari tabel 3.1.68 tersebut diatas dapat di lihat bahwa rasio mesjid persatuan penduduk adalah 1:389 atau dengan kata lain, 1 mesjid akan digunakan oleh 389 orang atau rasio sebesar 0,25.

Target kinerja ini akan terus ditingkatkan dan salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan Jumlah Tempat Ibadah adalah meningkatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan tempat ibadah khususnya mesjid serta mempercepat proses pencairan bantuan dana hibah pembangunan tempat ibadah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Kendala tersebut antara lain adalah masih ada pihak rumah ibadah yang tidak melakukan proses pencairan hibah hingga batas akhir yang diberikan, padahal dengan adanya dana hibah tersebut akan membantu mewujudkan tempat ibadah yang memadai.

Langkah kedepan yang akan ditempuh:

Solusi untuk tahun mendatang yaitu untuk setiap penerima hibah akan dihubungi secara intens untuk melakukan proses pencairan dana hibah bantuan rumah ibadah.



Tujuan 7 : Penurunan Angka Kemiskinan

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Penurunan Angka Kemiskinan yang dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dan diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Dimana untuk sasaran pertama yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Angka Kemiskinan, telah di analisis dan dijelaskan sebelumnya.

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis terhadap sasaran kedua dari tujuan Penurunan Angka Kemiskinan yaitu Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman.

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT
TERHADAP AIR MINUM, SANITASI YANG
LAYAK DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Pencapaian tujuan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo didukung pula oleh pencapaian terhadap sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman. Indikator kinerja yang mendukung

pencapaian sasaran ini adalah Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak, Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak dan Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.69
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	82,53 %	86,43 %	85,54%	81,35%	83,02%	14,05%	16,92	83,02%	16,92

2	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	77,93 %	76,71 %	92,92%	81,25%	69,41%	0%	0	69,41%	0
3	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	80 %	24,77 %	18%	22%	20%	20%	100	0 %	100

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Pada tabel 3.1.69 diatas, digambarkan bahwa penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan permukiman, belum mencapai target yang diinginkan. Dari target yang ditetapkan, penurunan luas kawasan kumuh dengan capaian 100 persen yang ditandai dengan warna "hijau tua".

Salah satu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan adalah terpenuhinya akses air minum dan tersedianya sanitasi yang layak. Untuk mendukung capaian kinerja ini, maka telah ditempuh dengan melaksanakan program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi dengan kegiatan pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih pada Rumah tangga miskin sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatannya.

Sebagaimana yang telah digambarkan pada tabel 3.1.69 diatas, bahwa di tahun 2018, pelayanan terhadap air minum yang layak mencapai 82,53 persen dan sanitasi layak sebesar 77,93 persen. Tahun 2019 kinerja persentase cakupan akses air minum yang layak sebesar 86,43 persen dan persentase cakupan akses sanitasi layak sebesar 76,71 persen, dan di tahun 2020 sebesar 85,43 persen untuk cakupan akses air minum yang layak dan 92,92 persen untuk cakupan akses sanitasi layak. Dan pada tahun 2021 terhadap kinerja cakupan akses air minum layak, dari target sebesar 81,00 persen, realisasi mencapai 81,35 persen atau capaian kinerja sebesar 100,43 persen. Sementara kinerja cakupan akses sanitasi layak, capaian sebesar 119,99 persen dari target kinerja sebesar 67,71 persen dengan realisasi sebesar 81,25 persen. Pencapaian cakupan layanan akses air minum dan sanitasi yang layak di tahun 2019 sangat maksimal dari target yang

ada. Begitu pula capaian kinerja di tahun 2020 capaiannya sangat baik begitupun capaian di tahun 2021. Pencapaian ini tidak lain karena kolaborasi pendanaan melalui alokasi anggaran APBN dan alokasi DAK Kabupaten/Kota. Selain itu juga koordinasi yang intensif dan sinergitas program antara pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/Kota sangat mempengaruhi pencapaian target kinerja ini. Pencapaian kinerja air minum dan sanitasi layak tahun 2021 dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak. Dalam mencapai tujuan penurunan angka Kemiskinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak. Ditetapkannya indikator ini adalah karena penyediaan akses air minum dan sanitasi ini menjadi prioritas Nasional. Sebab setiap orang berhak atas air yang cukup, berkelanjutan, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Salah satu indikator negara maju adalah penyediaan air minum dan sanitasi aman. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 mengatur penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Untuk mendukung capaian kinerja ini, maka telah ditempuh dengan melaksanakan program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi dengan kegiatan pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih pada Rumah tangga miskin sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pelaksanaannya sebagian besar oleh Kabupaten/Kota.

Terkait air minum dan sanitasi layak dalam RPJMD 2017-2022 untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum capaian akses air minum layak perpipaan masih dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, sementara Provinsi Gorontalo belum melaksanakan secara optimal. Capaian kinerja di tahun 2022 ini hanya 16,92 persen untuk cakupan akses air minum yang layak dan 0 persen cakupan akses sanitasi layak. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional sebagai wadah pengelolaan air minum. Rencana pembangunan SPAM Regional di Provinsi Gorontalo yaitu pada tahun 2025. Saat ini masih dalam tahapan penyediaan

data/dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), DED, FGD, dan JAKSTRADA.

Demikian juga terhadap penyediaan sanitasi layak, permasalahannya adalah belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional di Provinsi Gorontalo. Dimana limbah merupakan persoalan yang terus berlanjut diberbagai sektor dalam hal ini terkait dengan sanitasi yaitu bagian dari sistem pembuangan air limbah, yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga, dapat juga dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan dan rumah sakit (sektor kesehatan). Dalam upaya penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat, tentulah terlebih dahulu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ini terlebih dahulu harus tersedia. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berakibat terjadi berbagai masalah pencemaran yang akan merugikan masyarakat.

IPAL memiliki manfaat untuk semua komponen yang ada di area instalasi. Bukan hanya berguna untuk manusia, bangunan, tetapi juga makhluk hidup lain yang tinggal di kawasan tersebut. IPAL juga bermanfaat untuk mengelola limbah terutama yang mengandung zat kimia atau racun berbahaya agar ketika dibuang tidak mencemari sekitarnya. IPAL juga bermanfaat mengelola cairan limbah baik industri maupun domestik agar dapat digunakan kembali dan manfaat selanjutnya adalah melindungi ekosistem dan makhluk hidup yang tinggal di sungai atau saluran pembuangan lainnya. Olehnya, IPAL sangat dibutuhkan untuk mendukung penyediaan sanitasi layak bagi masyarakat.

Di tahun 2022, penyediaan air minum dan sanitasi layak belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan beberapa kendala.

Upaya kedepan untuk mengoptimalkan kinerja ini adalah:

- Membangun/memanfaatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, yang sampai dengan tahun 2022 ini sudah masuk pada tahap penyediaan data, dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Detail Engineering Design (DED), pelaksanaan FGD studi kelayakan dan Jakstrada yaitu kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.

- Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional di Provinsi Gorontalo yakni sarana untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, dari air cuci/kamar mandi).

Penurunan Luas Kawasan Kumuh

Indikator selanjutnya yang di gambarkan pada tabel 3.1.69 diatas adalah luas kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo pada akhir RPJMD yaitu sebesar 0 persen atau target penurunan kawasan kumuh di tahun 2022 sebesar 20 % tercapai 100 persen.

Dengan kondisi 109 Ha target capaian penanganan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo sesuai dengan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, maka Provinsi Gorontalo mempunyai kewajiban untuk menuntaskan/menurunkan kawasan kumuh seluas 109 Ha tersebut atau dalam persentase sebesar 0 persen. Kawasan kumuh diakhir tahun RPJMD atau capaian 100 persen. Untuk pencapaian kinerja penurunan luas kawasan kumuh pada tahun 2018 adalah dari 100 persen kawasan kumuh menurun menjadi 80 persen luasan kawasan kumuh. Dan di tahun 2019, luas kawasan kumuh menurun menjadi 25,00 persen dan pada tahun 2020 dengan penurunan luas kawasan yang dapat ditangani sebesar 18 persen atau seluas 20 hektar. Capaian ini sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap penurunan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo sebesar 43 persen atau 47 hektar.

Pada tahun 2021, penurunan kawasan kumuh mencapai 22 persen dari target sebesar 20 persen. Setiap tahun capaian kinerja terhadap persentase penurunan luas kawasan kumuh tercapai sesuai dengan kewenangan provinsi. Capaian kinerja s.d tahun 2021 terhadap persentase penurunan luas kawasan kumuh telah menurun sebesar 65 persen, dimana proyeksi capaian kinerja sampai dengan akhir tahun RPJMD telah menurun 100 persen dengan target kinerja tahun 2022 (akhir tahun RPJMD) sebesar 35 persen atau 0 persen kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo dengan luas sasaran kawasan kumuh yang ditangani selama 5 tahun seluas 109 hektar. Dan hal itu telah tercapai dimana pada tahun 2022 ini

luas kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo dari target 109 hektar sudah di tuntaskan selama 5 tahun menjadi 0 hektar atau mencapai 100 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan:

Terhadap Penurunan Luas Kawasan Kumuh, telah ditempuh melalui Program Pemerintah yaitu Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan provinsi dan Program Peningkatan Kawasan Permukiman. Juga didukung oleh Kegiatan Pembangunan Peningkatan Prasarana/Sarana Kawasan Permukiman dengan target lokasi Desa Piloliyanga, Kabupaten Boalemo dan Desa Hungayonaan, Kabupaten Boalemo.

Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya preventif melalui pembinaan, sosialisasi dan advokasi sadar kumuh yang dilaksanakan diseluruh Kabupaten di Provinsi Gorontalo utamanya di desa-desa yang memiliki dampak lingkungan kumuh.

Kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apalagi di Provinsi Gorontalo masih memiliki masalah yang cukup pelik dalam penanganan masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Tentu saja bukan hanya di Provinsi Gorontalo yang memiliki masalah semacam ini. Banyak daerah-daerah lain yang juga berkutut dengan masalah kemiskinan, bahkan mungkin lebih parah dari Gorontalo. Penyebab kemiskinan begitu beragam dalam berbagai daerah. Bahkan masalah kemiskinan seperti ketersediaan kebutuhan pokok merupakan faktor yang sangat krusial yang dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk mengetahui dan mempelajari lagi tentang permasalahan kemiskinan ini. Hal ini juga biasanya ditentukan oleh pemerintah melalui penetapan garis kemiskinan yang ditentukan dengan ekonomi. Karena tingkat kesejahteraan masyarakat

ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah.

Selanjutnya, pada tabel dibawah ini akan sajikan perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo atas sasaran strategis Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum , Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman dengan realisasi Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1.70
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum , Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	1	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	16,92%	91,05%	-
		2	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	0%	80,92%	-
		3	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	20%	-	-

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2023



Tujuan 8 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah yang terakhir adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang dijabarkan dalam sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Dimana untuk indikator pertama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, telah di analisis dan dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Pada tahap ini, akan dilakukan analisis terhadap indikator kedua dari sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yaitu Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

**SASARAN STRATEGIS :
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN
Pemerintahan yang BAIK dan
BERSIH**

Indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja dan analisis serta evaluasinya akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1.71
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian s.d Akhir RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari tabel 3.1.71 diatas dapat dilihat bahwa opini laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak Tahun 2018 hingga tahun 2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Target kinerja Opini Keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017 - 2022 adalah WTP. Sebagai dasar pemberian opini atau pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yaitu 1) Kesesuaian; 2) Kecukupan; 3) Kepatuhan; 4) Efektivitas. Untuk memenuhi capaian target WTP beberapa hal yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Membangun komitmen daerah;
2. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK;
3. Membuat rencana aksi dan membentuk tim;
4. Mengantisipasi temuan baru tahun berjalan;
5. Mengaktifkan SPI (Sistem Pengendalian Intern);
6. Dukungan Regulasi (SAK/SIMBADA);
7. Dukungan IT Memadai;
8. Mengoptimalkan Peran APIP;
9. Meningkatkan Kualitas SDM;
10. Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
11. Dukungan Anggaran.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari temuan yang berulang adalah sebagai berikut:

- Menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- Komitmen bersama;
- Penguatan pengendalian dan manajemen risiko;
- Monitoring evaluasi dilakukan secara berkala dan disiplin;
- Sistem dan mekanisme tindak lanjut harus memadai;
- Dibutuhkan komunikasi yang intens dan sinergitas antar entitas keuangan.

LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo disusun berbasis akrual yaitu LKPD yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komponen LKPD disusun dengan mengacu pada regulasi dimaksud harus memenuhi komponen laporan keuangan pemerintah

terdiri dari pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Selanjutnya, akan diuraikan kunci sukses Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendapatkan kewajaran atas laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK yaitu sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 (untuk tahun 2022 adalah WTP atas LKPD tahun 2021), sebagai berikut:

- ✚ Melakukan opname Kas dan pencocokan dengan Silpa;
- ✚ Konfirmasi/inventarisasi piutang;
- ✚ Stock opname setiap akhir tahun khususnya terhadap SKPD yang memiliki persediaan signifikan;
- ✚ Inventarisasi dan penilaian aset tetap dan rekonsiliasi dengan daftar aset tetap;
- ✚ Disclosure atas segala hal material yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam menjalankan komitmen tersebut, dapat tergambar pula dalam prestasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah dimana selama sepuluh tahun berturut-turut, Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian tersebut adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan terlebih lagi di tahun 2014, 2016 dan 2018 menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh daerahnya meraih WTP atas Laporan Keuangannya (100 persen) dan pada tahun 2022 Provinsi Gorontalo kembali memperoleh opini WTP.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Catatan informasi keuangan suatu daerah pada tahun tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja atas alokasi anggaran daerah yang diperoleh. Capaian kinerja atas penyelenggaraan keuangan daerah atau penggunaan anggaran pada Pemerintah Provinsi Gorontalo terus ditorehkan, hal ini dapat terwujud salah satunya adalah karena adanya

komitmen yang tinggi untuk melaksanakan rencana aksi dan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan BPK.

Capaian opini WTP 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ini membuktikan bahwa tetap terbangunnya kualitas pertanggungjawaban LKPD pemerintah daerah dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dalam mengelola tata keuangan yang baik walaupun menghadapi situasi yang tidak terduga di tahun 2021 sampai tahun 2022 akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, setelah opini WTP diraih, apa manfaatnya bagi masyarakat. WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo didapat melalui proses yang panjang. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan atau penatausahaan, dan pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran. Laporan keuangan berperan sebagai pintu akhir dalam siklus anggaran. Pada tahap pelaksanaan anggaran dilakukan berbagai kegiatan pemerintahan berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang tentunya untuk mendukung program pemerintahan. Anggaran yang dibelanjakan tersebut diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat Gorontalo sehingga menghasilkan pengaruh yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, pencapaian opini WTP merupakan sarana keterbukaan informasi kepada publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Capaian opini WTP diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menarik investor. Dengan tertariknya investor untuk menanamkan modalnya diharapkan pendapatan asli daerah dapat bertambah sehingga kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, opini WTP yang diraih merupakan salah satu kriteria utama pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Kriteria lainnya dalam pemberian DID yaitu penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, pengadaan barang/jasa secara elektronik, aplikasi penganggaran berbasis elektronik, dan ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu. Dimana di tahun 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang menetapkan APBD tepat waktu.

Selanjutnya, opini WTP bermanfaat dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik. Opini WTP diberikan oleh BPK dengan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kecukupan pengungkapan. Kesesuaian dengan SAP berarti laporan keuangan telah disusun dengan regulasi yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Sedangkan efektivitas SPI bertujuan agar dapat dicapainya program pemerintah sesuai sasaran dan mencegah terjadinya kecurangan maupun korupsi.

Dari beberapa manfaat diperolehnya opini WTP, pada akhirnya predikat opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.1.72
Penerimaan Penghargaan Peringkat Pertama Provinsi
dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi APBD
Tahun 2022



Ke depan, akan ditempuh langkah-langkah strategis dalam upaya mempertahankan WTP Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat *urgent* dan perlu terus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas SDM adalah untuk meningkatkan kinerja. Kualitas SDM yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas;
- ❖ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi Keuangan Daerah;
- ❖ Meningkatkan sistem pengendalian internal, yang tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- ❖ Mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas LKPD dengan Penguatan komitmen bersama dan penyatuan langkah yang dituangkan dan dikendalikan dalam rencana aksi yang didukung oleh seluruh Perangkat Daerah. Pembentukan dan penguatan peran konsultatif dan koordinasi satgas SPIP dan satlak SPIP-OPD;
- ❖ Pengelolaan aset terkait pencatatan dan pelaporan sehingga sesuai dengan ketentuan. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
- ❖ Memfasilitasi tindak lanjut temuan BPK, melalui pembuatan rencana aksi atas temuan dan rekomendasi BPK dan pembentukan tim agar temuan dan rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti;
- ❖ Terus melakukan antisipasi terhadap temuan baru tahun berjalan, dan menyusun LKPD tahun berikutnya dengan selalu memperhatikan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya.
- ❖ Menyusun *Action Plan* yang terintegrasi harus dalam setiap penyusunan rencana pembangunan;
- ❖ Meningkatkan evaluasi rutin dan pengawasan internal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

- pengelolaan keuangan daerah, serta perbaikan terhadap tugas dan fungsi dan SOP dalam mendukung kewajiban implementasi SAP berbasis akrual;
- ❖ Melakukan Penetapan Perda APBD paling lambat Desember tahun sebelumnya (tepat waktu). Semua dokumen pelaksanaan anggaran dan penunjukkan pengelola keuangan dan panitia/pejabat pengadaan telah ditetapkan pada Desember tahun sebelumnya;
 - ❖ Meningkatkan kualitas hasil bimbingan teknis/sosialisasi/supervise/ pendampingan tentang implementasi pengelolaan keuangan yang baik yang dilakukan kepada seluruh pengelola keuangan mulai dari pimpinan dan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, terutama Bendaharawan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, sampai kepada para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
 - ❖ Terus mendorong pelaksanaan dan penggunaan transaksi non tunai dalam setiap transaksi penggunaan anggaran/belanja daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, pada tabel dibawah ini akan sajikan perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo atas sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dengan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah realisasi Nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1.73
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	-

Sumber Data : Badan Keuangan Tahun 2023

3.2. REALISASI ANGGARAN

A. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada suatu pemerintah daerah disesuaikan dengan proporsi pembangunan. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki struktur APBD yaitu pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta belanja daerah yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengalokasian anggaran ini untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 memiliki anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.1.822.869.959.330.57 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.779.537.903.506.45 atau sebesar 97,62 persen. Dan pada tahun 2019, tingkat pagu belanja tercatat mengalami kenaikan dengan nilai pagu belanja APBD Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 2 Triliun yaitu Rp. 2.020.131.920.539,50 naik sebesar 11 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan pagu anggaran belanja di tahun 2019 utamanya didorong oleh kenaikan pagu anggaran belanja operasi dan bagi hasil sebesar 16,4 persen dan 7,48 persen. Di sisi lain, terjadi penurunan pagu anggaran belanja modal yakni sebesar 7,35 persen yang didorong oleh penurunan belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 25,2 persen dan belanja bangunan gedung sebesar 18 persen. Sementara itu, realisasi penggunaan anggaran tahun 2019 sebesar 1.938.384.421.061,72 atau sebesar 95,94 persen.

Peningkatan belanja operasi didorong oleh adanya peningkatan realisasi belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa masing-masing sebesar 7,4 persen dan 29,6 persen. adapun jenis belanja pegawai yang dilakukan adalah kenaikan gaji tahunan PNS dan pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh ASN serentak di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo bersamaan dengan pembayaran gaji pada Bulan Juli 2019.

Pada tahun 2020 anggaran pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1.861.054.053.151,92 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.732.528.592.447,17 atau sebesar 93,09 persen. Pada tahun 2021, anggaran sejumlah Rp.2.010.882.300.876,37 dengan realisasi sebesar Rp.1.866.359.526.688,85 atau 92,84 persen. Dan pada tahun 2022, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo yaitu, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.784.137.999.082,00, belanja daerah sebesar Rp. 2.122.278.456.084,- pembiayaan sebesar Rp. 338.140.457.002,-

Dibawah ini akan disajikan realisasi anggaran per program yang mendukung kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Per Program
Tahun 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	KEPALA DAERAH			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,992,183,600.00	5,687,671,516.00	71.17
2.	WAKIL KEPALA DAERAH			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,472,673,672.00	1,256,034,515.00	85.29
3.	PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30,007,560,173.00	23,885,521,957.00	79.60
4.	BIRO HUKUM			
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3,304,906,112.00	3,186,458,967.00	96.42
5.	BIRO ORGANISASI			
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1,368,886,493.00	1,364,265,784.00	99.66
6.	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA			
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	187,409,581.00	151,977,428.00	81.09
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1,833,045,229.00	1,694,386,644.00	92.44
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	23,464,833,913.00	20,981,192,267.00	89.42

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
7.	BIRO PENGADAAN			
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,003,298,508.00	992,933,196.00	98.97
8.	BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	999,765,840.00	917,393,497.00	91.76
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	522,689,155.00	513,392,241.00	98.22
9.	BIRO UMUM			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21,049,605,281.00	19,467,735,668.00	92.49
10.	BADAN KEPEGAWAIAN			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,208,057,340.00	3,863,892,310.00	91.82
11.	BADAN KESBANGPOL			
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	251,378,191.00	249,283,316.00	99.17
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2,422,542,579.00	2,418,729,598.00	99.84
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2,132,876,970.00	2,131,670,077.00	99.94
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	855,993,885.00	855,456,702.00	99.94
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	9,660,905,215.00	9,654,413,500.00	99.93
12.	BADAN KEUANGAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	244,364,631,278.00	235,235,467,994.00	96.26
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,529,725,717.00	1,462,251,351.00	95.59
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6,288,329,499.00	5,814,743,211.00	92.47
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3,271,980,103.00	3,157,707,398.00	96.51
14.	BADAN PENGHUBUNG			
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	714,279,834.00	707,368,572.00	99.03
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1,244,798,215.00	1,230,339,145.00	98.84

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
15.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4,161,876,383.00	4,054,887,157.00	97.43
16.	BAPPPEDA			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,204,575,530.00	1,122,545,798.00	93.19
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,620,152,302.00	1,592,728,916.00	98.31
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2,493,074,198.00	2,445,646,175.00	98.10
17.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	240,986,784.00	240,417,480.00	99.76
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	11,336,092.00	11,335,004.00	99.99
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	97,011,462.00	96,933,670.00	99.92
18.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1,184,107,562.00	1,130,415,929.00	99.47
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22,372,276,712.00	18,100,388,487.65	80.91
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,929,576,399.00	2,909,980,367.00	99.33
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	757,599,496.00	742,202,972.00	97.97
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4,662,697,302.00	4,359,119,710.90	93.49
19.	DINAS KESEHATAN			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	75,755,943,602.00	73,406,265,677.00	96.9
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	83,412,000.00	80,184,668.00	96.13
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5,494,122,000.00	1,781,918,133.00	32.43
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	163,316,000.00	120,201,367.00	73.60
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	352,768,000.00	325,477,050.00	92.26
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	990,173,000.00	945,150,020.00	95.45
20.	DINAS KOMINFO DAN STASTIK			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	582,492,715.00	581,613,118.00	99.85

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	190,014,869.00	189,559,917.00	99.76
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,421,254,922.00	3,395,210,102.00	99.24
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8,282,708,825.00	8,131,283,887.00	98.17
21.	DINAS KOPERASI, UM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3,595,386,076.00	3,535,773,259.00	98.34
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	331,539,238.00	330,865,850.00	99.80
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	11,022,150,109.00	8,234,091,658.00	74.70
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	155,345,400.00	152,309,100.00	98.05
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2,625,870,358.00	2,588,426,886.00	98.57
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	284,130,413.00	271,011,547.00	95.38
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	404,017,104.00	403,682,324.00	99.92
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1,964,447,457.00	1,952,168,997.00	99.37
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	318,627,570.00	315,048,665.00	98.88
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,943,329,233.00	1,936,243,999.00	99.64
22.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	17,740,400,498.00	17,651,481,103.00	99.50
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	540,629,180.00	536,560,524.00	99.25
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	464,403,566.00	461,443,832.00	99.36
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	68,531,660.00	68,192,420.00	99.50
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	151,138,315.00	150,971,440.00	99.89

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	579,621,519.00	579,617,324.00	100.00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	728,472,111.00	676,925,110.00	92.92
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	182,331,742.00	182,312,271.00	99.99
23.	DINAS PANGAN			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,685,976,807.00	2,643,069,900.00	98.40
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	402,289,775.00	401,957,650.00	99.92
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	236,004,847.00	235,440,593.00	99.76
24.	DINAS PARIWISATA			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.069.198.824,00	3,159,214,063.00	77,64
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,292,363,769.00	2,239,543,132.00	97.70
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	840,933,011.00	781,748,250.00	92.96
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	450,472,631.00	433,560,872.00	96.25
25.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	78,848,022,094.00	59,759,708,302.00	75.79
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2,310,033,906.00	2,153,908,413.00	93.24
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	14,216,547,486.00	14,216,547,486.00	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	6,811,641,810.00	6,629,487,247.00	97.33
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	221,490,967.00	205,402,457.00	92.74
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	965,677,352.00	918,960,344.00	95.16
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4,820,802,590.00	4,486,520,415.00	93.07
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8,304,580,481.00	6,207,880,948.00	74.75
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2,394,731,064.00	1,491,478,541.00	62.28
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	120,955,247,406.00	97,814,965,130.00	80.87

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	879,789,439.00	857,996,466.00	97.52
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,229,033,153.00	2,186,395,203.00	98.09
26.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,ADM. KEPENDUDUKAN CAPIL			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	152,840,323.00	152,614,860.00	99.85
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	252,498,102.00	251,485,338.00	99.6
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	967,359,175.00	965,780,642.00	99.84
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3,201,113,508.00	3,158,767,015.00	98.68
27.	DINAS PENANAMAN MODAL ESDM DAN TRANSMIGRASI			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	99,998,675.00	97,157,478.00	97.16
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	1,648,978,620.00	1,648,070,756.00	99.94
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	379,865,010.00	364,327,284.00	95.91
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	689,914,893.00	687,974,899.00	99.72
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	157,538,656.00	156,192,500.00	99.15
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,293,982,531.00	1,287,766,118.00	99.52
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	388,259,801.00	388,135,915.00	99.97
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	164,239,717.00	163,789,434.00	99.73
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99,999,626.00	98,662,429.00	98.66
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	815,073,527.00	724,213,781.00	88.85
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	315,229,765.00	313,592,844.00	99.48
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	429,999,434.00	425,838,107.00	99.03
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1,050,399,493.00	888,075,430.00	84.55
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	149,999,677.00	143,444,089.00	95.63
28.	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,096,212,508.00	1,080,969,312.00	98.61

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	480,266,712.00	478,445,581.00	99.62
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	245,019,441,049.00	210,400,756,829.00	85.87
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	10,063,235,515.00	10,046,360,884.00	99.83
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	946,863,820.00	946,217,366.00	99.93
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	93,999,931.00	86,308,549.00	91.82
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	351,783,566.00	351,153,206.00	99.82
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,897,121,877.00	2,730,133,367.00	94.24
29.	DINAS PERHUBUNGAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4,655,070,568.00	4,602,452,249.53	98.87
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	220,223,778.00	218,962,772.00	99.43
30.	DINAS PERTANIAN			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	32,208,177,227.00	31,799,079,466.00	98.73
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	220,913,747.00	220,771,849.00	99.94
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,123,482,074.00	1,106,366,853.00	98.48
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	851,716,765.00	794,397,121.00	93.27
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,347,556,026.00	2,701,634,138.00	80.70
31.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,369,512,965.00	1,297,369,487.00	94.73
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7,347,491,099.00	6,656,365,801.42	90.59
32.	SATPOL PP, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,638,654,933.00	3,594,239,319.00	98.78
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	399,499,200.00	399,063,756.00	99.89
33.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,481,208,610.00	1,453,231,508.00	98.11

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2,594,128,229.00	2,579,272,445.00	99.43
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	166,834,759.00	140,662,020.00	84.31
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3,623,564,146.00	3,517,975,541.00	97.09
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	62,458,756.00	61,357,110.00	98.24
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12,164,687,470.00	10,898,182,932.00	89.59
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	99,999,435.00	90,041,261.00	90.04
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	727,339,231.00	724,084,621.00	99.55
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	775,770,856.00	763,141,078.00	98.37
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	731,528,204.00	472,840,312.00	64.64
34.	INSPEKTORAT			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,754,231,258.00	2,743,908,026.00	99.63
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	860,686,734.00	842,819,042.00	97.92
35.	SEKRETARIAT DPRD			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	48,930,778,241.00	44,118,163,269.00	90.16
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	5,009,053,885.00	3,815,432,307.00	76.17
36.	RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13,030,954,480.00	12,817,401,679.00	98.36
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4,770,199,934.00	4,689,766,207.00	98.31

Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Selanjutnya, pada tabel dibawah ini akan disajikan alokasi anggaran per sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta realisasi penggunaan anggaran dan capaiannya di tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Sasaran Strategis
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara (orang)	57	0,73	5.398.757.195,00	99,03
		Wisatawan Nusantara (kunjungan)	704.821	92,86		
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (triliyun rupiah)	18.073,68	127,02	36.622.249.427,00	98,07
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	Skor PPH Ketersediaan	76,66	114,76	2.643.069.900,00	98,40
		Skor PPH Konsumsi	74,33	84,43		
		Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	99,80	97,83	2.909.980.367,00	99,33
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	107,92	103,35	1.106.366.853,00	98,48
4	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	0,53	81,53	3.157.707.398,00	96,51
		Luas Lahan Kritis yang ditangani (luas lahan kritis)	1.272 ha	127,00	17.651.481.103,00	99,50
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	280,05 km	100,74	97.814.965.130,00	80,87
		Indeks E-Government	2,48	64,42	8.131.283.887,00	98,17
6	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,58%	237,23	1.287.766.118,00	99,52
		Jumlah Desa Tertinggal yang di Entaskan	88 desa	172,73	4.376.032.995,00	86,68
		Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	1,85	96,66	5.814.743.211,00	92,47

7	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	77,75%	100,27	210.400.756.829,00	85,87
		Angka Melek Huruf	99,85	99,85		
8	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,30	104,17	73.406.265.677,00	96,90
9	Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	4 jenis	133,33	829.598.787,00	99,70
		Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0,25	100,00	20.981.192.267,00	89,42
10	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	15,51%	95,98	161.566.081.236,00	97,65
11	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	14,05%	16,92	2.153.908.413,00	93,24
		Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	0%	0,00		
		Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	20%	100,00	6.656.365.801,42	90,59
12	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,61)	99,43	16.639.236.608,00	99,43
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	100,00	235.235.467.994,00	96,26

Sumber Data : Hasil perhitungan capaian kinerja dan hasil capaian realisasi anggaran per sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Dari tabel 3.2.2 diatas, dapat diketahui tingkat capaian kinerja disandingkan dengan tingkat capaian anggaran per sasaran strategis untuk mewujudkan pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022. Terhadap kinerja anggaran di Provinsi Gorontalo yang akselerasi terhadap penyerapannya Provinsi Gorontalo dikendalikan melalui aplikasi e-Monev. Dalam rangka pengendalian percepatan penyerapan APBD dan APBN di Provinsi Gorontalo ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan secara rutin Pra-Rapim dan Rapat Pimpinan (setiap triwulan) serta Rapat Koordinasi dan Evaluasi (dilaksanakan per enam bulan) secara berkala yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan langsung dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan diintegrasikan dengan rapat percepatan pelaksanaan pembangunan baik terhadap paket pekerjaan yang dilelang maupun yang dilaksanakan secara

swakelola. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah bersama seluruh stakeholder dalam menyelenggarakan program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021 sampai tahun 2022, dimana masih terjadi pandemic covid-19 maka mendorong pemerintah pusat hingga daerah untuk menempuh kebijakan pengalokasian anggaran untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca covid-19. Guna menyikapi penanganan terhadap pandemi yang terjadi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan kebijakan *refocusing* anggaran utamanya pada anggaran untuk belanja langsung yang tersebar disemua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap penanganan pandemi Covid-19.

B. Analisis Efisiensi

Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran serta dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah mutlak untuk dilaksanakan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden bahwa pemerintah harus menjamin setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan serta harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Sejatinya, efektivitas erat kaitannya dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Maka apabila konsep efektivitas dihubungkan ke dalam kaidah peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai pelaksanaan atas program/kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan demi mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, hal tersebut telah menggambarkan tingkat efektivitas sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya, efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan yaitu anggaran. Sejatinya efisiensi diartikan sebagai rasio perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut. Tetapi hal

tersebut tentunya memerlukan analisis factor-faktor yang mempengaruhi perhitungan efisiensinya. Dalam hal ini, tingkat efisiensi adalah tingkat penggunaan anggaran dalam mendukung kinerja .

Selanjutnya, akan diuraikan tentang tingkat efisiensi Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Tingkat Efisiensi dan Capaian Kinerja terhadap Anggaran
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022


No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara (orang)	46,79	99,03	0,97
			Wisatawan Nusantara (kunjungan)			
2	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (triliyun rupiah)	127,02	98,07	1,93
		Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	Skor PPH Ketersediaan	99,56	98,40	1,60
			Skor PPH Konsumsi			
			Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	97,83	99,33	0,67
			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	103,35	98,48	1,58
3	Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	Indeks Resiko Bencana	81,53	96,51	3,49
			Luas Lahan Kritis yang ditangani (luas lahan kritis)	127,00	99,50	0,5
4	Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk konektivitas Ekonomi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	100,74	80,87	19,13
			Indeks E-Government	64,42	98,17	1,83
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	Tingkat Pengangguran Terbuka	237,23	99,52	0,52
			Jumlah Desa Tertinggal yang di Entaskan	172,73	86,68	13,32
			Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	96,66	92,47	7,53

6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	100,06	85,87	14,13
			Angka Melek Huruf			
		Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	104,17	96,90	3,10
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	133,33	99,70	0,30
			Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	100,00	89,42	10,58
7	Penurunan Angka Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	95,98	97,65	2,35
			Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	16,92	93,24	6,76
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak			
			Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	100,00	90,59	9,41
8	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	99,43	96,23	3,77
			Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	96,26	3,74

Sumber Data : Hasil perhitungan capaian kinerja dan hasil capaian realisasi anggaran per sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Pada tabel 3.2.3 diatas dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja di tahun 2022. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai efisiensi anggaran terhadap kinerja beberapa sasaran strategis sangat baik, seperti pada sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, dimana capaian realisasi anggaran sebesar 85,87 persen, dengan capaian kinerja sebesar 100,06 persen. Begitu pula yang terjadi terhadap sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat capaian kinerja mencapai 104,17 dengan penggunaan anggaran sebesar 96,90 persen. Tingkat efisiensi juga ditunjukkan pada pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Iman dan Taqwa capaian kinerja rata-rata mencapai 100 persen, dengan penggunaan anggaran sebesar rata-rata 90 persen.

Kondisi demikian terjadi pula pada sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan dengan capaian kinerja rata-rata mencapai



diatas 100 persen, karena melebihi target kinerja yang ditetapkan di tahun 2022, dengan capaian anggaran lebih kecil, dengan rata-rata capaian sebesar 93 persen. Sasaran strategis lainnya yang mendukung meningkatnya kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian anggaran sebesar 96,24 persen, tetapi kinerja mencapai 99,72 persen.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sektor unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap memerlukan dukungan serta kebijakan-kebijakan dan keberpihakan serta komitmen yang tinggi utamanya pada sektor pariwisata Gorontalo, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

BAB 4

PENUTUP



- A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA DAERAH
- B. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH DIMASA DATANG UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya serta sebagai bagian dari kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahun 2022 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode 2017-2022.

Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo menggambarkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana telah dilakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja pemerintah dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi pemerintah daerah, laporan kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, laporan kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung memadai yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan

(2022), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun dan pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 atau pada tahun terakhir periode RPJMD ini sebagian capaiannya masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 yaitu terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Banyak kebijakan ditempuh oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk penanganan dan pencegahan merebaknya penularan covid-19, yang paling utama adalah kebijakan *refocussing* anggaran dan realokasi kegiatan sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang berpihak pada penanggulangan dampak covid-19 serta pada sektor-sektor yang berpihak pada masyarakat yang terdampak covid-19. Meskipun demikian, secara umum pencapaian kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2022 atau capaian akhir RPJMD dapat dicapai dengan sangat baik.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 8 (delapan) program unggulan atau program prioritas pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan yang dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yaitu :

1. *Pendidikan yang berkualitas*; Setelah sukses dengan “Prodira” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global;
2. *Kesehatan yang prima*; Setelah sukses dengan “JAMKESTA” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo;
3. *Infrastruktur lebih merata*; Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo;

4. *Ekonomi yang lebih meningkat*; Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
5. *Pemerintah yang lebih melayani*; melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman;
6. *Agama dan Budaya*; Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak;
7. *Pariwisata yang lebih mendunia*; Perbaikan infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international;
8. *Lingkungan yang lebih lestari*; Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa, kerja keras telah dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memastikan dan mewujudkan pencapaian kinerja prioritas pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga jangka menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD tahun 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya

sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk dan aspek.

Dibawah ini adalah ringkasan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan akhir RPJMD tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2022 dan Akhir RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian s.d Akhir RPJMD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai Destinasi Nasional/Internasional	Meningkatnya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	1	Wisatawan Mancanegara (orang)	7.937	57	0,73	0,73
			2	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	759.023	704.821	92,86	92,86
2	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	3	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan pada PDRB (rupiah)	14.228,39	18.073,68	127,02	127,02
			4	Skor PPH Ketersediaan	66,89	76,66	114,76	97,83
		Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Bersumber dari Pertanian dan Kelautan Perikanan yang berdampak pada Kesejahteraan Petani/Nelayan	5	Skor PPH Konsumsi	86	74,33	84,43	103,35
			6	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	102,01	99,80	97,83	114,76
			7	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan (NTPT)	104,42	107,92	103,35	84,43
3	Memelihara Daya Dukung Lingkungan untuk Pemanfaatan SDA yang Berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana	8	Indeks Resiko Bencana	0,37-0,65	0,53	81,53	81,53
			9	Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi	1.000 ha	1.272 ha	127,00	100,37
4	Peningkatan Infrastruktur Daerah untuk Konektivitas	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	10	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik	278 km	280,05 km	100,74	100,74

	Ekonomi	Daerah	11	Indeks E-Government	3,85	2,48	64,42	64,42
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan	12	Pertumbuhan Ekonomi	6,3 %	4,04 %	64,13	64,13
			13	Indeks Gini	0,412	0,423	97,33	97,33
			14	PDRB Perkapita (Rupiah)	37,560,000	39.886.776,66	106,19	106,19
			15	Laju Inflasi	3,30	5,15	28,33	28,33
			16	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11 %	2,58 %	137,23	137,23
			17	Jumlah Desa Tertinggal yang di entaskan	88 Desa	24 Desa	172,73	172,73
			18	Pendapatan Daerah (Rp. Triliyun)	1,914	1,85	96,66	96,66
6	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	19	Indeks Pembangunan Manusia	69,62	69,81	100,27	100,27
			20	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	78,00%	81,49%	104,47	104,74
			21	Angka Melek Huruf	100%	99,85%	99,85	99,89
		Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	22	Angka Kelahiran Total (<i>Fertility Rate</i>)	2,40	2,30	104,17	104,17
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq	23	Jumlah Warisan Budaya yang Memperoleh Pengakuan Nasional dan Internasional	3 jenis	4 jenis	133,33	180,00
			24	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0,25	0,25	100	100
7	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman	25	Persentase Cakupan Akses Air Minum yang Layak	83,02%	14,05%	16,92	97,99
			26	Persentase Cakupan Akses Sanitasi Layak	69,41%	0%	0,00	0,00
			27	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	20%	20%	100	100
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	28	Persentase Angka Kemiskinan	14,91%	15,51%	95,98	95,74

8	Peningkatan Tata Kelola Pemerrintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	29	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (70,01)	B (69,61)	99,43	99,43
			30	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	100

Sumber Data : Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bertanggungjawab terhadap sasaran kinerja pendukung IKU Daerah tahun 2023

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari 8 (delapan) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang diukur dengan 30 indikator kinerja, sebagian besar target kinerja di akhir tahun RPJMD tersebut dapat diwujudkan dengan sangat baik, bahkan terdapat capaian kinerja yang melebihi target kinerja akhir RPJMD yaitu: 1). PDRB Per Kapita Provinsi Gorontalo, 2). Penanganan terhadap Pengangguran Terbuka, 3). Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 4). Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB, 5). Nilai tukar nelayan/pembudidaya, 6). Pengentasan Desa Tertinggal, 7). Skor PPH Konsumsi, 8). Penanganan lahan kritis, 9). Pengelolaan jalan di Provinsi Gorontalo, 10). APM SMA/MA/SMK, 11). Angka Kelahiran Total (TFR), dan 12). Pelestarian warisan budaya.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu menjadi fokus dan perhatian bagi perbaikan kinerja Pemerintah Povinsi Gorontalo ke depan utamanya dalam pencapaian kinerja prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19, menuntaskan masalah Kemiskinan dan menekan laju inflasi serta komitmen pemerintah dalam melaksanakan target-target pembangunan yang berpihak bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Berikut ini akan diuraikan kesimpulan dari beberapa indikator kinerja yang masih memerlukan kerja keras dan komitmen bersama dalam pencapaiannya sebagai berikut:

Pertama, dalam mencapai tujuan menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai destinasi Nasional/Internasional. Tujuan ini dicapai dengan menetapkan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara dengan indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana terjadi pandemi covid-19, sektor pariwisata adalah yang paling banyak

terdampak dari adanya pandemi ini. Pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas masyarakat utamanya di masa liburan atau dihari-hari libur, berdampak pada berkurangnya kunjungan pada destinasi-destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara masih belum pulih tercatat hanya sebanyak 57 kunjungan. Hal serupa tidak terjadi pada keadaan kunjungan wisatawan nusantara, di tahun 2022 ini kunjungan wisatawan nusantara sudah mulai pulih hingga tercapat sebesar 704.821 kunjungan. Kondisi ini memacu pemerintah untuk segera bangkit dan bekerja lebih keras lagi dengan melakukan inovasi-inovasi terhadap keberadaan destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo utamanya dalam upaya kembali melakukan promosi pariwisata pasca pandemic covid-19.

Kedua, dalam mencapai tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan, tantangan dalam pencapaian kinerja ini, yang merupakan kinerja utama yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,41 persen, berangsur mulai membaik di tahun 2022 ini yaitu sebesar 4,04 persen. Meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional, tetapi sudah terdapat geliat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, yang naik sebesar 1,63 poin dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan diawal bahwa perekonomian baik pusat maupun daerah tahun 2021 masih sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja makro sehingga banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi capaian kinerjanya yaitu antara lain kinerja ekspor luar negeri dalam hal ini adalah potensi ekspor komoditas jagung, perbaikan iklim investasi di Provinsi Gorontalo, tingkat permintaan masyarakat, konsumsi pemerintah dan pertumbuhan lapangan usaha. Di awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah dimulai program pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan mampu berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi sampai ke daerah sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus beranjak naik.

2. Laju inflasi. Inflasi merupakan indikator penting dan tolok ukur perekonomian yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas makro. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa didalam wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Inflasi Gorontalo tahun 2022 yang sebesar 5,15 persen ini adalah inflasi tertinggi yang dialami Provinsi Gorontalo sejak 5 tahun terakhir. Secara Nasional di tahun 2022, inflasi dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM. Khusus di Provinsi Gorontalo, secara terinci inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga konsumen dari 107,12 pada Desember 2021 menjadi 122,64 pada Desember 2022. Terhadap tingginya inflasi pada akhir tahun 2022, Pemerintah provinsi Gorontalo telah menetapkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi Gorontalo.

Ketiga, Penurunan Angka Kemiskinan. Pada tahun 2022 sebesar 15,51 persen. Dibandingkan dengan keadaan angka kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2021, yang berada pada angka 15,41 persen, berarti Kemiskinan di Provinsi Gorontalo naik sebesar 0,1 persen. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, program/kegiatan yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan serta koordinasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders kesemuanya tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tanpa koordinasi dan sinergitas yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpihak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa terjawab.

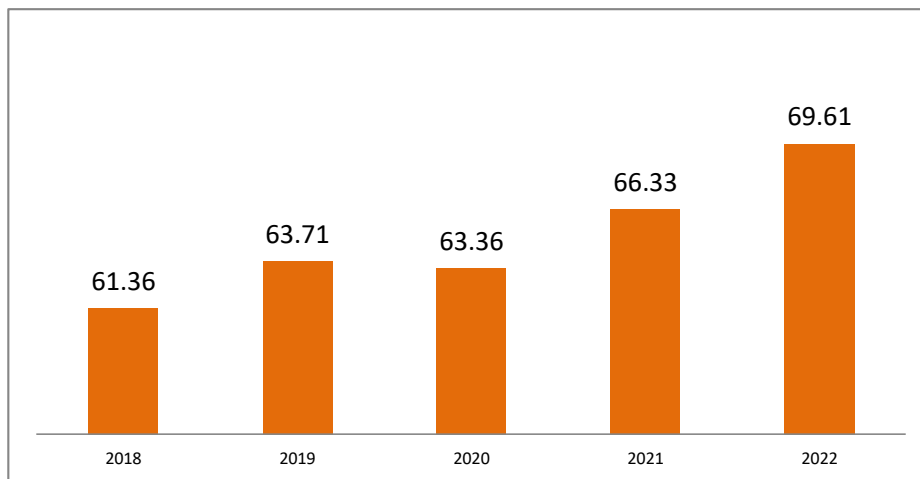
Keempat, Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak. Dalam mencapai tujuan penurunan angka Kemiskinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan

Sanitasi yang layak. Ditetapkannya indikator ini adalah karena penyediaan akses air minum dan sanitasi ini menjadi prioritas nasional. Sebab setiap orang berhak atas air yang cukup, berkelanjutan, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Salah satu indikator negara maju adalah penyediaan air minum dan sanitasi aman. Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024 mengatur penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Terkait air minum dan sanitasi layak dalam RPJMD 2017-2022 untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum capaian akses air minum layak perpipaan masih dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, sementara Provinsi Gorontalo belum melaksanakan secara optimal.

Kelima meningkatkan indeks *E-Government* atau indeks SPBE. Indeks SPBE di Provinsi Gorontalo melalui dukungan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Layanan Informasi, Assesment E-Government dan Pelatihan asesor SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Capaian kinerja di tahun 2022, indeks SPBE sebesar 2,48. Dibandingkan dengan indeks di tahun 2021 yang berada pada angka 2,51, ini berarti bahwa, kerja keras dan komitmen bersama perlu terus ditingkatkan. Perbaikan kedepan yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan membangun *Grand Design* SPBE Provinsi Gorontalo sebagai pedoman atau penuntun arah dalam pelaksanaan SPBE di Provinsi Gorontalo.

Kelima, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Gorontalo dengan menetapkan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang capaian kerjanya masih belum mencapai target kinerja yang ditetapkan. Indeks reformasi birokrasi tahun 2022 yaitu sebesar 69,61 atau kategori B. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah kategori BB, berarti belum mencapai target kinerja. Meskipun demikian dimana belum mampu meningkatkan kategori dari B menjadi BB sebagaimana target yang ditetapkan, tetapi dari sisi nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,28 poin. Keadaan indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik 4.2
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2022



Sumber : Biro Organisasi Tahun 2023

Dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tentulah banyak tantangan yang dihadapi. Butuh kerjasama semua pihak sehingga pengelolaan pemerintahan yang baik dapat terwujud. Tantangan yang dihadapi tentunya terkait dengan partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian terhadap stakeholders, berorientasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta pencapaian visi strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan baiknya indeks reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo senantiasa melakukan perbaikan menuju cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Langkah perbaikan tersebut yang telah dilakukan di tahun 2022 ini tentunya berpedoman atau merujuk pada rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu pedoman untuk menentukan rencana aksi selanjutnya. Rekomendasi dan tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pada tahun 2022 sudah masuk pada tahap ke tiga penyederhanaan birokrasi yaitu mekanisme atau sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi.
2. Melakukan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Masif sampai ketingkat Unit kerja/OPD. Publikasi pesan-pesan reformasi birokrasi melalui website masing-masing OPD serta Pemberian Penghargaan BerAKHLAK AWARD- Penghargaan Pemimpin dan Agen Perubahan untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota.
3. Mendorong dan memastikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjalan lebih optimal, sehingga mampu mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi di Provinsi Gorontalo. Optimalisasi Pembinaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ditempuh dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan pembangunan zona integritas menuju WBK, dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai program kerja yang telah dituangkan dalam PKPT Inspektorat sejak Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Adapun calon unit kerja yang ditetapkan adalah : BPM-PTSP, BKPPD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, dan IPTB Samsat Kota Gorontalo, Samsat Kab.Gorontalo dan Samsat Kab.Boalemo. Dari 8 (delapan) unit kerja tersebut, 2 (dua) diantaranya yaitu Dinas PM, ESDM dan Transmigrasi (Eks PTSP) Nilai Z dan Dinas Kesehatan Unit Pelayanan RSUD dr. Hasri Aiunun Habibie, telah diusulkan untuk ditetapkan menjadi calon unit kerja Berpredikat ZI Menuju WBK Kepada Kemenpan.
4. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi dari APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga dapat lebih berperan dan memastikan bahwa segala kebijakan yang telah ditetapkan khususnya terkait kebijakan pengawasan terimplementasi dengan baik. Melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo saat ini level 3 menuju level 4. Melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Gratifikasi, WBS, dan SPIP. Penguatan Satgas UPG OPD untuk pengendalian gratifikasi. Penguatan Satgas SPIP OPD dan ketaatan terhadap pelaporan harta kekayaan LHKPN dan LHKASN. Peningkatan Indeks Integritas SPI Pemerintah Provinsi Gorontalo urutan ke-5 Nasional.

5. Melakukan revaluasi kembali terhadap *Cascading* dan Penjenjangan kinerja melalui penyusunan Pohon Kinerja serta pemetaan terhadap *crosscutting* program dan kegiatan sehingga perangkat daerah tidak lagi bekerja secara silo atau sendiri-sendiri melainkan berkolaborasi untuk mencapai tujuan daerah secara bersama-sama.
6. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *Assesment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan memetakan talenta/talent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritis dan rencana suksesi jabatan. Mengintegrasikan kegiatan pengembangan kompetensi ASN melalui tindak lanjut Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilaksanakan pada Badan Diklat dan peningkatan pendidikan pada BKD. Menyusun dokumen pola karier sebagai dasar pengembangan karier ASN. Hasil *Assesment/ talentpool* untuk pejabat administrasi telah digunakan sebagai salah satu dasar penilaian penempatan dalam jabatan struktural.
7. Menyempurnakan Proses Bisnis Provinsi Gorontalo agar mengacu pada kinerja utama organisasi, sehingga bisa menjadi dasar pembentukan organisasi berbasis kinerja yang lebih tepat fungsi. Penyusunan Peta Proses Bisnis Provinsi Gorontalo dan pendampingan penyusunan peta Proses Bisnis seluruh OPD telah dilakukan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

B. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH DIMASA DATANG UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Dalam menyikapi berbagai tantangan dan isu strategis terhadap pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, utamanya terhadap kinerja yang masih memerlukan perhatian dan komitmen tinggi untuk menuntaskannya, maka langkah-

langkah yang akan dan sedang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo diungkapkan sebagai berikut:

- Untuk terus memulihkan pertumbuhan ekonomi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo menempuh upaya meningkatkan potensi ekspor komoditas jagung, melakukan perbaikan terhadap iklim investasi di Provinsi Gorontalo, meningkatkan peran UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan dan subsidi BBM, Listrik juga pelaksanaan pasar murah yang secara rutin di gelar. Mendorong konsumsi pemerintah daerah melalui percepatan penetapan APBD dan membelanjakannya di dalam daerah di Provinsi Gorontalo. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlokasi di Wilayah Provinsi Gorontalo sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Dalam pemulihan ekonomi Gorontalo ini, tentunya Pemerintah Provinsi Gorontalo bersinergi dengan para stakeholders lain diantaranya dengan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo.

- Terhadap faktor-faktor pemicu naiknya angka Kemiskinan dan menghadapi permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. Program yang dianggap paling tepat yang mampu menurunkan kemiskinan adalah bantuan pangan, semisal Rastha dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baik nasional maupun daerah. Program ini dianggap paling tepat mengingat lebih dari 75 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk pangan. Demikian halnya dengan bantuan non-pangan seperti bantuan Rumah layak huni, subsidi Listrik bagi masyarakat miskin, Pendidikan serta Kesehatan serta upaya-upaya lainnya masih terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo agar program/kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak lebih optimal. Yang tak kalah penting adalah kampanye “Tidak/Berhenti Merokok” terus didorong dan digalakkan, sehingga pengeluaran rokok bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat/produktif.

Upaya-upaya lain yang dilakukan sebagai langkah selanjutnya adalah pendataan terhadap penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM, pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pemberian layanan kesehatan gratis, upaya meningkatkan perlindungan sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Meningkatkan pendapatan rata-rata nelayan akan dicapai dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat nelayan, pemberian bantuan peralatan penangkap ikan dan pembudidaya ikan serta Pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok nelayan baik pembudidaya maupun nelayan tangkap, juga bantuan ternak terhadap kelompok-kelompok peternak.

Selain itu, upaya-upaya lain adalah menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok karena program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin / keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Selain program-program nasional penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo pun telah melaksanakan program-program unggulan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Program penanganan daerah rawan pangan dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Dalam pencapaian kinerja kios akses pangan sampai dengan tahun 2022 sejumlah 44 lembaga keuangan desa (93 kios akses pangan).
2. Program penanganan daerah rawan pangan dengan memberikan bantuan pangan berupa paket-paket bahan pokok di daerah rawan pangan.
3. Program Kawasan Permukiman, yaitu Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) sampai dengan

- dibawah 15 (Lima Belas) Ha berupa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Pemberian Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR);
4. Program perlindungan dan jaminan sosial (bantuan sosial kesejahteraan keluarga);
 5. Program pemberdayaan sosial (bimbingan dan motivasi sosial serta peningkatan kapasitas penerima bantuan sosial);
 6. Program rehabilitasi sosial (penyaluran bantuan kepada kelompok marginal dan rentan seperti penyandang disabilitas, tuna sosial dan lanjut usia);
 7. Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 8. Program Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan;
 9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). Bantuan Bahan Produksi bagi UMK setelah memperoleh Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) berupa bahan produksi.
 11. Program Pengembangan UMKM.
 12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yaitu Penumbuhan IKM melalui pembinaan.
 13. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya;

14. Program pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan.
 15. Program pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin, yaitu memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
 16. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian terhadap minat/bakat para tenaga kerja;
 17. Program pengelolaan aspek kegeologian yaitu bantuan sumur bor untuk masyarakat sulit air bersih;
 18. Program pengelolaan ketenagalistrikan yaitu bantuan listrik gratis terhadap masyarakat miskin.
 19. Program pengawasan sarana pertanian yaitu bantuan benih padi dan jagung, bantuan ternak sapi, ayam, kambing untuk kelompok masyarakat kurang ampu.
 20. Program penataan prasarana pertanian yaitu bantuan penyediaan alat-alat mesin pertanian gratis untuk masyarakat petani yang tidak mampu.
 21. Asuransi Usaha Tani Padi yang bertujuan untuk mengalihkan resiko akibat kegagalan panen yang dialami petani dan penggarap melalui skema pertanggungan asuransi.
- Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. Pada tahun 2022, dimana pandemi covid-19 mulai melandai dan berangsur sirna, tetapi masih menyisakan beberapa permasalahan pariwisata di Provinsi Gorontalo. Sektor pariwisata menjadi satu dari delapan program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Berbagai upaya dan kebijakanpun telah ditempuh untuk menumbuhkan kembali pariwisata, diantaranya adalah mengusulkan sejumlah destinasi wisata sebagai destinasi geopark serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar di beberapa lokasi wisata. Dan yang tak kalah pentingnya adalah promosi pariwisata secara masif sehingga sector pariwisata ini segera pulih dan bergeliat kembali.

Selain itu, untuk menjawab berbagai tantangan yang ada dan dalam menyikapi isu-isu strategis bidang pariwisata, maka dengan menetapkan dan melaksanakan empat program, dengan rencana aksi yang meliputi:

- Meningkatkan kesiapan obyek wisata menyikapi pandemic covid- 19;
- Memaksimalkan kerjasama antar stakeholder pariwisata;
- Meningkatkan strategi promosi melalui media digital;
- Menyiapkan sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai;
- event-event pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan; serta
- Memaksimalkan pengembangan ekonomi kreatif.

- Meningkatkan Indeks E-Government. Di tahun 2021, indeks SPBE Provinsi Gorontalo turun menjadi 2,51 atau dengan kategori “cukup”. Dan di tahun 2022 ini indeks SPBE Provinsi Gorontalo kembali turun menjadi 2,48 masih dengan kategori “cukup”. Langkah kedepan yang dilakukan oleh Provinsi Gorontalo dalam upaya perbaikan tatakelola SPBE yaitu:

- 🗨 Mengoptimalkan pembangunan *Grand design* SPBE yang menggambarkan rencana aksi SPBE di provinsi Gorontalo;
- 🗨 Membangun sistem aplikasi yang terintegrasi baik aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder;
- 🗨 Menetapkan Kebijakan Internal SPBE, yang memuat dan mengatur standar proses tata kelola secara terpadu bagi semua unit.

- Laju Inflasi. Langkah-langkah dalam rangka pengendalian Inflasi di Gorontalo Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya terus bersinergi dan berkolaborasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan laju inflasi yaitu berupa Kerja Sama Antar Daerah (KAD):

- 🗨 Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk komoditas bawang merah.

🚦 Telah dilakukan penjajakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi KAD Gorontalo-Sulawesi Selatan secara G to G (government to government) dan telah dilaksanakan MoU secara B to B (business to business) antara UD Cindy (Kota Gorontalo) dan UD Rebi (Kota Makassar).

- Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak. Salah satu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan adalah terpenuhinya akses air minum dan tersedianya sanitasi yang layak. Untuk mendukung capaian kinerja ini, maka telah ditempuh dengan melaksanakan program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi dengan kegiatan pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih pada Rumah tangga miskin sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatannya. Di tahun 2022, penyediaan air minum dan sanitasi layak belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan beberapa kendala. Langkah kedepan untuk mengoptimalkan kinerja ini adalah:
 - Membangun/memanfaatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, yang sampai dengan tahun 2022 ini sudah masuk pada tahap penyediaan data, dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Detail Engineering Design (DED), pelaksanaan FGD studi kelayakan dan Jakstrada yaitu kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
 - Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional di Provinsi Gorontalo yakni sarana untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, dari air cuci/kamar mandi).
- Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Dari berbagai strategi dan tindaklanjut yang telah dilakukan di tahun 2022, langkah kedepan yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah:
 1. Dalam rangka menghadapi perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2023 menjadi praktik baik dimana implementasi Reformasi Birokrasi 2023 berfokus dalam lima aspek tematik, yaitu investasi,

pengentasan kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN (Tingkat Komponen dalam negeri pada belanja pemerintah). Dengan adanya penajaman Reformasi Birokrasi (RB) melalui lima aspek tematik tersebut diharapkan bisa semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi *concern* pemerintah. Olehnya akan dilakukan pemetaan terhadap kinerja yang berdampak yang ada seluruh Perangkat Daerah.

2. Untuk mendukung hal tersebut, upaya yang dilakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan peran agen perubahan di seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu menggerakkan dan mampu menjadi tauladan dalam berinovasi untuk meningkatkan kinerja.
3. Membangun sistim informasi dan aplikasi yang terintegrasi disemua lini.
4. Membangun dan mengoptimalkan kinerja kolaborasi antar *leading sector* / pengampu pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan kualitas monitoring Kabupaten/Kota, dimana monitoring yang akan dilakukan untuk dapat mengetahui data yang terkait dengan reformasi birokrasi tematik sehingga nantinya dapat diketahui apakah anggaran yang dialokasikan terhadap program/kegiatan benar-benar sesuai peruntukannya. Selanjutnya, mendapat gambaran/kepastian bahwa program-program Pemerintah benar di rasakan oleh masyarakat (memberi dampak).
6. Mengoptimalkan pengusulan pembangunan Zona Integritas.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan laporan kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya nyata untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan laporan kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan

evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik yang semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo ini yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2017-2022 dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2017-2022. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya serta karunia sehat kepada para pemimpin dan seluruh masyarakat Gorontalo sehingga cita-cita dan harapan masyarakat di daerah tercinta ini bisa terwujud yaitu Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera.

==== Terima Kasih ===